



KEMKOMINFO

BULETIN
POS DAN
TELEKOMUNIKASI
Media Komunikasi Ilmiah

DAFTAR ISI

Halaman

1. Strategi Penyelenggaraan Pos Melalui Pengembangan Kemitraan Oleh: Sri Wahyuningsih	1
2. Optimalisasi Layanan Telepon Perdesaan Oleh: Marhum Djauhari	17
3. The Innovative CIO : A New Era of CIO Supporting The Development of ICT Strategic Planning Oleh: Yudhistira Nugraha and Cahyana Ahmadjayadi	37
4. Studi Pemanfaatan Fasilitas Universal Services Obligation (USO) Di Purwakarta - Jawa Barat Oleh: Sri Ariyanti	49
5. Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Keterkaitannya Dengan Hukum Positif Oleh: Yourdan	71
6. Perkembangan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Instansi Pemerintah Oleh: Azwar Aziz	95

Redaksi menerima tulisan ilmiah atau hasil penelitian pos dan telekomunikasi dengan panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto diketik 1½ spasi. Redaksi berhak mengubah tulisan yang dimuat tanpa mengurangi makna judul tulisan.



KEMKOMIMFO

BULETIN
POS DAN
TELEKOMUNIKASI
Media Komunikasi Ilmiah

Dewan Redaksi

PENANGGUNG JAWAB

Kabadan Litbang SDM

REDAKTUR

Drs. Baringin Batubara, MM

PENYUNTING / EDITOR

Prof.Dr.Ir. Engkos Koswara

Natakusuma, MSc.

Prof.Ris.Drs.Rusdi Muchtar, BA,

MA,APU

Dr. Udi Rusadi, MS

PENYUNTING TAMU

Dr. Harry Budiarto

Dr. Setyo Riyanto, SE, MM

REDAKTUR PELAKSANA

Drs. Azwar Aziz, MM

Sri Wahyuningsih, SE, MM

Marhum Djauhari, SH

Ir. Gita Patulak, MT

Suryono, ST, MT.

**DESAIN GRAFIS &
FOTOGRAFER**

Riza Azmi, S.Kom.

SEKRETARIAT

Tatiek Mariyati, SE, MM

Drs. Yourdan, MSi

Sri Aryanti, S.T., M.T.

Sumarsono, SE

Djoko Adinugroho, S.Kom

Khomisu Salaamah

Agus Setiawan

ALAMAT REDAKSI

Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pos dan Telekomunikasi

Jln. Medan Merdeka Barat Nomor: 9
Jakarta Pusat, 1010.

Telp : (021) 34833349
34833420

Fax : (021) 34833420

PENGANTAR REDAKSI
BULETIN POS DAN TELEKOMUNIKASI

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karuniaNya penerbitan Buletin Pos dan Telekomunikasi tahun 2010 volume ke 8 (delapan) nomor 2 (dua) ini dapat terlaksana dengan baik.

Buletin Pos dan Telekomunikasi diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi, bertujuan untuk memasyarakatkan hasil penelitian/kajian/ telaahan yang dilaksanakan tenaga fungsional peneliti, pemerhati pos dan telekomunikasi, pengelola dan penyelenggara pos dan telekomunikasi. Selain itu juga untuk meningkatkan kinerja dalam rangka memacu upaya peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi. Dalam terbitan volume yang ke 8 (delapan) nomor 2 (dua) ini, Buletin Pos dan Telekomunikasi memuat 6 (enam) tulisan, masing-masing oleh :

Sri Wahyuningsih

Dalam tulisan "**Strategi Penyelenggaraan Pos Melalui Pengembangan Kemitraan**". Tulisan ini menjelaskan perubahan lingkungan strategis penyelenggaraan pos antara lain dihapusnya hak eksklusivitas bagi PT. Pos Indonesia, otonomi daerah, perubahan preferensi konsumen dan perkembangan teknologi informasi, maka diperlukan model kemitraan usaha.

Marhum Djauhari

Dalam tulisan "**Optimalisasi Layanan Telepon Perdesaan**". Tulisan ini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang demikian pesat mendorong suatu perubahan organisasi. Salah satunya adalah reorganisasi BTIP-BLU selaku pelaksana penyelenggara layanan telepon perdesaan.

Yudhistira Nugraha and Cahyana Ahmadjayadi

Dalam tulisan "**The Innovative CIO : A New Era of CIO Supporting The Development of ICT Strategic Planning**". Tulisan ini menjelaskan bahwa faktor-faktor terciptanya iklim yang inovatif dalam organisasi dengan membentuk CIO yang inovatif. Faktor iklim kerja dan budaya organisasi merupakan unsur yang penting, selain memiliki visi, dukungan dan jaringan juga sikap dan perilaku.

Sri Ariyanti

Dalam tulisan "**Studi Pemanfaatan Fasilitas Universal Services Obligation (USO) Di Purwakarta - Jawa Barat**". Tulisan ini menjelaskan pembangunan fasilitas USO, khususnya di daerah Purwakarta-Jawa Barat kurang dimanfaatkan masyarakat mengingat sudah memiliki telepon seluler dan penempatan fasilitas USO kurang strategis.

Yourdan

Dalam tulisan "**Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Keterkaitannya Dengan Hukum Positif**". Tulisan ini menjelaskan aspek hukum yang terkait dengan kebijaksanaan usaha penyiaran dan bisnis telekomunikasi, multimedia yang mudah berinteraksi dengan lingkungan sosial serta perubahan teknologi informasi.

Azwar Aziz

Dalam tulisan "**Perkembangan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Instansi Pemerintah**". Tulisan ini menjelaskan teknologi informasi sebagai langkah awal program digitalisasi administrasi pemerintah, dengan teknologi informasi diharapkan dapat mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah.

STRATEGI PENYELENGGARAAN POS MELALUI PENGEMBANGAN KEMITRAAN

Sri Wahyuningsih

ABSTRACT

Implementation of strategic environmental changes such as abolition of the post exclusivity rights for PT.Pos Indonesia, regional autonomy, changes in consumer preferences and developments in information technology requires an increase in the quantity and quality of service. This study discusses the need for partnerships with the purpose of administering the partnership model as a strategy to get the postal administration through developing partnerships. Through literature review and secondary data and based on UU No.38 / 2009 article 4 states (1) The Post conducted by a business entity under Indonesian law, (2) The business referred to in paragraph (1) consists of a. BUMN; b. BUMD; c. BUMS and d. Koperasi partnership model is obtained with the use of alternative network of state-owned enterprises.

Keyword : Partnership, Postal Operator

ABSTRAK

Perubahan lingkungan strategis penyelenggaraan pos antara lain dihapusnya hak eksklusivitas bagi PT.Pos Indonesia, otonomi daerah, perubahan preferensi konsumen serta perkembangan teknologi informasi menuntut adanya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan. Kajian ini membahas perlunya kemitraan penyelenggara dengan tujuan mendapatkan model kemitraan sebagai strategi penyelenggaraan pos melalui pengembangan kemitraan. Melalui kajian literatur dan data sekunder serta berdasarkan Undang-undang no.38 tahun 2009 pasal 4 menyatakan (1) Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia; (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a.badan usaha milik negara; b.badan usaha milik daerah; c.badan usaha milik swasta dan d. Koperasi didapat alternative model kemitraan dengan pemanfaatan jaringan badan usaha milik negara.

Kata-kata Kunci : Kemitraan, Penyelenggaraan Pos

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan lingkungan strategis penyelenggaraan pos antara lain dihapusnya hak eksklusivitas bagi PT.Pos Indonesia, otonomi daerah, perubahan preferensi konsumen serta perkembangan teknologi informasi, sehingga penyelenggara pos dituntut untuk melakukan perubahan paradigma agar loyalitas pengguna layanan pos dapat dipertahankan. Dalam ketentuan umum Undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang Pos, yang dimaksud dengan pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa layanan pos adalah jasa pengiriman yang sangat dihargai oleh pengguna jasa apabila pengiriman sampai dengan tepat waktu.

Terbentuknya Otonomi Daerah, pertumbuhan ekonomi serta era perdagangan bebas, akan banyak berpengaruh terhadap jasa kiriman untuk barang maupun uang. Otonomi daerah akan membentuk pusat industri, lingkungan bisnis maupun pola hidup masyarakat dalam berkomunikasi untuk individu maupun organisasi yang akan

berpengaruh terhadap lalu lintas surat, dokumen maupun barang. Sedangkan era perdagangan bebas akan berpengaruh terhadap industri pos, karena beroperasinya perusahaan jasa pos luar negeri yang bebas masuk ke dalam negeri dan menimbulkan persaingan ketat diantara penyelenggara pos.

Pertumbuhan penyelenggara pos tidak dapat sepenuhnya diketahui jumlahnya, karena penyelenggara swasta yang terdaftar sebagai anggota asosiasi saat ini berjumlah 500 penyelenggara pemegang ijin penyelenggaraan pos atau sekitar 2000 cabang perusahaan yang tersebar di 27 propinsi.¹ Kemungkinan banyak perusahaan kurir yang tidak terdaftar sebagai anggota asosiasi dan indikasi adanya *travel* atau perusahaan transportasi yang menerima pengiriman paket serta *city courier* yang mengantarkan surat atau dokumen di dalam kota tidak berijin tumbuh pesat. Kondisi ini tidak terlepas dari permintaan konsumen yang membutuhkan jaminan ketepatan waktu dan sampainya kiriman ke alamat yang dituju. Dengan demikian untuk mempertahankan loyalitas pengguna, maka penyelenggara pos harus peka terhadap perubahan eksternal serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan global dan salah satunya dengan melakukan kemitraan.

¹ <http://www.asperindo.or.id/abtus.html>, maret 2010

Status penyelenggara pos sebagai badan usaha milik negara maupun swasta sebenarnya tidak mempengaruhi preferensi konsumen pengguna jasa pos. Pada kondisi persaingan bebas, pengguna jasa dapat memilih akan mengirimkan barangnya melalui penyelenggara pos yang dikehendaknya, dengan kata lain loyalitas pengguna jasa layanan pos akan dipengaruhi oleh kualitas layanannya. Kepemilikan jaringan penyelenggara pos swasta banyak di kota-kota besar dan potensial karena pembangunan sarana yang tidak dianggap menguntungkan tentunya akan menjadi beban pembiayaan, sedangkan ketentuan perundang-undangan tidak mengharuskan setiap penyelenggara harus memiliki jaringan di seluruh wilayah Indonesia.

Permasalahan

Perkembangan teknologi komunikasi mempengaruhi pola komunikasi individu maupun komunitas serta organisasi, ini dapat dicermati dari produksi surat terus mengalami penurunan, seperti ditulis oleh KPPU berdasarkan sumber UPU (2004), porsi lalu lintas pengiriman surat/dokumen antar organisasi/perusahaan sekitar 25% - 35% dari total pengiriman surat/dokumen, sedangkan antar perusahaan/organisasi ke individu diperkirakan 45% - 60% dari total pengiriman surat

dan lalu lintas dari individu ke organisasi/perusahaan. Dengan kata lain pada waktu yang akan datang lalu lintas dokumen akan lebih didominasi oleh perusahaan, industri atau korporat. Sedangkan aturan tidak membatasi pengguna layanan artinya pengguna bebas memilih mau menggunakan penyelenggara dalam negeri maupun asing. Kondisi ini menuntut adanya kerjasama dalam bentuk kemitraan agar dapat memaksimalkan produksi pos melalui pemberian layanan yang diamanatkan dalam Undang-undang No.38 tahun 2009 tentang Pos dan untuk menghadapi pesaing-pesaing asing.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka yang jadi permasalahan dalam kajian ini adalah :*"Bagaimana Strategi memasuki pasar global dengan mengembangkan kemitraan"*

Tujuan dan Manfaat

Tujuan kajian ini untuk mendapatkan model strategi penyelenggaraan pos melalui pengembangan kemitraan.

Manfaat teoritis.

Apabila model kemitraan dapat ditemukan, dapat dikembangkan sebagai model bisnis antar penyelenggara pos dengan melakukan kerja sama kemitraan, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pos.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian bidang Pos dan Telekomunikasi, khususnya di bidang kebijakan penyelenggaraan pos.

Pengertian-pengertian

1. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
2. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
3. Jaringan Pos adalah rangkaian titik layanan yang terintegrasi baik fisik maupun nonfisik dalam cakupan wilayah layanan tertentu dalam penyelenggaraan pos.

KERANGKA KONSEPTUAL

Undang-undang no.38 tahun 2009 tentang Pos pada pasal 4 menyatakan (1) Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia; (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) badan usaha milik negara; (b) badan usaha milik daerah; (c) badan usaha milik swasta dan (d) koperasi.

Mencermati isi undang-undang tersebut, dapat diartikan penyelenggara pos adalah pemerintah dan swasta. Namun dalam pelaksanaan

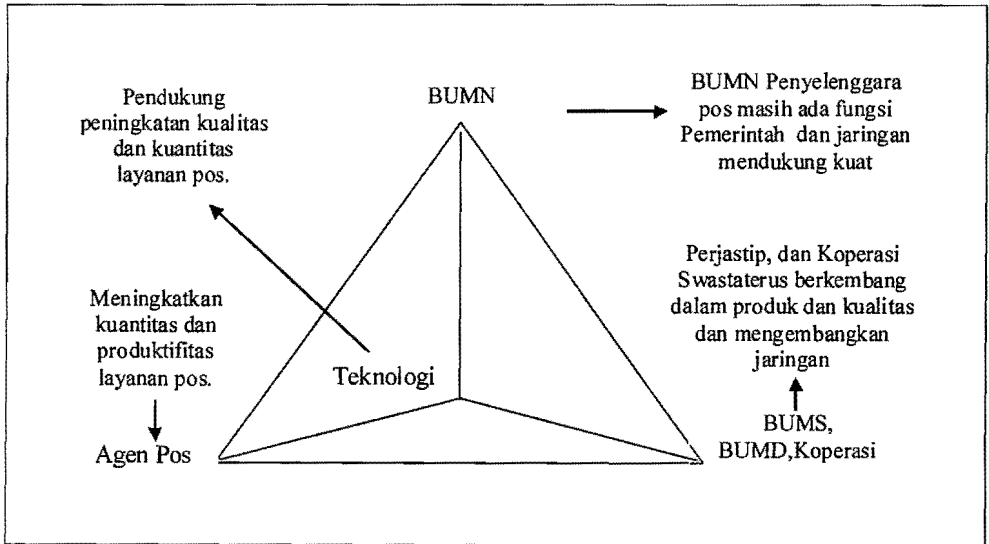
penyelenggaraan pos, dapat dimungkinkan kemitraan antara penyelenggara pos dan bukan penyelenggara pos namun melakukan transaksi jasa pos atau dapat dikategorikan sebagai agen pos.

Konsep Kemitraan

Salah satu asas dari penyelenggaraan pos yang tertuang dalam UU No.38 tahun 2009 adalah asas kemitraan yaitu pos diselenggarakan melalui kerjasama antara para Penyelenggara Pos, baik melalui interkoneksi dengan Penyelenggara Pos dalam negeri maupun kerjasama dengan pihak asing dan kerja sama dengan pengirim maupun penerima.

Kemitraan dikatakan berhasil apabila masing-masing mitra merasakan ada nilai tambah atau "value-added" dari hasil kerjasamanya. Kerjasama tiga unsur utama tersebut dapat digambarkan sebagai segitiga kemitraan dengan mengadopsi *Service Marketing Triangle* (Segitiga Pemasaran Jasa) dari Parasuraman (1996), hubungan kemitraan BUMN, BUMD, BUMS dan Koperasi dapat digambarkan dalam Gambar 1.

Pada Gambar 1 dapat dijelaskan sebagai keterkaitan antara penyelenggara pos badan usaha milik negara dalam hal ini PT Pos Indonesia, badan usaha milik daerah, Koperasi dengan Penyelenggara Swasta misalnya Perusahaan Jasa Titipan/Perjastip dan Agen Pos.



Gambar 1. Segitiga Kerjasama

Hubungan antara penyelenggara pos tidak dapat dipisahkan dari teknologi, karena pada industri pos saat ini, teknologi sudah menjadi pendukung utama. Pemanfaatan teknologi sudah banyak menggantikan kegiatan manual, peningkatan kinerja dan proses dalam layanan jasa pos.

Agen pos dalam Gambar 1 merupakan perusahaan swasta, namun bukan perusahaan dengan ijin menyelenggarakan layanan pos atau bukan perusahaan jasa layanan titipan (Perjastip), namun dimungkinkan menjual jasa layanan pos. Sehingga dalam gambar tersebut dalam kotak tersendiri.

Value-added harus dapat dirasakan oleh penyelenggara yang ingin melakukan kerjasama. Berkaitan

dengan pemberlakuan Undang-Undang No.38 tahun 2009 tentang Pos, industri pos saat ini sudah memasuki era persaingan bebas, dimana masing-masing penyelenggara termasuk PT Pos Indonesia orientasi sudah arah bisnis, sehingga apapun bentuk kerjasama, yang paling utama menghasilkan peningkatan layanan dan keuntungan. Misalnya bagi PT Pos Indonesia, kerjasama kemitraan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dengan memberdayakan potensi yang sekarang dimiliki, yaitu sarana atau jaringan yang sampai ke pelosok ataupun mengembangkan lagi dengan membuka agen pos sebagai *counter* PT.Pos Indonesia pada perusahaan bukan perusahaan jasa titipan. Bagi penyelenggara swasta

akan bermanfaat jika dapat meningkatkan profit, menambah jaringan, meningkatkan kuantitas produk, kualitas serta jasanya. Agen pos dimaksudkan perusahaan bukan penyelenggara pos, namun dapat menerima layanan jasa pos, sebagai mitra penyelenggara pos badan usaha milik negara maupun perusahaan jasa titipan, dapat menciptakan lapangan kerja, mendapatkan pengalaman bidang pos sehingga merupakan pembelajaran bagi masyarakat akan jasa pos. Menurut Eko Indrajid (2006) kunci sukses kemitraan antara lain kepercayaan dan kesungguhan untuk yang bermitra.

Kemitraan dalam pos dalam penjelasan undang-undang no.38 tahun 2009 tentang pos tersebut adalah pos diselenggarakan melalui kerjasama antara para Penyelenggara Pos, baik melalui interkoneksi dengan Penyelenggara Pos dalam negeri maupun kerjasama dengan pihak asing, dan kerjasama dengan pengirim maupun penerima. Jadi pengembangan kemitraan dapat diartikan kerja sama dalam menyelenggarakan jasa layanan pos, untuk meningkatkan pangsa pasar, menambah jaringan, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dengan tujuan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Konsep Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif adalah segala sesuatu yang dapat dilakukan dengan

jauh lebih baik oleh sebuah perusahaan bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan saingan. Menurut Mudrajad Kuncoro, suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaing, melakukan sesuatu lebih baik dari perusahaan lain, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Sesuatu yang dimiliki sebuah perusahaan tidak dimiliki perusahaan lain dan perusahaan lainnya sangat memerlukan, itu dikatakan sebagai keunggulan kompetitif. Misalnya PT Pos Indonesia mempunyai jaringan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Keunggulan kompetitif dapat mempengaruhi strategi kemitraan yang akan dilakukan oleh masing-masing penyelenggara. Masing-masing penyelenggara akan memperhitungkan kelemahan dan kekuatan calon mitra usaha atau satu dengan yang lain akan mengukur keunggulan kompetitifnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Studi Penajakan, yaitu karena belum ada gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan dihadapi dalam penelitiannya. Melalui penajakan para peneliti mengembangkan konsep-konsep dengan lebih

jasas,menentukan prioritas.² Bidang yang akan diteliti masih baru sehingga peneliti perlu mengadakan penjajakan lebih dulu untuk mengetahui sedikit mengenai permasalahan yang dihadapi. Cara-cara penjajakan, dengan teknik kualitatif yang masih menggunakan dokumen dan referensi yang terkait dengan pos.

Dalam kajian ini teknik penjajakan dengan analisa data sekunder, pertama dengan penelitian kepustakaan. Data yang berasal dari sumber-sumber sekunder dapat membantu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan Kedua dalam banyak hal dapat dilakukan suatu pencarian data sekunder dari perpustakaan atau kantor, jurnal dengan memakai komputer dan jasa on line, internet. Kreatifitas diperlukan agar data yang didapatkan berdasar atas sumber-sumber data sekunder memberikan latar belakang masalah yang sangat baik dan dapat memberikan pengarahannya yang baik. Sumber data, sumber informasi internal dan sumber informasi eksternal.

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARA POS SAAT INI

Sesuai dengan Undang-undang No 38 tahun 2009 tentang Pos, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan

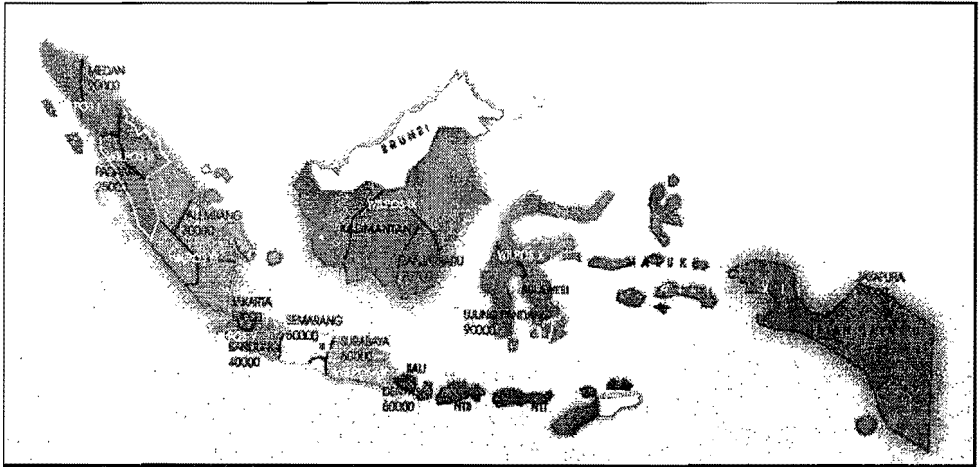
layanan pos sedangkan penyelenggara pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos yang salah satu asas penyelenggaraannya berdasarkan kemitraan. Sedangkan penyelenggara dapat berbentuk badan usaha milik negara atau PT.Pos Indonesia, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta yang saat ini disebut perusahaan jasa titipan /perjastip dan koperasi. Sedangkan layanan yang dapat diselenggarakan sama yaitu layanan komunikasi tertulis dan / atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan dan layanan keagenan pos.

Tabel 1
Fasilitas Fisik Pelayanan (FFP)
PT Pos Indonesia
Status milik sendiri posisi tahun 2008

No.	Jenis FFP	Jumlah
1	Kprk (Kantor Pos Pemeriksa)	205
2	KpcDk (Kantor Pos Cabang Dalam Kota)	420
3	KpcLk (Kantor Pos Cabang Luar Kota)	1827
4	MPC (Mail Processing Center)	7
5	SGLK (Sentral Giro dan Layanan Keuangan)	1
6	Kantor Tukar Pos Udara	1
7	Kantor Tukar Pos Laut	1
8	Kantor Filateli	1
9	MUPI (Museum Prangko Indonesia)	1
Jumlah		2464

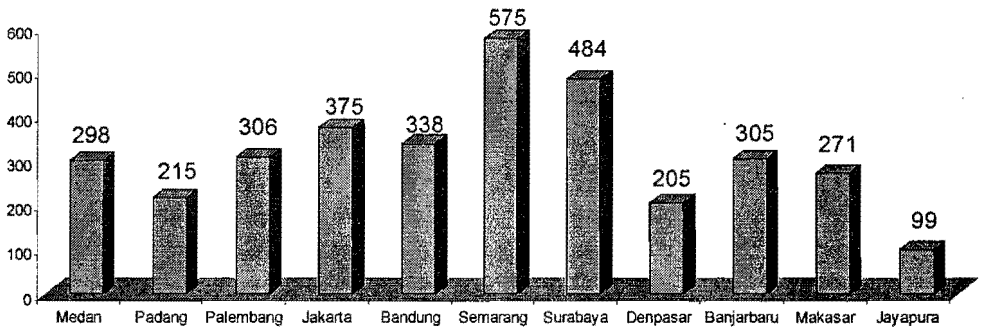
Sumber : PT.Pos Indonesia, 2009

² Donald R Cooper dan C William Emory(1996),*Metode Penelitian Bisnis*, Hal.126



Sumber: PT Pos Indonesia,2010

Gambar 2. Jaringan PT Pos Indonesia



Sumber: PT Pos Indonesia

Gambar 3. Sebaran Jaringan PT Pos Indonesia

PT Pos Indonesia (BUMN)

Kekuatan terbesar dari PT.Pos Indonesia adalah jumlah jaringan. Data menunjukkan sampai tahun 2008, jumlah jaringan PT Pos Indonesia yang berujud Fasilitas Fisik Pelayanan (FFP) yang berstatus milik sendiri berjumlah 2464, lihat tabel 1.

Sebelas wilayah usaha pos dapat dilihat pada Gambar 2 yang menggambarkan wilayah kerja, sedangkan sebaran jaringan dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3 menggambarkan penyebaran jaringan PT Pos Indonesia di seluruh wilayah Indonesia, sebagai salah satu kekuatan penyelenggaraan pos.

Inovasi pada jasa keuangan dengan menerima pembayaran rekening telepon, listrik, pajak dan angsuran pembiayaan melalui kredit serta reservasi kereta api lain-lain. Pelayanan surat korporat dilakukan dengan kerjasama sebagai salah satu terobosan menyikapi penurunan pengiriman surat individu.

Perusahaan Jasa Titipan (Badan Usaha Milik Swasta)

Perusahaan Jasa Titipan adalah perusahaan swasta yang bergerak di layanan pos. Data dari Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) sampai tahun 2010 menunjukkan jumlah Perusahaan Jasa Titipan (Swasta) sebanyak 954 perusahaan sedangkan jumlah yang tidak menjadi anggota asosiasi belum terdeteksi. Perusahaan Anggota Asperindo terdiri dari tiga kompartemen yaitu: 1) Kompartemen Internasional yaitu perusahaan yang melayani pengiriman dan penerimaan barang/dokumen ke dan dari Luar Negeri, 2) Kompartemen Domestik yaitu perusahaan-perusahaan yang melayani pengiriman dan penerimaan barang/dokumen untuk seluruh wilayah Indonesia. Kompartemen Intra Kota yaitu perusahaan-perusahaan yang melayani pengiriman dalam kota/City Courier.

Salah satu contoh perusahaan yang masuk kompartemen Internasional adalah PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir

yang berkantor pusat di Jln. Tomang Raya No.11 Jakarta Barat 11440. Perusahaan ini sudah banyak melakukan kerjasama dengan penyelenggara lain dalam bentuk bentuk kerjasama adalah dalam hal Delivery Agent Agreement dan Joint Sales & Marketing Agreement. Bidang yang dikerjasamakan dalam pengantaran layanan Surat dan Paket serta Logistik. Perusahaan yang masuk kompartemen Domestik misalnya PT Prima Multi Cipta yang beralamat di Jln.Cikini I No.6 Jakarta dan PT Kerta Gaya Pusaka (KGP). Perusahaan-perusahaan ini juga sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan lain namun, lebih banyak membuka cabang sampai pada kota tertentu selebihnya ada yang sudah melakukan kerjasama dengan PT.Pos Indonesia namun dalam pengiriman saja dan tidak dilakukan dengan melakukan perjanjian kerjasama.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Urgensi dilakukannya kemitraan dalam penyelenggaraan pos disebabkan antara lain kondisi saat ini sudah masuk ke arah pasar bebas. Potensi lalu lintas barang dan jasa akan meningkat seiring perkembangan dan peningkatan perdagangan. Perubahan lingkungan dalam negeri dengan adanya pemekaran wilayah dan otonomi daerah memberi kontribusi perubahan lingkungan dan merupakan peluang berkembangnya

jasa pos. Menurut Ginanjar Kartasasmita (1996) kemitraan harus didasari hubungan antar pelaku yang bertumpu pada ikatan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan, serta saling menghidupi berdasarkan asas kesetaraan dan kebersamaan.

Model kerjasama Badan Usaha Milik Negara dan Swasta

Topology kerjasama dapat dilakukan pada setiap tahapan layanan pos, yaitu dapat pada C (*Collecting*), Pemrosesan (*Processing-P*), Transportasi (*Transporting-T*) maupun Pengantaran (*Delivery-D*). Pilihan pola kemitraan tergantung kesepakatan masing-masing penyelenggara, karena konsekuensi dari kemitraan merupakan bagian dari kemitraan. Gambar 4 menunjukkan model kemitraan BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi serta Agen Pos. Pada gambar tersebut penyelenggara lain menggunakan jaringan pos untuk *transporting* dan *delivery* sampai ke penerima kiriman.

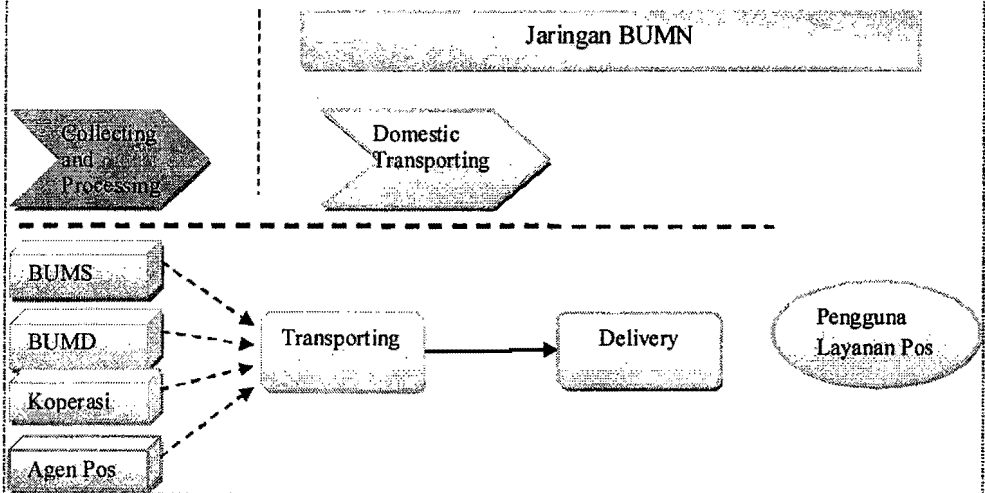
Dalam kerangka ini, Badan Usaha Milik Negara sudah mempunyai kekuatan jaringan yang tersebar sampai ke pelosok termasuk daerah non komersil. Model Kerja sama antara BUMN dan Swasta atau antara PT.Pos Indonesia dan Perjastip dapat dilakukan dengan mengedepankan keunggulan kompetitif masing-masing atau komplementer diantara perusahaan tersebut. Beberapa hal

yang perlu dicermati agar peluang untuk diberlakukannya kerjasama antara dua bentuk perusahaan tersebut dapat dilaksanakan, maka:

1. PT Pos Indonesia harus merubah paradigma, mulai sekarang merupakan perusahaan yang berorientasi bisnis atau profit.
2. Target peningkatan kualitas layanan harus dibangun berdasarkan kesamaan tujuan dan persepsi sehingga hasilnya saling menguntungkan;
3. Tarif harus ada kesepakatan.
4. Kebijakan kerjasamanya harus akuntabel;
5. Masyarakat tidak dirugikan, karena masyarakat adalah pengguna yang merasakan hasil layanannya. Masyarakat adalah pelanggan yang harus dijaga loyalitasnya dengan memberikan layanan prima.

Dengan memperhatikan hubungan kemitraan dalam Segitiga Kerjasama BUMN, BUMD, BUMS dan Koperasi pada gambar 1, dapat beberapa topologi kemitraan, namun apabila mendasarkan pada kekuatan jaringan PT.Pos Indonesia yang berjumlah 3.736 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia (gambar 2 dan 3), maka pola kemitraan dapat digambarkan sebagai berikut (gambar 4)

Gambar 4. Pola Kemitraan antar Penyelenggara Pos.



Agen Pos yang bukan penyelenggara pos, dapat merupakan counter dari penyelenggara lainnya, sehingga hanya melakukan collecting saja, processing dilanjutkan sampai ke delivery oleh penyelenggara pos lain. Keberadaan BUMD dan Koperasi merupakan ketentuan baru dalam undang-undang, sehingga saat ini belum dapat didata, apakah sudah ada badan hukum berbentuk BUMD maupun Koperasi yang sudah menyelenggarakan pos.

Keuntungan dari model ini antara lain:

1. Keuntungan pola kemitraan bagi Penyelenggara Swasta /Perjastip:

- a. Menambah jaringan.

Hal ini terutama bagi perjastip yang masuk dalam kompartemen domestik, karena sebagian besar perusahaan ini hanya memiliki jaringan di kota-kota besar dan wilayah potensial. Dengan melakukan kemitraan memungkinkan menerima permintaan dari pengguna ke seluruh wilayah.

- b. Memperluas jangkauan layanan

Kemitraan dengan memanfaatkan jaringan PT Pos Indonesia, secara langsung akan melebarkan jangkauan layanan yang semula tidak dapat dilayani.

c. Meningkatkan kuantitas layanan.

Peningkatan kuantitas sejalan dengan terbukanya kesempatan, peluang melayani jasa layanan dengan jangkauan lebih luas.

2. Keuntungan penerapan pola kemitraan bagi Penyelenggara Pos BUMN /PT.Pos Indonesia:

a. Pemanfaatan Jaringan PT.Pos Indonesia

Jaringan PT Pos Indonesia tersebar di seluruh Indonesia yang terletak di tingkat perkotaan sampai pedesaan dan daerah terpencil, dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara pos lainnya.

b. Meningkatkan kuantitas layanan pos

Kemitraan akan menambah kapasitas layanan yang terhimpun dari agen pos maupun dari penyelenggara swasta lainnya. Proses selanjutnya untuk transportasi dan delivery oleh PT Pos Indonesia, tentunya akan menambah pendapatan bagi perusahaan

Kelemahan model kemitraan antar penyelenggara pos :

1. Jenis layanan antara swasta dan PT.Pos Indonesia sampai saat ini berbeda karakteristik.

2. Pengenaan tarif swasta dan PT.Pos Indonesia tidak sama.

3. Strategi pemasaran masing-masing berbeda.

Kelemahan tersebut sebenarnya terletak pada belum adanya kesamaan pola bisnis antara PT.Pos Indonesia dan Perjastip, sehingga kemitraan dapat terlaksana dengan adanya kesepakatan bersama yang terukur.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil kajian strategi penyelenggaraan pos melalui pengembangan kemitraan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kemitraan antar penyelenggara pos dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan dari PT Pos Indonesia yang sudah memiliki jaringan di seluruh wilayah Indonesia.

2. Kemitraan dapat dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan layanan pos, sesuai dengan kepentingan masing-masing penyelenggara.

3. Strategi kemitraan dapat meningkatkan produktivitas, kuantitas masing-masing penyelenggara dan membuka peluang penyelenggaraan pos diselenggarakan oleh BUMD dan Kopersai di wilayah masing-masing.

Implikasi

Terbukanya peluang BUMD dan Koperasi diatur dalam Undang-undang No.38 tahun 2009 tentang Pos akan membuka peluang bisnis pos. Terutama dengan adanya otonomi daerah yang punya kewenangan peningkatan pendapatan daerah. Otonomi Daerah akan sangat berpengaruh tumbuh kembangnya jasa kiriman apabila BUMD dan Koperasi sudah difungsikan dalam kemitraan penyelenggaraan pos. Dengan kewenangan daerah meningkatkan perekonomian daerah dengan produk unggulan masing-masing, akan memerlukan jasa pengiriman untuk barang ataupun komunikasi bisnis dalam bentuk dokumen yang tidak dapat digantikan dengan sarana telokomunikasi. Badan Usaha Milik Daerah maupun Koperasi dapat menjadi collecting di wilayah masing-masing yang kemudian jasa pengiriman dapat dilakukan mitra. Apabila kemitraan ini dapat dilakukan, dampak positifnya diantaranya adalah:

1. Akan menggali potensi dan peningkatan produksi asli daerah.

Kesiapan BUMD dan Koperasi di daerah setempat untuk menyalurkan produk dapat menjadi pemicu semangat upaya meningkatkan produksi di daerah.

2. Membantu kelancaran distribusi yang berdampak meningkatkan perekonomian daerah.

BUMD dan Koperasi yang menjadi penyelenggara pos di wilayah masing-masing, lebih tahu keperluan dari pengguna layanan pos yang memerlukan distributor. Dengan penyelenggara yang dilindungi undang-undang akan meyakinkan masyarakat pengguna tentang keselamatan barang atau produk yang akan dikirim / didistribusikan ke wilayah lain. Mobilitas yang lancar tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat karena sirkulasi permodalan yang terus berputar. Impactnya bagi daerah tentunya penambahan income pada pajak sebagai pendapatan asli daerah.

3. Membuka peluang usaha sehingga akan menyerap tenaga kerja di wilayah setempat.

Sirkulasi produksi, perdagangan melalui transportasi yang termasuk dalam penyelenggaraan pos, menyerap tenaga kerja sebagai dampak diperlukannya tenaga kerja untuk produksi, tenaga kerja untuk pegawai koperasi dan BUMD yang menyelenggarakan pos begitu saling terkait satu sama lain.

4. Meningkatkan pendapatan daerah

Peningkatan pendapatan daerah secara otomatis akan didapat sejalan dengan peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Pendapatan didapatkan dari

retribusi yang dikenakan pada setiap usaha yang berijin, sesuai ketentuan wilayah masing-masing.

Saran.

Kesinambungan kemitraan antara penyelenggara pos yang terdiri dari PT.Pos Indonesia (BUMN), Perjastip (BUMS), BUMD dan Koperasi akan dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peluang penyelenggaraan pos oleh BUMD dan Koperasi perlu disosialisasikan. Dalam hal ini fungsi Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika lebih tepat, karena dalam struktur kelembagaan, pos merupakan bagian Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Proses penyelenggaraan pos melibatkan berbagai institusi, antara lain Kementerian Perhubungan untuk ijin trayek, Bea Cukai, Departemen Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian. Sehingga perlu dilakukan koordinasi antar kementerian, terutama berkaitan dengan kewajiban penyelenggara pos yang mempunyai konsekwensi logis.
3. Sesuai ketentuan Undang-undang no.38 tahun 2009 tentang Pos, bahwa Penyelenggaraan Pos

dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, maka perlu ada penegakan hukum bagi penyelenggara layanan pos yang tidak mempunyai ijin. Hal ini menjaga persaingan sehat dalam bisnis layanan pos.

DAFTAR PUSTAKA

- Donald R.Cooper danWilliam Emory (1996), "*Metode Penelitian Bisnis*", Jilid I, Erlangga, Jakarta.
- Eko Indrajid (1996) "*Ragam Model Bisnis Kemitraan Pemerintah-Swasta*", dalam Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia 3-4 Mei 2006 di ITB.
- Ginanjartartasmita (1996), "*Kemitraan Dalam Pembangunan Nasional*", disampaikan pada Seminar Nasional Urban and Regional Development Institute (URDI), Jakarta, 23 September 1996
- Mudrajad Kuncoro, "*Startegi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*", Erlangga melalui http://www.google.co.id/search?source=ig&hl=id&rlz=1R2ADFA_enID388&q=kunggulan+kompetitif&aq=f&aqi=&aqj=&oq=&gs_rfai=10 Maret 2010
- Philip Kotler (1994) *Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, Prentice-Hall.Ed.Indonesia

Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani (2008), "*Manajemen Pemasaran Jasa Ed.2*", Salemba Empat, Jakarta.

— — —Siaran Pers No. 186/PIH/KOMINFO/9/2009 tentang Tambahan Tingkat Pencapaian Departemen Kominfo Di Bulan Ramadhan 1430 H: Telah Disahkannya RUU Mengenai Pos Sebagai Pengganti UU No. 6 Tahun 1984 Mengenai Pos

Sugiyono (2004), "*Metode Penelitian Bisnis*", Bandung, Alfabeta

Sugiarta Yasa, "*Interkoneksi Penyelenggaraan Pos*", disampaikan

pada seminar Kajian Mandiri Puslitbang Postel, 30 Agustus 2010.

— — —Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos.

Warren J. Keegan (1996) *Manajemen Pemasaran Global*, Prenhallindo, Jakarta

BIODATA

Sri Wahyuningsih, Lahir di Kebumen, Pendidikan S2 Magister Manajemen, Jabatan sebagai Peneliti Pertama pada Puslitbang Postel

OPTIMALISASI LAYANAN TELEPON PERDESAAN

Marhum Djauhari

ABSTRACT

Information and communication technology developments that have pushed so rapidly in the strategic role of information as capital for development. To encourage the strategic role we need a strong organization as a principal / executive development providers access to communications and Information Technology, so efforts to accelerate the modernization process towards the realization of a knowledge-based society (knowledge-based-society) will be achieved. One of the support to meet these targets required to optimize the rural telephone service as a means of communication and information for rural communities, so that the information gap between urban and rural areas can be reduced. This paper uses the method of SWOT analysis is helpful to identify the factors strengths, weaknesses, opportunities and threats contained in the Public Service Board (BTIP-BLU). From the results of this paper is known that a reorganization is needed for BTIP-BLU as a regulator implementing rural telephone service providers, the level of the echelon II level III considering the scope of work is very broad covering all areas of Indonesia. From this organizational change is expected to be more optimal pelaksanaan / implementation of the rural telephone.

Keywords : Optimization, Services, Rural telephone.

ABSTRAK

Perkembangan Teknologi komunikasi dan Informatika yang demikian pesat telah mendorong peran strategis informasi sebagai modal dasar pembangunan. Untuk mendorong peran strategis tersebut diperlukan suatu organisasi yang kuat sebagai pelaku/pelaksana penyelenggara pembangunan akses komunikasi dan Informatika, sehingga upaya untuk mempercepat proses modernisasi menuju terwujudnya masyarakat berbasis ilmu pengetahuan (knowledge-based-society) akan tercapai. Salah satu penunjang untuk memenuhi sasaran tersebut diperlukan mengoptimalkan layanan telepon perdesaan sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi masyarakat perdesaan, sehingga kesenjangan informasi antara perkotaan dan perdesaan dapat diperkecil. Tulisan ini menggunakan metode analisis SWOT sangat membantu untuk menemukenali faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terdapat pada Badan Layanan Umum (BTIP-BLU). Dari hasil tulisan ini diketahui bahwa diperlukan suatu reorganisasi

bagi BTIP-BLU selaku pengatur pelaksana penyelenggara layanan telepon perdesaan, dari tingkat eselon III menjadi eselon II mengingat ruang lingkup pekerjaan yang sangat luas meliputi seluruh wilayah Indonesia. Dari perubahan organisasi ini diharapkan akan semakin optimalnya pelaksanaan/ penyelenggaraan telepon perdesaan.

Kata-kata Kunci : Optimalisasi, layanan, telepon perdesaan.

PENDAHULUAN

Era globalisasi dan liberalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi (TIK) yang berubah dengan cepat di setiap elemen masyarakat akan mendorong penciptaan sejumlah kebutuhan pada pemerintah, dunia usaha dan kehidupan masyarakat setiap hari. Hal ini membuat pengambil keputusan untuk mencari teknologi yang dapat menyediakan solusi dan mendorong perubahan yang diharapkan pada tingkat lokal, nasional dan global dengan cara-cara yang inovatif.

Indonesia menempatkan telekomunikasi dalam posisi penting dan strategis dalam berbagai aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya. Perkembangan tersebut juga telah mendorong negara-negara di dunia untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika dalam upaya mempercepat proses modernisasi menuju terwujudnya masyarakat informasi (*information society*), dan bahkan menuju terwujudnya masyarakat berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge-based society*).

Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan berperan penting dalam menjawab dan mempercepat penyelesaian permasalahan pembangunan sebagaimana disebut dalam sasaran rencana strategis yang mendukung visi dan misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014, diantaranya :

1. Meratanya pembangunan sarana dan prasarana Pos, Komunikasi dan Informatika di seluruh Indonesia;
2. Terselenggaranya layanan Pos, Komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien;
3. Tersedia dan tersebarnya informasi dan faktual dan berimbang keseluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI;
4. Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal;
5. Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi;

6. Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika;
7. Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.

Sejalan dengan sasaran strategis tersebut diatas, untuk menunjang kearah kebutuhan tersebut diperlukan *Konsep Universal Service Obligation (USO)*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Kewajiban Pelayanan Universal (KPU), pada dasarnya merujuk pada kewajiban pemerintah untuk menjamin tersedianya pelayanan publik bagi setiap warga negara.

Dari situasi dan kondisi diatas, dapat dirumuskan beberpa isu aktual antara lain :

1. Masih rendahnya pelayanan telepon pedesaan, dari total 72.000 desa yang ada di Indonesia, 31.824 desa yang belum terakses telepon.
2. Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital dan teknologi informasi dengan mereka yang terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali.
3. Kesenjangan atau kesenjangan antara mereka yang mendapat keuntungan dari teknologi dan mereka yang tidak mendapatkannya.

4. Presentasi yang memiliki telepon di Jawa Tengah masih 6,98 % di NTB bahkan masih 4,54 %, sementara di Jakarta 38,5 % dan di DIY 13,1 %.
5. Penetrasi kepemilikan PC Indonesia masih 4,4 % tertinggal jauh bahkan dengan Thailand (pada akhir tahun 2008).

Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang optimalisasi layanan Komunikasi dan Informasi Telepon Perdesaan, dalam upaya untuk pemerataan akses komunikasi dan informasi khususnya bagi daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi, baik kabel, wireless dll.

Metode Penulisan

Metode analisis penulisan ini menggunakan analisis, Strengths (kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang) dan Threats (Ancaman), dari analisis SWOT dilandasi beberapa konsepsi pemikiran sebagai berikut :

1. Dengan mengetahui keadaan medan kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan serta kelemahan diri sendiri dan ancaman, akan memenangkan perjuangan.
2. Dengan memadukan atau menciptakan interaksi antara

kekuatan dengan peluang dan meminimalkan kelemahan serta ancaman, akan memiliki keunggulan meraih sukses yang lebih besar.

GAMBARAN UMUM

Kondisi Umum

Komunikasi dan informatika merupakan salah satu modal dasar yang sangat potensial dalam mendorong bangsa tersebut untuk tetap menjadi bangsa yang dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Peran strategis komunikasi dan informatika tersebut ditunjukkan oleh kemampuan bangsa tersebut untuk mengenal kekuatan dan kelemahan dari bangsanya sendiri, kemampuan untuk melihat peluang dan ancaman dalam setiap berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, serta mampu membangun posisi tawar yang lebih baik dalam setiap perundingan. Bila dalam kondisi konflik yang dapat berakibat pada peperangan antar bangsa, maka komunikasi dan informatika dapat menjadi suatu alat untuk membangun strategi dalam memenangkan suatu peperangan. Negara Indonesia terletak pada posisi geografis yang bersifat strategis pada percaturan politik antar bangsa-bangsa Asia, Australia dan Amerika, perlu membangun suatu kapabilitas nasional yang di topang oleh sistem komunikasi dan informatika yang

lebih canggih. Backbone komunikasi dan informatika tersebut akan sangat menentukan penggunaan sumber daya nasional secara optimal dan pemilihan strategi yang tepat dalam berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain.

Sistem demokrasi yang dibentuk berdasarkan kesamaan hak atas setiap warga negara untuk menyuarakan pendapatnya dalam kerangka terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa merupakan suatu bentuk demokrasi yang sehat. Peran strategis komunikasi dan informatika dalam hal ini menyerap informasi yang berkembang di masyarakat, mengolah dan menyebarkan informasi tersebut kembali kemasyarakat dalam bentuk informasi yang faktual dan berimbang merupakan persyaratan mutlak bagi suatu bangsa untuk meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam iklim demokrasi yang sehat. Dengan majunya sistem komunikasi dan informatika masyarakat dan tingginya kemampuan masyarakat dalam menarik kesimpulan dan informasi tersebut akan mendorong partisipasi aktif masyarakat pada setiap proses demokrasi, dan pada akhirnya akan menghasilkan suatu kerangka pendapat umum untuk menentukan masa depan bangsa.

Pentingnya informasi dan komunikasi bagi setiap warganegara telah

dipahami oleh negara sebagai suatu hak yang harus diberikan kepada masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945. oleh sebab itu, maka infrastruktur komunikasi dan informatika mutlak harus dibangun oleh negara, sebagai infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan bangsanya. Di masa depan, informasi dan komunikasi tidak lagi menjadi domain negara, tetapi juga merupakan domain publik yang dapat diikuti oleh setiap anggota masyarakat. Pemberian hak untuk ikut berperan serta dalam pencarian, pengolahan dan penyebaran informasi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari anggota masyarakat suatu negara yang berdaulat, sehingga dapat tercipta suatu iklim distribusi informasi yang sehat dan mampu mendorong terciptanya masyarakat informasi yang sejahtera dan memiliki daya saing yang tinggi. Hak warga negara untuk memperoleh informasi yang sama tersebut dapat mewujudkan kebersamaan nasib sebagai suatu bangsa, dorongan untuk mewujudkan hak untuk berperan serta dalam memajukan bangsanya secara keseluruhan.

Untuk dapat dimanfaatkan, informasi harus dialirkan dari sumber-sumber informasi kepada para penggunanya dengan ketentuan memenuhi persyaratan diatas. Adanya pemasok

dan pengguna yang berbeda lokasi, berbeda kemampuan, berbeda kondisi sosio-ekonomi-budaya menyebutkan mutlak diperlukan media/kanal dan metode komunikasi yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari pengirim, pengguna dan kandungan informasi. Peran komunikasi adalah untuk menciptakan iklim memungkinkan terjadinya aliran informasi yang demokratis, yaitu mampu memberikan informasi yang netral terhadap kepentingan pihak tertentu, dan seimbang terhadap keragaman pasokan dan kebutuhan informasi.

Dalam usaha menekan ketidakpastian yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan kegiatan ekonomi, sosial, politik yang dilaksanakannya, baik sebelum maupun sesudah diterimanya informasi, maka penciptaan sistem komunikasi yang demokratis dalam suatu negara mutlak diperlukan untuk dapat memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan informasi. diperlukan peran aktif pemerintah sebagai eksekutor, regulator dalam menciptakan sistem komunikasi yang demokratis.

Sebagai eksekutor, pemerintah menyediakan ruang dan saluran yang diperlukan untuk menyampaikan informasi kepada seluruh elemen masyarakat, sedangkan sebagai regulator pemerintah juga dapat

mengharuskan pihak swasta dalam berperan melaksanakan komunikasi publik yang sesuai dengan tujuan mencerdaskan bangsa.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, masyarakat informasi Indonesia diproyeksikan terwujud pada periode jangka menengah ketiga, yaitu tahun 2015-2019. penetapan sasaran ini didasarkan pada kenyataan bahwa kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan informasi mutlak dimiliki oleh suatu bangsa tidak saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa tersebut. Akan tetapi juga untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakatnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, ketersediaan infrastruktur informasi yang memadai, baik jumlah akses, kapasitas, kualitas maupun jangkauan, merupakan persyaratan utama dan dimanfaatkan secara optimal, bukan saja sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai alat yang menghasilkan peluang ekonomi dan kesejahteraan.

Infrastruktur Akses Informasi Lemah

Disparitas ketersediaan infrastruktur antara perkotaan pedesaan, serta antara wiayah barat dan timur Indonesia masih besar. Hingga akhir tahun

2008 masih terdapat lebih dari 31 ribu desa belum memiliki fasilitas telekomunikasi dan internet, lebih dari 80% infrastruktur pos dan telematika terkonsentrasi di Jawa, Bali, dan Sumatera, serta distribusi Internet service Provider (ISP) terkonsentrasi di Jawa (64 % dari 306 ISP) dan 18% di Sumatera. selain itu terbatasnya ketersediaan dan aksesibilitas layanan pos dan telematika, kondisi lain yang dihadapi sektor ini adalah belum optimalnya tingkat pemanfaatan informasi yang diantaranya terlihat dari terbatasnya penggunaan TIK dalam kegiatan perekonomian masyarakat yang menghasilkan *real economic value* dan meningkatnya penyalahgunaan penggunaan TIK.

Dalam hal jangkauan infrastruktur hingga tahun 2008, sebagian besar jangkauan akses telekomunikasi masih terdapat di Sumatera dan Jawa, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jaringan Infrastruktur

Daerah	Wilayah USO		Coverage Jaringan Telkomsel Existing 1		Coverage Jaringan Telkomsel Existing 2	
	Jml Kec.	Jml Desa	Kec.	Desa	Kec.	Desa
Sumatera	1251	13.312	72%	68%	67%	16%
Jawa	1233	4.574	91%	91%	60%	43%
Bali, NTB, NTT	308	2.368	77%	46%	19%	0%
Kalimantan	459	3.797	55%	36%	15%	4%
Sulawesi	706	4.758	51%	27%	32%	15%
Papua	260	3.015	13%	3%	5%	0%

Sumber : Telkomsel 2008
Indikator TIK 2008, BPPT

Secara wilayah geografis Indonesia berbentuk kepulauan dan memiliki dataran tinggi maupun dataran rendah yang cukup banyak dan sulit dijangkau sehingga menyebabkan terjadi banyaknya daerah blank spot atas komunikasi. Apabila kondisi daerah blank spot dibiarkan dan tidak dditangani secara prosedural maka akan memperbesar kesenjangan akses informasi antara daerah yang sulit dijangkau dengan daerah yang tersentuh pembangunan infrastruktur bidang komunikasi dan informatika. Untuk memperkecil jumlah blank spot, perlu dilakukan upaya-upaya membangun kerjasama antara lembaga komunikasi dan informatika, dan lembaga media baik cetak maupun elektronik. Hal ini ditujukan untuk memperluas jaringan informasi di daerah blank spot termasuk pembangun infrastruktur pos dan telekomunikasi serta peyiaran. Penghapusan daerah blank spot juga dilakukan melalui pembangunan fasilitas telekomunikasi perdesaan (USO) secara bertahap yang dimulai dengan desa berdering dan desa pintar dan desa informasi.

Keterbatasan kemampuan pembiayaan pemerintah di bidang infrastruktur sangat dirasakan, sehingga diperlukan sumber pembiayaan lain dari luar pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur bidang komunikasi dan informatika. Namun demikian saat ini masih terdapat

hambatan dalam penyelenggaraan yang menyebabkan belum optimalnya upaya mobilisasi sumber pembiayaan di luar pemerintah (swasta), terutama untuk penyediaan infrastruktur dan layanan di daerah non komersial, sehingga membuat pembangunan radio investasi antar pemerintah dan swasta tidak terjadi.

Mengingat terbatasnya sumberdaya yang dimiliki, termasuk sumber pembiayaan, maka akan ditempuh langkah-langkah peningkatan efisiensi baik dalam pemanfaatan infrastruktur yang ada maupun pembangunan infrastruktur baru, seperti optimasi pemanfaatan infrastruktur secara umum yang berpotensi untuk digunakan dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika, serta pemakaian bersama suatu infrastruktur oleh beberapa penyelenggara. Ke depan pembangunan kapasitas infrastruktur akan disinergikan dengan pengembangan industri aplikasi telematika, selain itu juga akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penggunaan kandungan lokal baik dalam rangka pengeluaran biaya investasi (CAPEX) maupun dalam rangka pengeluaran biaya operasi (OPEX) dari setiap penyelenggara telekomunikasi.

Pembangunan TIK Lemah dan Layanan Informasi Kurang

Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) secara nasional

masih lemah yang antara lain ditandai dengan masih kurangnya infrastruktur, rendahnya penggunaan TIK dan tingkat melek masyarakat. Menurut *Internasional Telecommunication Union* (ITU) pembangunan TIK berindikasi tidak hanya kesiapan infrastruktur (akes terhadap informasi) tetapi juga penggunaan TIK dan beberapa besar tingkat melek TIK sumber daya manusianya. Dibandingkan dengan 154 negara-negara lain di dunia, data dari ITU pada tahun 2007 menempatkan Indonesia pada ranking 108.

Kondisi tersebut menuntut dilakukannya usaha peningkatan kualitas dan kuantitas serta kemampuan infrastruktur TIK yang makin meningkat dan terjangkau oleh masyarakat pengguna TIK. Upaya tersebut akan mampu meningkatkan kapasitas SDM dan masyarakat dalam memanfaatkan jasa akses telekomunikasi dan TIK yang secara ekonomi akan meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat.

Dalam definisi world Bank, penggunaan teknologi informasi oleh kantor-kantor pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat umum, bisnis dan untuk memfasilitasi kerjasama antara institusi pemerintah disebut dengan *e-government* memiliki posisi penting karena dengannya diharapkan dapat memberdayakan komunitas yang ada lewat akses publik ke sumber informasi yang tersedia *e-government* di

Indonesia saat ini belum merata, sumber informasi dari pemerintah belum terintegrasi dan bahkan di skala yang lebih kecil masih banyak yang belum mengenal istilah dan apa serta bagaimana *e-government*.

Berkaitan dengan peranan dimaksud, maka selanjutnya optimalisasi dari layanan telekomunikasi dan informatika diseluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu alat untuk mensejahterakan bangsa dan negara dengan utamanya adalah pemberian kemudahan akses informasi sehingga dapat terjadi percepatan pencerdasan kehidupan bangsa dan pembangunan ekonomi masyarakat serta kekuatan NKRI.

ANALISIS

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui, bahwa masih lemahnya infrastruktur akses informasi, dan pembangunan TIK serta kurangnya layanan informasi, maka perlu dilakukan analisis optimalisasi layanan telepon perdesaan. Sehingga hasil pelaksanaan pembangunan telepon perdesaan (KPU/USO) dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang memerlukan akses komunikasi.

Identifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong maupun yang menghambat pencapaian

sasaran yang diinginkan dengan menggunakan metode analisis SWOT diperlukan untuk mengetahui dan menentukan faktor internal mana yang termasuk kategori kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weakness*) serta faktor eksternal berupa peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threats*).

Identifikasi Faktor Internal

Setelah dilakukan inventarisasi terhadap faktor-faktor internal, maka dapat diidentifikasi faktor kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) sebagai berikut :

Kekuatan (Strengths)

Kekuatan yang merupakan pendorong internal, meliputi :

1. Dana PNBK Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) yang memadai

Dana PNBK Kewajiban Pelayanan Universal adalah kontribusi para penyelenggara telekomunikasi berupa pendapatan kotor tahunan dikalikan tarif besaran PNBK yaitu 1,25%. Dana PNBK dimaksud hanya diperuntukan program kewajiban pelayanan uni-

Tabel 2. Penerimaan PNBK KPU

No.	Nama Perusahaan	Proyeksi Penerimaan PNBK-KKPU/USO	
		2009 (Rp.)	2010 (Rp.)
1.	Telkom	255.163.424.081	330.247.965.714
2.	Telkomsel	452.237.491.275	585.313.165.675
3.	Indosat	200.703.102.213	259.762.116.993
4.	Exelcomindo Pratama	129.891.707.234	168.113.718.617
5.	Aplikausa Lintasarta	8.661.344.133	11.210.036.433
6.	IM2	9.912.839.419	12.829.797.469
7.	PSN	2.787.709.674	3.608.022.788
8.	Ratelindo	21.336.240.616	27.614.655.528
9.	Mobil-8		
10.	Mobikom	6.793.419	8.792.455
11.	Natrindo Telepon seluler	2.395.969.948	3.101.009.497
12.	Hutchison CP Telecommunications	3.557.311.729	4.604.088.404
13.	Sampoerna Telekomunikasi	1.631.881.545	2.112.079.984
14.	Non Big User (ITKP, TV berbayar, ISP, Calling Card, Premium Call, NAP, Radio Trunking.	18.990.292.151	24.578.386.444
	Jumlah	1.107.276.107.437	1.433.103.836.000

Sumber : BTIP

Keterangan: Tahun 2010 Proyeksi Penerimaan PNBK_KKPU/USO masih perkiraan terhadap target sebesar Rp. 1.433.103.836.000,-

versal dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika di seluruh wilayah Indonesia bagi wilayah yang belum terjangkau jaringan akses komunal telekomunikasi dan informatika, adapun informasi rinci terkait pendanaan PNPB dimaksud terlihat pada tabel 2.

2. Amanah UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan bahwa, komunikasi merupakan hak dasar masyarakat baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan. Pada pasal 16 dinyatakan bahwa, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dilaksanakan melalui kewajiban pelayanan universal.

3. Adanya visi Kementerian KOMINFO tentang; Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam NKRI.

Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan yang merupakan penghambat dari faktor internal untuk pencapaian Misi, antara lain :

1. Keterbatasan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga

Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) mengingat unit kerja BTIP-BLU hanya merupakan tingkat eselon III, sedangkan wilayah kerja yang harus dilayani dan diawasi adalah seluruh Indonesia yang terdiri dari 32 Propinsi dan 440 Kabupaten.

2. Beban kerja demikian padat

Tingginya beban kerja lembaga BTIP-BLU dapat tergambarkan dari lahirnya lembaga dimaksud pada tahun 2006, sedangkan beban kerja yang harus ditanggung adalah sebesar 31.824 desa dan ditambah dengan 5.748 kecamatan di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup 33 propinsi dan 440 kabupaten.

3. Tidak tersedianya unit kerja operaional di tingkat regional lintas propinsi

Kantor BTIP-BLU yang merupakan unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi bertempat di Jakarta dan tidak memiliki unit pembantu kerja ditingkat wilayah atau regional, sedangkan cakupan wilayah kerjanya meliputi 32 propinsi dan 4409 kabupaten.

Identifikasi Faktor Eksternal

Setelah dilakukan inventarisasi terhadap faktor-faktor eksternal, maka dapat diidentifikasi faktor peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) sebagai berikut:

Peluang (Opportunities)

1. Peluang yang merupakan pendorong dari faktor eksternal pencapaian Misi, antara lain meliputi;

Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan daerah yang begitu pesat, mendorong semakin pentingnya akses informasi, sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika tidak lagi dapat di nomor duakan, karena perubahan pola hidup masyarakat yang sudah mengalami peningkatan kualitas hidup mulai membutuhkan akses telekomunikasi dan informatika.

2. Kebutuhan masyarakat akan akses telekomunikasi dan informatika yang tinggi.

Kebutuhan masyarakat akan akses telekomunikasi dan informatika merupakan kebutuhan dasar dalam menjalani aktivitas kehidupan, hal ini terbukti dari pertumbuhan pengguna telekomunikasi sepuluh tahun yang lalu hanya baru mencapai 1 juta orang, dan pada tahun 2009 telah mencapai 143.043.785 orang. Hal ini membuktikan bahwa kebutuhan sarana dan prasarana telekomunikasi merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat ditunda.

3. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang demikian dinamis dan cepat.

Sejalan dengan pertumbuhan pengguna layanan telekomunikasi dan informatika yang demikian pesat telah diikuti dengan perkembangan teknologi informasi, hal dapat dibuktikan dari sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika yang semula berbasis kabel kini telah berkembang menjadi tanpa kabel. Dengan perkembangan ini merupakan peluang dalam mengembangkan industri telekomunikasi dengan memperluas jaringan layanan keseluruh pelosok tanah air dengan menggunakan sarana dan prasarana tanpa kabel, sehingga investasi yang dibutuhkan semakin efisien dan efektif dalam pembangunannya.

Ancaman (Threats)

Ancaman yang merupakan penghambat dari faktor eksternal untuk pencapaian misi, antara lain ;

1. Faktor Geografis dan topografis tanah air yang beragam dan sulit terjangkau.

Luasnya jangkauan wilayah pelayanan universal telekomunikasi mengakibatkan penyediaan jaringan telekomunikasi memerlukan persiapan yang sangat akurat baik dari aspek teknologi, biaya dan SDMnya, hal ini dikarenakan oleh topografi dan faktor geografis yang sangat beragam dan dengan

tingkat kesulitan yang cukup tinggi dan sebagian besar terletak di daerah pedalaman dan terpencil dengan jumlah desa yang menjadi program KPU/USO sebesar 31.824 desa dan ditambah dengan 5.748 kecamatan dan wilayah koordinasi untuk hampir seluruh kabupaten di Indonesia.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika di daerah non ekonomis.

Perubahan paradigma industri telekomunikasi yang semula semakin giat di dalam mempeluas jaringan telekomunikasi ke wilayah-wilayah baru semakin tidak tercapai secara optimal, mengingat penyelenggara telekomunikasi hanya mengembangkan jaringan layanan telekomunikasi dan informatika pada wilayah yang secara ekonomis menguntungkan dan cepat dalam pengembalian modal. Sedangkan bagi daerah yang non ekonomis belum menjadi perhatian para penyelenggara telekomunikasi, sehingga masih terdapat daerah-daerah belum terjangkau oleh layanan telekomunikasi dan informatika sebanyak 31.000 desa di Indonesia yang tersebar di 32 propinsi dan 440 kabupaten.

3. Kebutuhan akan teknologi informasi yang berbeda untuk topografi yang beragam.

Geografis dan topografi yang beragam dan memiliki tingkat kesulitan yang

tinggi memberikan konsekuensi terhadap pilihan teknologi informasi yang akan digunakan. Hal ini menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika memerlukan pertimbangan dan perhitungan terhadap penggunaan teknologi yang akan digunakan, karena ketersediaan jaringan utama telekomunikasi sangat terbatas dan pemenuhan kualitas layanan yang harus di jaga agar dapat dimanfaatkan layanan tersebut secara optimal.

A. Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal

Urgensi faktor internal bertujuan untuk membandingkan seluruh unsur yang ada pada faktor internal dan faktor eksternal sehingga diperoleh bobot faktor dengan formula sebagai berikut :

$$BF = \frac{NU \times 100 \%}{\Sigma NU}$$

Penilaian terhadap urgensi faktor internal dan eksternal dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Untuk dapat menetapkan suatu keberhasilan misi sebagai suatu faktor strategi dan faktor keberhasilan, terlebih dahulu perlu dilakukan penilaian terhadap setiap faktor yang teridentifikasi dan suatu faktor tersebut strategis apabila didalamnya terkandung nilai lebih dari faktor lainnya.

Tabel 3. Identifikasi Faktor Internal Dan Eksternal

No.	Faktor Internal		
	Kekuatan (S)		Kelemahan (W)
S1	Dana PNBK Kontribusi Kewajiban Universal (KPU) memadai	W1	Keterbatasan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga
S2	Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi	W2	Tidak sebandingnya antara umur lembaga dengan beban kerja nasional
S3	Ada visi Kementerian Kominfo	W3	Tidak tersedianya unit kerja operasional di tingkat regional lintas propinsi.
No	Faktor Eksternal		
	Peluang (O)		Ancaman (T)
O1	Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah yang sangat pesat.	T1	Geografis dan topografi tanah air yang beragam dan sulit di jangkau
O2	Kebutuhan masyarakat akan akses telekomunikasi dan informatika yang tinggi	T2	Keterbatasan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika
O3	Perkembangan teknologi informasi yang begitu dinamis dan cepat	T3	Kebutuhan akan teknologi informasi yang berbeda untuk topografi yang beragam

Tabel 4. Urgensi Faktor Internal

No	Faktor Internal	Faktor Yang Lebih Urgen							NU	Bobot (BF)
		a	b	c	d	e	f			
1	Kekuatan (Strength)									
a	Dana PNBK Kontribusi Kewajiban Universal (KPU) memadai	x	a	a	d	a	a	4	26,66%	
b	Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi	a	x	b	d	b	b	3	20%	
c	Adanya visi kementerian Kominfo	a	b	x	d	c	f	1	6,66%	
2	Kelemahan (Weaknesses)									
d	Keterbatasan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga	d	d	d	x	d	f	4	26,66%	
e	Tidak sebandingnya antara umur lembaga dengan beban kerja nasional	a	b	c	d	x	e	1	6,66%	
f	Tidak tersedianya unit kerja operasional di tingkat regional lintas propinsi	a	b	f	f	e	x	2	13,33%	
Jumlah								15	100 %	

Tabel 5. Urgensi Faktor Eksternal

No	Faktor Eksternal	Faktor Yang Lebih Urgen							Bobot (BF)
		A	B	C	D	E	F	Nu	
1	Peluang (Opportunities)								
A	Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan daerah yang sangat pesat	x	a	a	d	a	a	4	26,66%
B	Kebutuhan masyarakat akan akses telekomunikasi dan informasi yang tinggi	a	x	b	d	e	b	2	13,33%
C	Perkembangan teknologi informasi yang demikian dinamis dan cepat	a	b	X	d	e	c	1	6,66%
2	Ancaman (Threats)								
D	Geografis dan topografi	d	d	d	x	e	f	3	20%
E	Keterbatasan sarana dan prasarana telekomunikasi di daerah non ekonomis	a	e	e	e	x	f	3	20%
F	Kebutuhan akan teknologi informasi yang berbeda untuk topografi yang beragam.	a	b	c	f	f	x	2	13,33 %
Jumlah								15	100 %

Faktor yang memiliki nilai dukungan yang tinggi dan nilai keterkaitan yang tinggi terhadap berbagai keberhasilan yang telah dicapai organisasi pada saat sekarang dan untuk masa yang akan datang dianggap sebagai faktor strategis dan disebut sebagai faktor keberhasilan. Adapun penilaian terhadap aspek-aspek dari setiap faktor adalah sebagai berikut :

1. Angka 5: Sangat tinggi nilai urgensi/ nilai dukungan/ nilai keterkaitan.
2. Angka 4: Tinggi nilai urgensi/ nilai dukungan/ nilai keterkaitan.
3. Angka 3: Cukup tinggi nilai urgensi/ nilai dukungan/ nilai keterkaitan.
4. Angka 2: Kurang nilai urgensi/ nilai dukungan/ nilai keterkaitan.
5. Angka 1: Sangat kurang nilai urgensi/ nilai dukungan/ nilai keterkaitan.

Untuk penilaian terhadap faktor internal dan eksternal dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penilaian faktor internal, meliputi NU, BF, ND, NBK, NK, NRK, TNB, yaitu dengan :
 - a. Cara menentukan Nilai Urgensi (NU), yaitu Nilai Urgensi tiap faktor ditentukan oleh suatu tim, NU adalah hasil rata-rata suatu tim dengan menggunakan rating skala 1 - 5.
 - b. Cara menentukan Bobot Faktor (BF), yaitu dengan menggunakan rumus:

$$BF = \frac{NU \times 100 \%}{\sum NU}$$

- c. Cara menentukan Nilai Dukung (ND) adalah sama dengan cara penentuan Nilai Urgen (NU).

- d. Cara menentukan Nilai Bobot Dukungan (NBD) ditentukan dengan rumus : $ND \times BF$
- e. Cara menentukan Nilai Keterkaitan (NK); kalau ada keterkaitan antar faktor internal dan eksternal dalam misi organisasi dengan menggunakan skala 1-5 seperti menentukan Nilai Urgensi (NU).
- f. Cara menentukan Nilai Rata-Rata Keterkaitan (NRK) dengan menggunakan rumus :
- $$NRK = \frac{TNK}{\Sigma N-1}$$
- g. Cara menentukan Nilai Bobot Keterkaitan (NBK) dengan menggunakan rumus : $NRK \times BF = NBK$
- h. Cara menentukan Nilai Total Nilai Bobot (TNB) dengan menggunakan rumus : $NBD + NBK$

2. Untuk penilaian terhadap faktor eksternal, caranya sama dengan cara yang digunakan dalam penilaian faktor internal.

Hasil penilaian faktor internal dan eksternal dapat digunakan sebagai acuan atau dasar pengambilan serangkaian keputusan yakni penentuan atas pemilihan faktor kunci keberhasilan, peta posisi kekuatan organisasi.

Penentuan FKK dilakukan berdasarkan besarnya TNB tiap faktor

dipilih faktor yang memiliki TNB paling besar sebagai FKK organisasi dalam mencapai misi. FKK ini merupakan faktor-faktor strategis. Dari setiap kategori *strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*, masing-masing dipilih 2 FKK berdasarkan urutan TNB. Evaluasi faktor internal dan eksternal dilakukan dengan menggunakan metoda skala seperti yang diuraikan di atas didapat hasil seperti terlihat pada Tabel 6.

Faktor Kunci Keberhasilan dan Peta Posisi Kekuatan Organisasi

Penentuan Faktor Kunci Keberhasilan

Sesuai dengan kriteria diatas dan berdasarkan hasil evaluasi faktor-faktor internal dan eksternal, maka faktor kunci keberhasilan optimalisasi layanan telepon pedesaan, sebagaimana terdapat pada Tabel 7.

Peta Posisi Kekuatan Kekeuatan Organisasi BTIP

Berdasarkan total nilai bobot (TNB) Kekuatan yakni 3,65, Kelemahan 3,02, Peluang 2,89 dan Ancaman 3,01 maka dapat dipetakan posisi kekuatan organisasi Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan-Badan Layanan Umum (BTIP-BLU).

Berdasarkan peta kekuatan, menunjukkan bahwa posisi kekuatan organisasi Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan-Badan Layanan Umum (BTIP-BLU).

TABEL 6 . EVALUASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

NO	FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL	NU	BF (%)	ND	NBD	NK												NRK	NBK	TNB	FKK
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	INTERNAL KEKUATAN (STRENGTHS) Dana PNPB kontribusi Kewajiban Universal (KPU) memadai	4	27	4	1,07	x	4	5	3	5	4	5	4	4	4	4	4	4,2	1,11	2,18	11
2	Undang-Undang No. 36 tahun 1999	3	20	3	0,60	4	x	4	2	3	3	3	3	2	4	2	3	3	0,6	1,20	11
3	Adanya Visi Kementerian Kominfo	1	7	1	0,07	5	4	x	2	4	2	3	3	3	2	2	3	3	0,2		
4	KELEMAHAN (WEAKNESSES) Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM Lemabaga	4	27	4	1,07	3	2	2	x	5	4	4	4	4	4	4	4	3,6	0,97	2,04	1
5	Tidak sebandingnya umur leembaga dengan beban kerja nasional	1	7	1	0,07	5	3	4	5	x	3	3	3	2	3	2	2	3,2	0,21	0,28	
6	Tidak tersedianya unit kerja operasional di tingkat daerah	2	13	2	0,27	4	3	2	4	3	x	3	4	4	3	2	4	3,3	0,44	0,7	11
		15																		3,02	
EKSTERNAL																					
7	PELUANG (OPPORTUNITIES) Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan daerah yang sangat pesat	4	27	4	1,07	5	3	3	4	3	3	x	3	3	3	3	3	3,3	0,87	1,94	1
8	Kebutuhan masyarakat akan akses telekomunikasi dan informatika yang tinggi	2	13	2	0,27	4	3	3	4	3	3	4	x	3	3	2	3	3,2	0,42	0,69	
9	Perkembangan teknologi informasi yang begitu dinamis dan cepat	1	7	1	0,07	4	2	3	4	2	4	3	3	x	2	2	3	2,9	0,19	0,26	11
																				2,89	
ANCAMAN (THREATS)																					
10	Geografis dan topografis	3	20	3	0,6	4	4	2	4	3	3	3	3	2	x	3	3	3,1	0,62	1,22	1
11	Keterbatasan sarana dan prasarana di daerah non ekonomis	3	20	3	0,6	4	2	2	4	2	2	3	2	2	3	x	3	2,6	0,53	1,13	11
12	Kebutuhan akan teknologi informasi yang berbeda unt. Topografi yang beragam.	2	13	2	0,27	4	3	3	4	2	2	3	3	3	3	3	x	3	0,4	0,67	
		15																		3,01	

Tabel 7. Faktor-Faktor kunci keberhasilan

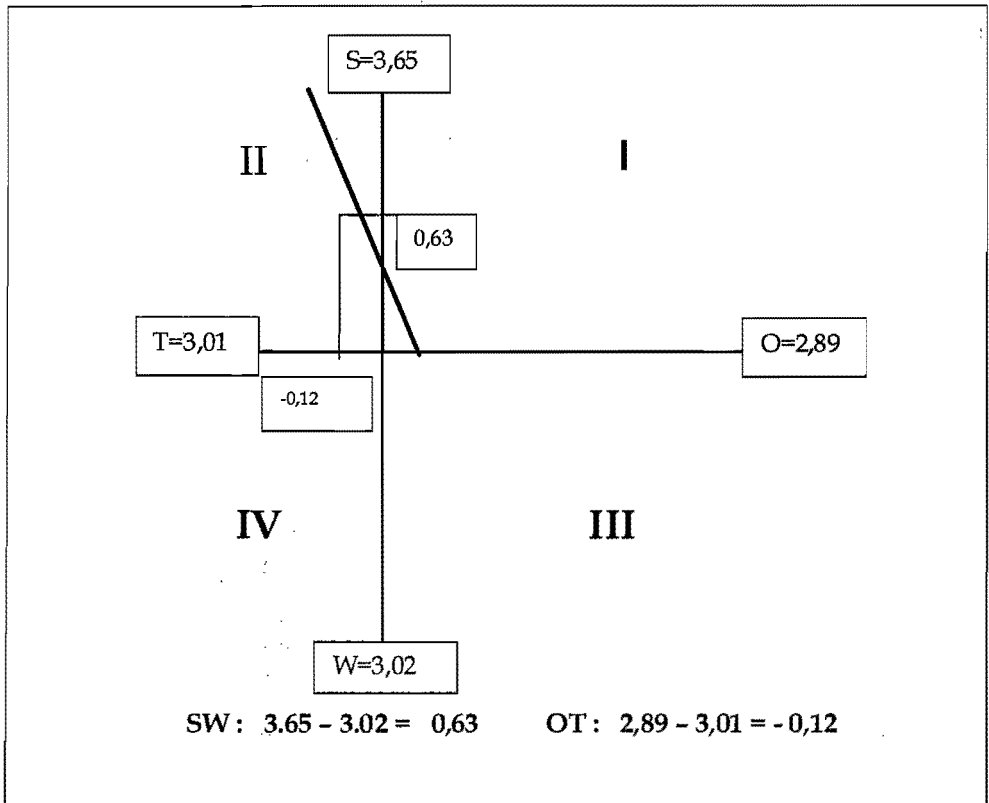
No.	Faktor Internal		
	Kekuatan (S)		Kelemahan (W)
S1	Adanya amanah Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) berdasarkan Undang-undang 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi	W1	Keterbatasan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga
S2	Dana PNPB Kontribusi Keawajiban Universal (KPU) memadai	W2	Tidak tersedianya unit kerja operaional di tingkat regional lintas provinsi
No.	Faktor Eksternal		
	Peluang (O)		Ancaman (T)
O1	Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah yang sangat pesat.	T1	Geografis dan topografi tanah air yang beragam dan sulit di jangkau
O2	Kebutuhan masyarakat akan akses telekomunikasi dan informatika yang tinggi	T2	Keterbatasan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika

Terletak pada Kuadran II (ST) untuk mengoptimalkan pelayanan USO/KPU diperlukan reorganisasi BTIP-BLU ke jenjang yang lebih tinggi mengingat lingkup pekerjaan yang demikian tinggi. Dengan berada dalam Kuadran II, berarti organisasi ini tidak dalam kondisi ideal, dan perlu penanganan secara lebih serius dalam penyusunan rencana kerja agar dapat mencapai misi yang telah ditetapkan.

Faktor kunci keberhasilan dan peta posisi kekuatan suatu organisasi merupakan gambaran yang menunjukkan kemampuan organisasi

tersebut, faktor kunci keberhasilan diperoleh dari hasil evaluasi faktor internal dan eksternal yang mendapatkan ranking I dan ranking II untuk masing-masing faktor, baik internal maupun eksternal. Penentuan FKK dilakukan berdasarkan besarnya TNB tiap faktor dipilih faktor yang memiliki TNB paling besar sebagai FKK organisasi dalam mencapai misi. FKK ini merupakan faktor-faktor strategis. Dari setiap kategori kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, masing-masing dipilih 2 (dua) FKK.

Gambar 1 : Peta Posisi Kekuatan Organisasi



PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan isu aktual dan analisis SWOT, dalam rangka optimalisasi layanan telepon perdesaan, dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Posisi kekuatan organisasi BTIP-BLU terletak pada KUADRAN II (ST) yang mengandung arti bahwa organisasi ini perlu melakukan reorganiasi untuk mendukung

optimalisasi pelayanan telepon perdesaan.

2. Kekuatan Kunci organisasi BTIP-BLU adalah adanya dana PNBK Kontribusi Kewajiban Universal yang memadai, adanya dukungan dari undang-undang No.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi
3. Ancaman Kunci organisasi ini adalah keterbatasan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika serta letak geografis

dan tofografi beragam dan sulit di jangkau.

Saran

1. Dalam rangka untuk mengoptimalkan pelayanan telepon perdesaan serta mempercepat pemerataan penyediaan akses dan layanan telematika diperlukan suatu organisasi yang kuat, mengingat wilayah indonseia yang demikian luas, dari 32 Propinsi dan 440 Kabupaten.

Oleh karena itu diperlukan peningkatan status dari eselon III menjadi Eselon II.

2. Dalam rangka Koordinasi, pengawasan pelaksanaan program telepon perdesaan serta kesinambungan penyelenggaraan telepon perdesaan diperlukan suatu unit kerja operasional di tingkat regional lintas propinsi.
3. Diperlukan keseimbangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menopang beban kerja. Sehingga program yang telah direncanakan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Lembaga Administrasi Negara, 2008, Isu Aktual Sesuai Tema, Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, Jakarta

Lembaga Administrasi Negara, 2008, Kertas Kerja Perseorangan, Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, Jakarta

Lembaga Administrasi Negara, 2008, Teknik-Teknik Analisis Manajemen, Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, Jakarta

Lembaga Administrasi Negara, 2008, Teknologi Informasi Dalam Pemerintahan, Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, Jakarta

William N. Dunn, 1999, Gajah Mada Univerity Press, Analisis Kebijakan Publik, Jogyakarta, Gajah Mada Univerity Press.

BIODATA

Marhum Djauhari, Lahir di Jakarta, 15 Juli 1960, Jabatan Peneliti Muda Pada Puslitbang Postel.

THE INNOVATIVE CIO : A NEW ERA OF CIO IN SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF ICT STRATEGIC PLANNING1

Yudhistira Nugraha and Cahyana Ahmadjayadi

yudhistiran@depkominfo.go.id, cahyana@depkominfo.go.id

ABSTRAK

Tujuan kajian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor terciptanya iklim yang inovatif dalam sebuah organisasi dalam membentuk CIO yang inovatif. Faktor iklim kerja dan budaya organisasi merupakan faktor yang penting dalam membentuk CIO yang inovatif. Dari beberapa literatur yang digunakan oleh studi ini, ada tiga unsur dalam membangun karakter CIO yang inovatif: memiliki "visi" jelas, memiliki dukungan, dan jaringan. Selain itu, untuk mendukung tiga unsur tersebut, CIO yang inovatif juga harus memiliki sikap dan perilaku dasar yaitu komitmen, konsistensi dan keahlian baik itu soft skills dan hard skills. Dengan memiliki kompetensi tersebut, CIO mampu memainkan peran penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang strategis serta mengedepankan inovasi. Dengan demikian, peran CIO mampu memberikan kontribusi positif dan nilai tambah untuk setiap organisasi yang bergerak dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kata-kata kunci : CIO, Inovasi, Organisasi TIK, kepemimpinan, iklim kerja

ABSTRACT

The objective of this paper is to identify elements of creation of innovative climate in an organisation that address the issues about how CIOs can be innovative. It is important that climate and culture need to be considered in building the Innovative CIO. Based on literatures that have been used in this study, there are three elements in the creation of innovative CIO: clear "visioning", support, and networking. In addition to this, in order to support the three elements, CIOs also need to have basic behaviours such as commitment, consistency and expertise both of 'soft' skills and 'hard' skills. By doing this, CIO plays important roles in leading innovation and strategic planning and decision. Thus, CIOs can make positive contributions as well as deliver added value to the ICT (Information Communication Technology) organizations.

Keywords: CIO, Innovative, ICT Organisation, leadership, climates

INTRODUCTION

Information Communication and Technology (ICT) is an important aspect for driving innovation in Information societies. This is because ICT can contribute to achieve a universal education through training and certification in the field of ICT. Therefore, capacity building and ICT literacy is important in which CIOs should have the necessary skills to benefits fully from the information society. In addition to this, ICT also plays an important role in supporting, enabling and transforming business process in the organisation. In the context of public sector and private sector, the ICT organisation needs change, transformation and innovation because the world is changing rapidly in which technologies are now driving business opportunities more than just process changes.

This paper describes innovative CIOs in terms of how can a CIO can be innovative in the ICT organisation? In fact CIOs play central roles in leading innovation efforts in an organisation. The role of the CIO has risen greatly as ICT has become a more main part of business. In some ICT organizations, the CIO may be a member of the executive board of the organization. In general, no specific qualification is typical of CIO. In the past, many have expertise in technical background, but this is not universal. Increasingly CIO, especially those from a technical background, CIOs also have expertise in

business background. More recently CIOs' leadership capabilities, business expertise and strategic perspectives have taken priority over technical skills. It is now quite common for CIO to be appointed from the business side of the organization.

In fact, it seems that the role of CIO refers to integration of information, intelligence, investment and innovation (Obi, 2007). Thus, in order to become a new CIO, the paper identifies three elements that can deal with the creation of innovative CIO in an organisation namely clear visioning, support and networking (Watts & Handerson, 2006). It can be seen that it is important for organisation to help advanced the CIO profession by giving a greater understanding to the creation of an innovative climate in an organisation as a proactive CIO is a key point to building innovative solution for business operation

The paper is presented in four sections. The first analyses the literature related to the role of the CIO. This review provides roles and responsibilities of the CIO for the purposes of this paper with elements for the creation of innovative CIO. The paper then describes moves by describing element of innovative CIO associated with importance of having clear visioning. The paper then presents a description supporting, and networking respectively. The paper concludes with a discussion of the issues that the paper identifies.

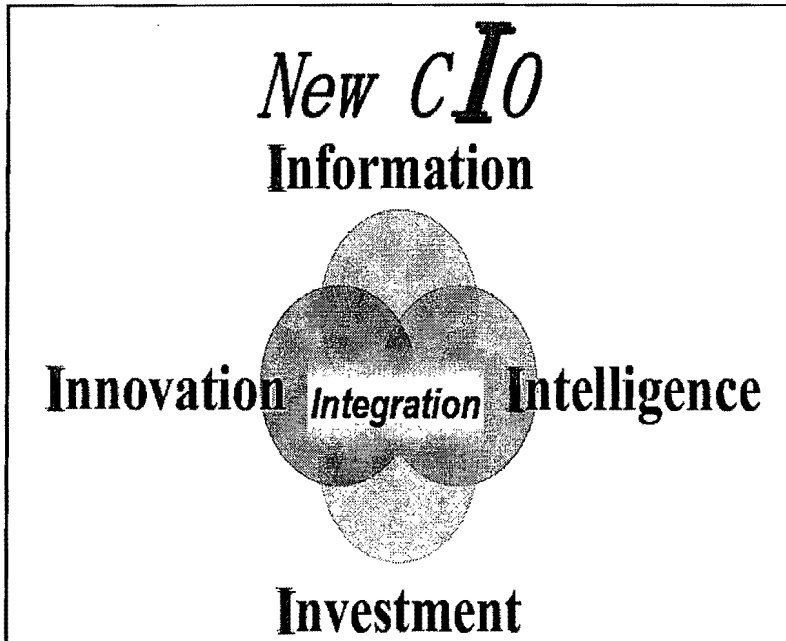


Figure 1: The role of new CIO (Obi, 2007)

THE ROLE OF THE CIO

The role of CIO has changed over time as the main architecture of Information Communication Technology has changed. The role of the CIO has involved in regards to the associated changes in management attitudes toward IT as a whole. Why is important to focus on the role of the CIO plays in today's organisation? This is because CIOs today are under unusual pressure to carry out quickly. Indeed, the impact of IT on today's organisation requires the CIO to deliver effectively and rapidly on the promise IT makes to business. It can be seen that the CIO must be creative, innovative, technical skills, customer /

people-oriented, with excellent business skills

The role of the Chief Information Officer (CIO) is in the middle transformation to shape the business solution for the organizations as well as the technology solutions used to manage and govern the business process. In this unpredictable environment, CIO is facing many challenges: "being agile and responsive, reducing resource requirements for operations and growth, providing the best service to support the organisation goals, reducing the operating cost structure of the IT enterprise, achieving scale operations in the enterprise, enhancing performance of people products and ser-

vices, improving transparency, enhancing reporting chains and benefit realization, and balancing the competing demands of many stakeholders” (Cherinka, Miller and Prezzama, 2009).

In terms of the role of CIO the question is that what the differences between private institutions and government agencies are. In fact, there are perceptions of persisting difference between CIO dynamics in private vs. public sector. For example, as shown table 1, it can be seen that ecosystems in private institutions more supportive of the development of Innovative CIO compared with the existing ecosystem in government institutions. It is challenge for government institutions to advance in implementing information technology efficiently within the organization.

Table 1: CIO- Private vs Public

S.N	Characteristics	Private Sector	Public Sector
1	Control	Shareholders	Voters
2	Orientation	Result-Oriented	Procedure-oriented
3	Clientele	Customer	Citizens and Non-citizens
4	Motivation	Profit	Service
5	Working Environment	Competitive	Monopoly
6	Risk-taking Behavior	Risk-taking	Risk-averse

Source: D.C Misra 2009, Government CIO

With rapid technological developments, the use of information and communication technologies (ICT) has great impact both of government in-

stitutions and private institutions. The emergence of new technologies promotes an organization to consider changes quickly and efficiently to the business. This is because the change is equally significant for performance and the development of innovative climate. In fact that however CIO’s ability in leading organizations concerned with the governance of ICT is still left behind by the ability of the transformative power of technology. In line with this, it has been argued that today and the foreseeable future that will become the most powerful driver of change is technology, especially Information and Communication Technology (ICT) that is expected to bring a positive influence to drive innovation within the organisations in particular for supporting the development of ICT strategic planning.

Looking at the perspective of the role of CIO, it has argued that CIOs have failed to give added value to their organizations and have become obsolete (Ross & Weill, 2002). However, others authors argue that the role of the CIO has evolved into one responsible for providing the IT infrastructure and capabilities in order to ensure effective business operations (Leidner & Mackay, 2007). It can be seen that the role of CIO has become more strategic as well as the CIO profession have evolved greatly enough to deal with the pace of global competition and technological change especially in en-

couraging changes in business processes through the use of IT.

In line with this, Polansky, Inuganti and Wiggins (2004) presented a 10 Point Leadership Agenda for CIOs that they believe are reflective of the commonly shared insights, concerns and expectations of CIOs: IT strategy; IT governance; IT organisation and staffing; Technology and architecture; Technology awareness; Corporate governance; Business intelligence; Business transformation; Customer care; Internet and e-business (Polansky et al., 2004 p. 30-1). Thus, according to Chun and Mooney (2009) that the role of CIOs are *"(1) ability to contribute to corporate strategy; (2) competence in business process innovation and design and the ability to anticipate business needs; (3) expertise in managing and demonstrating IT costs and their impact; (4) effectiveness in publicizing and raising IT's profile and position within the company; and (5) strong communication, negotiation, and facilitation skills."*

Furthermore, Lawry & Waddell (2008) discussed nine future expectations for CIO that had been summarised from Polansky et al. (2004) as : *"Responsibilities will continue to shift from technical/operational to a strategic/management focus; The CIOs success will be redefined to encompass strategic, enterprise-wide business goals and objectives; The focus of the CIO and the mission of IT will be redirected away from internal customers, and*

focused more towards external customers, partners, service providers and other links in the extended value chain; Human capital management will become a key CIO responsibility; CIO responsibilities will include IT portfolio management, IT investment management and risk assessment; Business continuity and disaster recovery will continue to be seen as primary CIO responsibilities; Actionable business intelligence will become a standard deliverable from IT; Increasing importance on Governance will require the CIO to develop a deeper understanding and intuitive grasp of corporate finance and accounting processes; CIOs will assume a greater leadership role with a focus on shaping and creating a world economy fuelled by information" (Polansky et al., 2004). It seems that the role of the CIO has evolved greatly in which the role and responsibilities of CIO becomes important and strategic role in supporting organizational goals.

In summary, the changing role of the CIO has occurred from function as the Head of IT becomes transformational leader and business strategist as shown at figure 2. In line with this, the CIO as decision-maker of ICT development can play a strategic role of integration between business strategies and information technology (IT) strategies. Until now, CIO paid attention to develop IT strategy alone and has poor experience about IT strategies

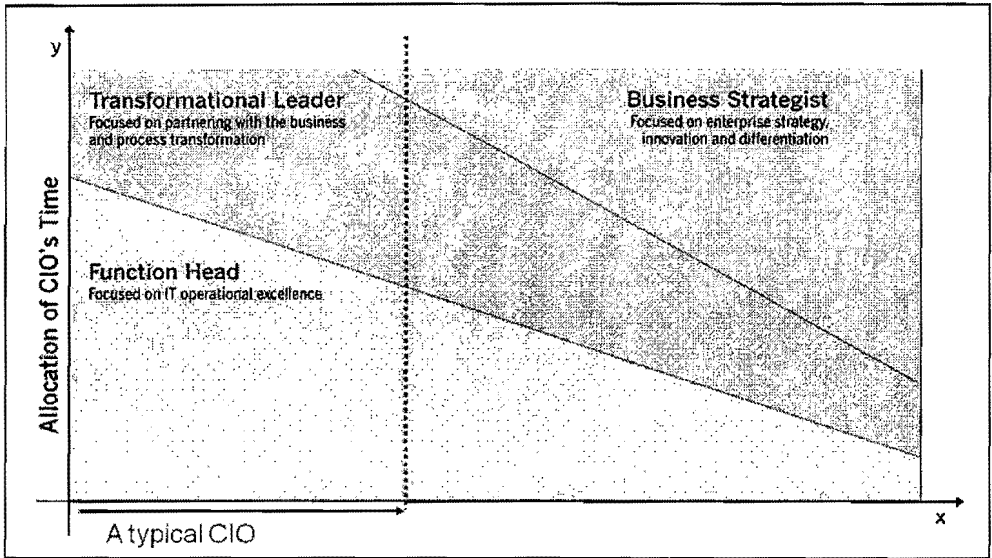


Figure 2: The Role of CIO

that associated with business strategies. Indeed, the evolution to more strategic role is apparently important for CIOs by innovative use of technology. Thus, CIOs must integrate well with information, intelligence, investment and innovation as mentioned above. Moreover, it is important to understand business needs in order to able to align between IT strategy and business strategy.

THE ELEMENTS OF THE INNOVATIVE CIO

Innovation is now part of the role of CIO. In general, CIO should be driving innovation on the wheels of IT in particular to manage IT enabled business innovation. The key point is to build innovative IT solutions for busi-

ness innovation as well as to build IT management framework that defines a new profile for an innovative CIO profession.

The aim of this paper is to provide a clearer understanding of the way that government institutions and private institutions adapt to changes in organisation structure in creating a innovative CIO. In order to address the issues is that how a CIO can be innovative, three elements for CIO to be innovative are identified namely a clear "Visioning", Support, and Networking.

Firstly, innovation is necessities and must be supported with the clear visions of a leader. Unclear 'visioning' will negatively affect or even inhibit the climate of innovation development

within an ICT organization. Hence, a strong commitment can give positive contribution in delivering the successful vision (Watt & Henderson, 2006). According to Boynton et al. (1994) that a leader must define a clear mission and provide emphasis on future plans to support the mission. Indeed, enlisting them in their objectives will greatly assist in building innovative climate. By doing this, CIO gain a more strategic role by promoting a vision as well as developing long-terms objectives and strategies can translate vision into realistic goals. It seems that through

clear tasks and functions, CIOs can motivate and collaborate with their peers and subordinates to achieve their vision and mission in the context of the other role of CIO as a Chief Vision Officer (CVO). Thus, collaboration and cooperation in order to achieve the goals is an indicator of the growing influence of innovative climate in an IT organization. In particular, the successful performance for CIO is to promote collaboration between IT and business in the context of contributing to strategic planning and strategic decisions.

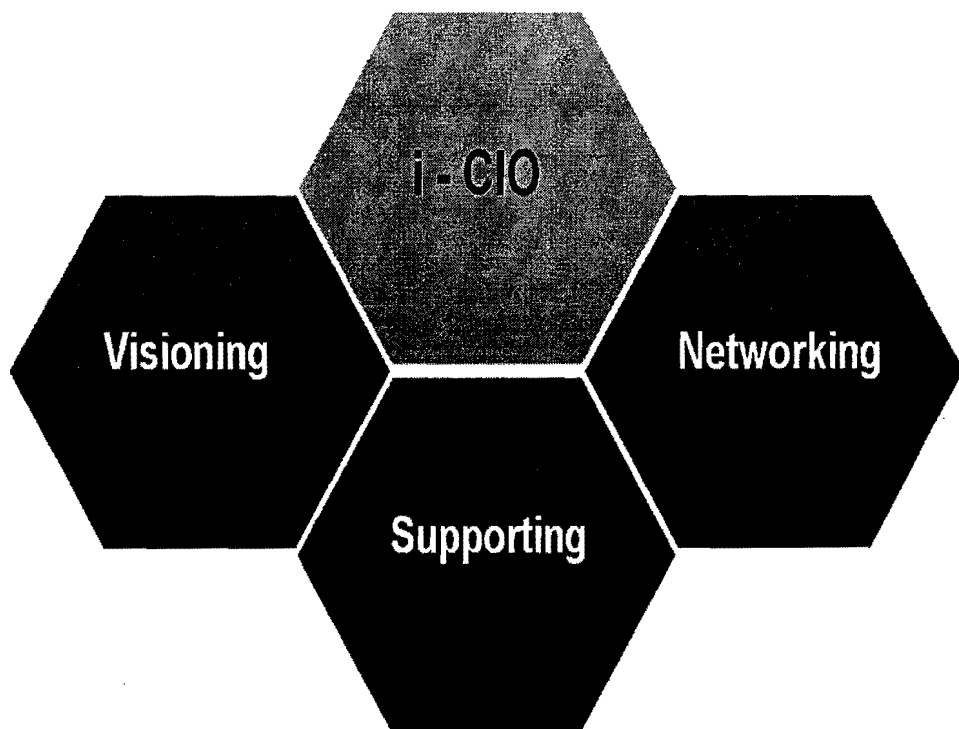


Figure 3: Three components of -CIO

Secondly, support from top management is needed in sustaining all business activities. This is because a leader will determine the building of a working environment that encourages an innovative climate within the ICT organisation. Thus, consistency is important to the leadership role of innovative climate (Watt & Henderson, 2006). According to Litwin and Stringer (1968 cited in Watts & Henderson, 2006), different leadership has different style in managing the business operation. Having said this, indeed, within an organisation, the role of CIO is to foster a well-planned and sustainable innovation in term of IT and business strategy. In other words, CIO creates an innovative climate in which they encourage and engage subordinates to participate in a comfortable, free and open manner (Aderson & West, 1998). In addition to this, CIOs are obligated to support their subordinates in a way that gives them motivation to excel (Watt & Henderson, 2006). It is clear that, the full support from top management will be able to create a conducive workplace in supporting innovative CIO. Thus, it is very important to provide clear duties and responsibilities to the CIO in carrying out their duties in an organization.

Lastly, networking plays an important role in supporting business success and business operations. Networking

“as a means to establish an extended web of relationships is a critical CIO skill (Applegate et al., 1992 cited in Watts & Henderson, 2006). Building effective relationship and networking with internal and external peers and other executives is an essential today for any CIO (Smith, 2006, p. 86). Thus, it is important for CIOs to understand the business as well as to have expertise both of soft skills and hard skills in order to support strategic decision and business operations (Watt & Henderson, 2006). In fact, even though it is not easy to convince peers that IT is a great factor in playing important role in the organisation, it is important for CIOs to communicate about IT implementation with their peers in order to align between IT strategy and business strategy. Thus, building relationships and networking is a necessity that must be conducted in supporting business activities.

In addition to this, the key success factor in addressing the technological development is innovation. In fact that innovation is required as an effort to become an integral part of global competition. In other words, it would be much better for development of ICT standard to be market-driven rather than government imposed (Parlade, 2010). For example, most of the commonly adopted ICT standards in existence today have been developed through been developed through vol-

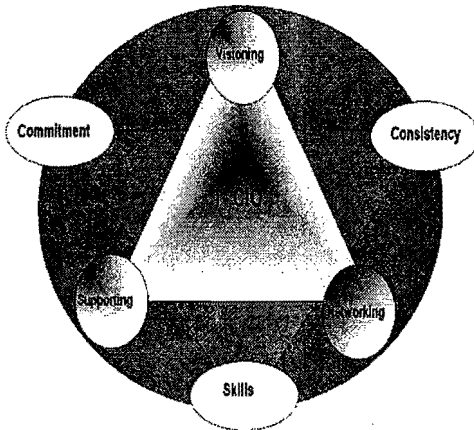


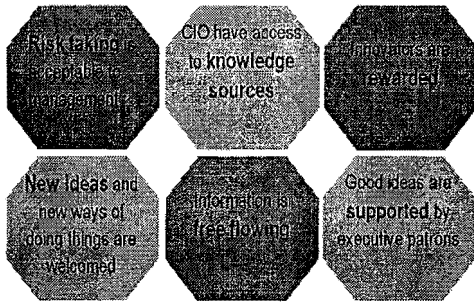
Figure 4: i-CIO Ecosystem

untary, supplier, open source etc. It is clear that it is important to deal with competing innovative responses to market demands ultimately give rise to reorganization of ICT standard because of innovation, value and customer choice.

Thus, innovative culture for CIOs is imperative in order to deal with the rapid technological developments. In terms of leadership - Chief Information Officer (CIO) is required to take whole governments and industries business process into new ways of working based on transparency, collaboration, and sharing value through innovative climate. Thus, it is becoming essential for governments and industries to work closely with their stakeholders on strategic plan and initiatives in order to help raising awareness of the use of IT as well as to promote CIO closer to the business side.

In conclusion, these elements have provided an outline of important aspects that influence the creation of creative and innovative CIO in an organisation. This is because without a clear mission, support from top management, relationship with subordinates and peers indeed it is difficult to create an innovative climate in the era of development of technology. In addition to this, in order to support the three elements, a CIOs need to have basic behaviour such as manifesting commitment, exhibiting consistency and having expertise both of soft skills and hard skills. In particular, risk taking behavior, having access to the knowledge sources, giving rewards, doing things with new ideas, free flow of information and management support are important elements of ecosystem for Innovative CIO development in supporting ICT Strategic Planning.

It is important that CIO should be an expert both information technology and information system management. New skills such as security, IPR compliance, knowledge management, and familiar with ERP, EA, SCM and SCM become important as well as strategic position should be hold at least a directorate level (Obi and Iwasaki, 2010). By doing this, a CIO will be able to be innovative, in which they are able to give added value to their organizations.



Source: www.studymarketing.org

Figure 5: Ecosystem

DISCUSSION AND CONCLUSION

The previous analysis outlined a number of elements that will need to be addressed as CIOs are to become to be innovative. The three elements are very important in building the innovative CIO. Obviously having a clear goal, obtaining support from management and establishing networking will encourage the creation of innovative climate. This was apparent that there was still work to be done in relation to creating the Innovative CIO. According to authors the three elements will affect the role of CIO in an organisation along with strong commitments, consistency and skills.

In order to solve the above issue, Indonesian Government has set up the following short-term policies that are being implemented

1. Promoting CIO University program through collaboration with the universities in the framework of CIO Master Program

2. Capacity building through trainings and courses for local government officer in order to improve ICT skills and management skills that pertains to Information Technology.
3. Develop International Academy of Chief Information Officers
4. Increase in investment for ICT to ensure the "Innovation Culture" will deliver real value
5. Implementation of internal government mechanism to make Indonesia Government especially KOMINFO the leading government agency in innovation

In conclusion, this paper has provided an outline of important issues that influence the creation of innovative CIOs. If anything, the paper outlines the need for more analysis. The paper supports the findings that CIO needs to be creative and innovative in order to cope with the IT architecture, the people, and the competition. In addition to this, by providing the elements for a CIO to be innovative, it is important to understand new system to the new business process within the organisation Therefore, it is important to have innovative CIOs to adapt quickly in line with technological changes.

REFERENCES LIST

- Anderson, N.R & West, M.A., 1998. 'Measuring climate for work group

- innovation: development and validation of the team climate inventory', *Journal of Organizational Behavior*, vol.19, pp. 235-258
- Boynton, A.C., Zmud, R.W & Jacobs, G.C. 1994, 'The influence of IT management practice on IT use in large organizations', *MIS Quarterly*, vol.18, no.3, pp.299-318.
- Cherinka, R, Miller R & Prezzama J, 2009, 'CIO 2.0: Reshaping the CIO Role in an Enterprise 2.0 Environment', The MITRE Corporation
- Chun, M & Moone, J 2009, 'CIO roles and responsibilities: Twenty-five years of evolution and change', *Information & Management*, vol.46, pp.323-334.
- Leidner, D.E & Mackay, J.M 2007, 'How incoming CIOs transition into their new jobs', *MIS Quarterly Executive*, vol.6, no.1, pp.7-28.
- Lawry, R & Waddell, D 2008, CIOs in the Public Sector: Their Roles, Responsibilities and Future, *International Review of Business Research Papers* Vol. 4 No.2 March 2008 Pp.163-175
- Obi, T 2007, Innovative CIO for e-Government in Japan, CIO Conference, delivered 28 May
- Obi, T & Iwasaki, N 2010, The Innovative CIO for e-Government, The Innovative CIO and e-Participation in e-Government Initiatives
- Ross, J.W & Weill, P 2002, 'Six IT decisions your IT people shouldn't make', *Harvard Business Review*, vol.80, no.11, pp.84-91.
- Smith, G.S 2005, Straight to the top : Becoming a world-class CIO, Published John Wiley & Sons, Inc, Canada
- Parlade, CV 2010, E-government, ICT Procurement and Innovation, The Innovative CIO and e-Participation in e-Government Initiatives
- Polanksy, M., Inuganti, T. and Wiggins, S. 2004, 'The 21st Century CIO'. *Business Strategy Review*, Vol. 15, Issue 2, pp. 29 - 33.
- Watts, S & Henderson, JC 2006, 'Innovative IT Climates: CIO perspective', *Journal of Strategic Information Systems*, vol.15, pp. 125-151

BIODATA

Cahyana Ahmadjayadi, Lahir di Garut, 2 Juli 1955, Pendidikan S3 Hukum Teknologi Informasi di Unpad Tahun 2010, Jabatan Kepala Badan Litbang SDM Kominfo.

Yudhistira Nugraha, Lahir di Kisaran, 29 Juni 1981. Pendidikan S2 Information Communication Technology Major IT Strategic Planning di Universitas Wollongong-Australia Tahun 2009, Jabatan Kasubag Kerjasama ICT, Sekretariat Badan Litbang SDM Kominfo.

STUDI PEMANFAATAN FASILITAS UNIVERSAL SERVICES OBLIGATION (USO) DI PURWAKARTA – JAWA BARAT

Sri Ariyanti

Sri.ariyanti@depkominfo.go.id

ABSTRACT

Information technology plays an important role in enhancing the development of a nation. Information needed in various sectors such as education, health, social, cultural, economic, etc. Through information technology the standards of living can be increased. Communities need information without exception for difficult area of telecommunication infrastructure affordable. The current condition is still occurred a gap between the urban with rural areas. To overcome the digital divide, the government organizes the Universal Service Obligation (USO) to fulfill the needs of society, especially in remote or undeveloped areas to gain telephone and Internet access . The USO program agenda were the establishment of telephone access in 31 824 villages in the year 2009, the establishment of Internet access in 4218 sub-districts in 2011 and the establishment of internet access in 31 824 villages in 2013. Until February 1, 2010, the program had reached 25.082 desa berdering and 100 desa pinter. This research to determine the extent to which local communities take advantage of the construction of the USO facilities were provided. This research is located in Purwakarta, Jawa Barat. The result of this research was the society less utilize USO facilities since there are other telecommunications equipment such as mobile phone. This result was strengthened by the acquisition of data for 82% of desa berdering respondents and 73% of pinter respondents in the town of Purwakarta already using cellular telephone facilities. In addition, the USO facilities are less strategically so that people rarely use it.

Key word : utilize, Universal Services Obligation, Purwakarta

ABSTRAK

Teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan perkembangan suatu bangsa. Informasi dibutuhkan dalam berbagai sektor misalnya sektor pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi dan sebagainya. Melalui teknologi informasi taraf hidup masyarakat dapat meningkat. Masyarakat sangat membutuhkan informasi tanpa terkecuali bagi masyarakat didaerah yang sulit terjangkau sarana telekomunikasi. Kondisi saat ini masih terjadi kesenjangan teknologi antara daerah perkotaan dengan perdesaan. Untuk mengatasi kesenjangan teknologi tersebut pemerintah menyelenggarakan program Uni

versal Services Obligation (USO) atau Kewajiban Pelayanan Universal yaitu kewajiban penyediaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi agar kebutuhan masyarakat terutama di daerah terpencil dan atau belum berkembang untuk mendapatkan akses telepon dan internet dapat terpenuhi. Agenda program USO yaitu terwujudnya akses telepon di 31.824 desa pada tahun 2009, terwujudnya akses internet di 4.218 kecamatan pada tahun 2011 dan terwujudnya akses internet di 31.824 desa pada tahun 2013. Sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2010, program desa berdering telah mencapai 25.082 desa dan 100 desa berbasis internet (desa pintar). Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat disekitar pembangunan USO memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan maka dilakukan penelitian pemanfaatan fasilitas Universal Services Obligation. Dalam penelitian ini studi kasus berada di Purwakarta. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa masyarakat dilokasi pembangunan USO khususnya di daerah Purwakarta kurang memanfaatkan fasilitas USO karena sudah ada alat telekomunikasi lain yaitu telepon seluler. Hal ini diperkuat dengan perolehan data sebesar 82% responden desa berdering dan 73% responden desa pintar di kota Purwakarta sudah menggunakan fasilitas telepon seluler. Selain itu lokasi fasilitas USO yang kurang strategis sehingga masyarakat jarang menggunakannya.

Kata-kata kunci : Pemanfaatan, Universal Services Obligation, Purwakarta

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Pada bidang komunikasi misalnya teknologi sangat penting sebagai alat berkomunikasi jarak jauh maupun dekat. Telepon/*Hand Phone* sekarang menjadi kebutuhan pokok untuk berkomunikasi dengan orang lain. Alat telekomunikasi tersebut juga membantu keperluan dalam bidang pendidikan, perdagangan, sosial dan lain-lain. Dalam bidang pendidikan misalnya membantu komunikasi antara siswa dengan guru, antara siswa yang satu dengan yang lainnya.

Dalam bidang perdagangan masyarakat dapat menggunakan Telepon/HP untuk menawarkan barang dagangannya. Pada bidang sosial telepon/HP digunakan untuk membantu menjalin silaturahmi dengan saudara, teman atau orang lain. Internet merupakan salah satu bentuk sarana TIK. Internet sangat membantu dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Masyarakat dapat menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam dunia maya. Selain itu internet juga memberikan informasi mengenai masalah kesehatan seperti jenis penyakit dan pengobatannya, informasi dokter, informasi rumah

sakit, dan lain-lain. Melalui media internet dapat juga membantu dalam bidang ekonomi misalnya perdagangan, bisnis, lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Dengan demikian sarana TIK sangat penting bagi masyarakat.

Sesuai dengan amandemen ke-empat Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 F yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Maka dalam memperoleh informasi tidak dibatasi siapa saja. Diharapkan semua penduduk dunia memperoleh dan menyampaikan informasi dengan menggunakan fasilitas komunikasi yang tersedia. Masyarakat dari kalangan atas sampai bawah, dari kota sampai desa terpencil berhak memperoleh dan menyampaikan informasi. Kendala yang dihadapi saat ini adalah kurang tersedianya sarana telekomunikasi bagi masyarakat yang bertempat tinggal di desa terpencil dan pinggiran. Padahal mereka sangat membutuhkan sarana telekomunikasi tersebut untuk kelancaran berkomunikasi dan kemajuan perekonomian mereka. Untuk mengatasi kesenjangan informasi (*digital divide*) antara masya-

rakat kota dan desa pemerintah menyelenggarakan program Kewajiban Pelayanan Universal atau *Universal Services Obligation* (USO) yang bertujuan untuk memberikan pemerataan pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat khususnya di wilayah perdesaan, perbatasan dan yang secara geografis terpencil serta secara ekonomi belum berkembang termasuk di daerah perintisan, pedalaman dan pinggiran, dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan wilayah tertinggal, memberikan stimulasi peningkatan potensi ekonomi wilayah tertinggal, menjaga kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi.

Kewajiban Pelayanan Universal tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No:32/PER/M.KOMINFO/10/2008. Peraturan Menteri tersebut mengatur tentang ketentuan umum, pendanaan, penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) Telekomunikasi, Penyelenggara Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi, Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi, Ketentuan Rencana Dasar Teknis Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi, tata cara pengawasan dan pengendalian, sanksi dan ketentuan lain-lain serta penutup.

Sedangkan penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) tertuang dalam Keputusan Menkominfo No.145/KEP/M.KOMINFO/2007 tanggal 13 April 2007 kemudian ditegaskan dalam Peraturan Dirjen Postel No.247/DIRJEN/2008 yang menetapkan WPUT sebanyak 31.824 desa.

Kebijakan KPU/USO adalah terwujudnya aksestelepon di 31.824 desa tahun 2009, terwujudnya akses internet di 4.218 kecamatan tahun 2011 dan terwujudnya akses internet di 31.824 desa pada tahun 2013 sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat berbasis informasi pada tahun 2025.¹ Pada program pembangunan USO tersebut disediakan dua jenis layanan yaitu layanan desa dering (yang menyediakan layanan telepon/memanggil dan dipanggil, *Short Message Service* (SMS) dan akses internet) dan layanan desa pintar/desa punya internet (yang menyediakan layanan telepon/memanggil dan dipanggil, *Short Message Service* (SMS) dan akses internet dilengkapi dengan PC).²

Pembangunan fasilitas USO sampai tanggal 1 Pebruari 2010 telah mencapai 25.082 desa berdering dan 100 desa berbasis internet (desa pintar). Untuk mengetahui bagaimana kesiapan masyarakat desa terhadap

pembangunan infrastruktur USO maka dilakukan penelitian mengenai pemanfaatan fasilitas USO tersebut. Pada kasus ini diteliti pemanfaatan fasilitas USO di daerah Purwakarta, Jawa Barat.

B. Permasalahan

Pembangunan Infrastruktur USO yang telah mencapai 25.082 desa berdering dan 100 desa berbasis internet (desa pintar) sampai tanggal 1 Pebruari 2010 diharapkan memberikan nilai tambah (*added value*) bagi kemajuan masyarakat desa. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembangunan infrastruktur USO pada masyarakat desa yang menerima bantuan fasilitas USO maka permasalahan yang harus diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan fasilitas USO oleh masyarakat sekitar lokasi pembangunan
2. Bagaimana pemanfaatan fasilitas USO oleh masyarakat di sekitar lokasi pembangunan
3. Faktor apa saja yang mendorong dan menghambat penggunaan dan pemanfaatan fasilitas USO yang tersedia.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan dan

¹ BTIP, 2010

² Swakelola, *Laporan Pendahuluan Studi pemanfaatan Fasilitas USO Sebagai Penyedia Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika*, Puslitbang Postel, 2010

pemanfaatan fasilitas USO oleh masyarakat disekitar lokasi pembangunan fasilitas USO, faktor yang mendorong dan menghambat pemanfaatan fasilitas USO tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah diperolehnya data dan informasi yang akurat tentang penggunaan dan pemanfaatan fasilitas USO oleh masyarakat di sekitar lokasi pembangunan USO, yang dimanfaatkan dalam memberikan rekomendasi peningkatan pemanfaatan fasilitas USO dan pengelolaan fasilitas USO.

KERANGKA KONSEPTUAL

A. *Universal Services Obligation (USO)*

1. Pengertian *Universal Services Obligation*

Istilah *Universal Service* tercatat pertama kalinya dalam kosakata sektor telekomunikasi pada tahun 1907. Saat itu Presiden perusahaan telekomunikasi terkemuka AT&T, Theodore Vail, mempopulerkan slogan "*One System, One Policy, Universal Service*" dalam laporan tahunan perusahaan tersebut berturut-turut hingga tahun 1914. Para ahli sejarah dan pengambil kebijakan berpendapat bahwa konsep yang disampaikan oleh Vail tersebut mengacu kepada

kebijakan untuk mempromosikan *affordability* jasa telepon melalui subsidi silang (Mueller Jr., 1997).³

Sesuai perjalanan waktu, konsep *Universal Service* kemudian diartikan bahwa setiap rumah tangga dalam suatu negara memiliki sambungan telepon, biasanya telepon tetap. Namun mengingat definisi di atas hanya layak untuk negara maju, maka kemudian muncul pula istilah *Universal Access* yang bisa dijangkau dan lebih sesuai dengan praktek-praktek di negara berkembang.³

Universal Access diartikan bahwa setiap orang dalam suatu kelompok masyarakat haruslah dapat melakukan akses terhadap telepon publik yang tidak harus tersedia dirumah mereka masing-masing. *Universal Access* ini biasanya dapat diperoleh melalui telepon umum, warung telekomunikasi atau kios sejenis, *multi-purpose community center*, dan berbagai bentuk fasilitas sejenis (ITU, 2003). Dalam banyak literatur, kedua istilah *Universal Service* dan *Universal Access* ini kemudian sering dipakai pada saat bersamaan dan sering pula dipertukarkan tanpa mengubah arti masing-masing.³

Pengertian USO menurut UU RI Nomor 36/1999 pasal 16 ayat 1: Kewajiban pelayanan universal (*universal service obligation*) merupakan

³ Purnomo, Bambang, 2010. Program USO Telekomunikasi di Indonesia, Palembang, Blog

kewajiban penyediaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi agar kebutuhan masyarakat terutama di daerah terpencil dan atau belum berkembang untuk mendapatkan akses telepon dapat terpenuhi. Dalam penetapan kewajiban pelayanan universal, pemerintah memperhatikan prinsip ketersediaan pelayanan jasa telekomunikasi yang menjangkau daerah berpenduduk dengan mutu yang baik dan tarif yang layak.

2. Tujuan *Universal Services Obligation (USO)*

Sebenarnya tujuan konsep *Universal Service* dan *Universal Access* tidaklah semata-mata untuk menyediakan fasilitas telekomunikasi kepada seseorang atau kelompok masyarakat saja, tetapi adalah untuk:

- a. meningkatkan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi;
- b. mempromosikan proses kohesi sosial dan politik melalui pembauran komunitas yang terisolir dengan komunitas umum/maju;
- c. meningkatkan cara dan mutu penyampaian jasa-jasa publik pemerintah;
- d. memacu keseimbangan distribusi populasi; dan
- e. menghilangkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara *information rich* dan *information poor*.³

3. Fasilitas *Universal Services Obligation (USO)*

Seperti telah diuraikan diatas fasilitas USO diberikan kepada masyarakat pedesaan, daerah terpencil dan perbatasan yang belum mempunyai fasilitas telekomunikasi. Dengan adanya fasilitas USO diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat desa dalam berkomunikasi dan menjalankan aktivitasnya. *Universal Services Obligation (USO)* atau Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) terdiri dari dua program yaitu:

- a. Desa berdering yang terdiri dari layanan *voice telephony*, SMS dan akses internet
 - b. Desa pintar (pakai internet). Terdiri dari layanan *voice telephony*, SMS dan akses internet yang dilengkapi dengan satu buah *Personal Computer (PC)*
- ## 4. Penetapan Wilayah *Universal Services Obligation (USO)*

Penetapan wilayah USO berdasarkan peraturan menteri komunikasi dan Informatika Nomor: 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 wilayah USO adalah daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, dan daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan Telekomunikasi. Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) terdiri dari WPUT desa berdering dan WPUT desa pintar.

Agenda program USO yaitu terwujudnya akses telepon di 31.824 desa pada tahun 2009, terwujudnya akses internet di 4.218 kecamatan pada tahun 2011 dan terwujudnya akses internet di 31.824 desa pada tahun 2013. Sampai dengan tanggal 1 Februari 2010, program desa berdering telah mencapai 25.082 desa dan 100 desa berbasis internet (desa pintar).

B. *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)*

Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang berarti guna, faedah. Pemanfaatan berarti proses, cara, perbuatan memanfaatkan/menjadi ada manfaatnya. Pemanfaatan fasilitas USO adalah proses memanfaatkan fasilitas USO yang terdiri dari layanan telepon, *Short Message Services (SMS)* dan internet. Penelitian pemanfaatan fasilitas USO ini dilakukan dengan mengadopsi *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)*.

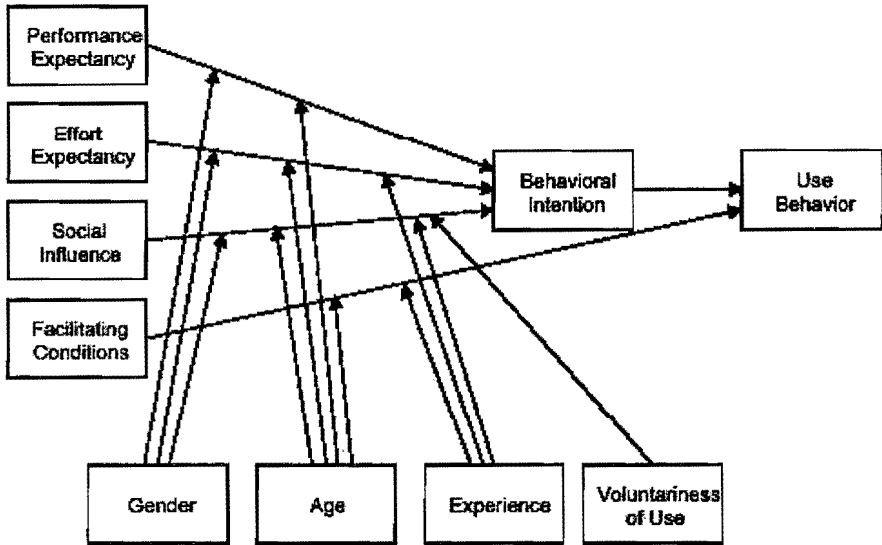
Teori UTAUT dikembangkan oleh Venkatesh et al, 2003 yang bertujuan untuk menjelaskan maksud pengguna menggunakan sistem informasi dan perilaku penggunaan berikutnya. Teori ini berpendapat bahwa empat kunci konstruksi yaitu *Performance expectancy*, *Effort Expectancy*, *Social Influence* dan *Facilitating Conditions* adalah penentu langsung

niat penggunaan dan perilaku. *Gender*, *Age*, *Experience*, dan *Voluntariness of Use* sebagai *moderating variable* dirancang untuk untuk menengahi dampak empat konstruksi tersebut diatas dengan tujuan penggunaan dan perilaku.⁴ Model teori UTAUT digunakan sebagai alat analisis penggunaan fasilitas USO yang digambarkan dalam model gambar 1.

Model UTAUT yang dihasilkan memformulasikan empat faktor yang memunculkan *system acceptance* dan *usage* dengan empat moderator kunci yang mempengaruhi. Faktor yang memunculkan *user acceptance* dari model UTAUT (*Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*) ini adalah :

1. *Performance expectancy*, yaitu tingkatan keyakinan *user* bahwa dengan menggunakan sistem akan membantu *user* menghasilkan performansi kerja yang maksimal.
2. *Effort expectancy*, yaitu tingkatan kemudahan yang dirasakan *user* dalam menggunakan sistem.
3. *Social influence*, yaitu kesadaran seseorang mengenai adanya orang lain yang menggunakan sistem.
4. *Facilitating conditions*, yaitu keyakinan adanya fasilitas organisasi dan teknis yang mendukung aktifitas *user*.

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Theory_of_Acceptance_and_Use_of_Technology



Sumber :Konstruk UTAUT (Venkatesh et. Al., 2003)

Gambar 1. Model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*

Sedangkan empat moderator kunci untuk model UTAUT (*Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*) ini adalah *gender, age, experience* dan *voluntary of system*. *Performance expectancy, effort expectancy, social influence* dan *facilitating conditions* berhubungan dengan *intention behavior* yang akhirnya menghasilkan *behavior use*. *Behavior use* menjadi pengukuran *user acceptance* dari sebuah sistem.⁵

C. Analisis Regresi

Analisis regresi bertujuan menganalisis besarnya pengaruh variable bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependent). Regresi linier dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu regresi linier

seederhana dan linier berganda. Perbedaan ini berdasarkan jumlah variable bebasnya, jika variable bebasnya hanya 1 maka disebut linier sederhana, jika variable bebasnya lebih dari 1 maka disebut linier berganda.

Komputasi umum regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX \dots\dots\dots(1)$$

Komputasi regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_nX_n, \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat (dependen)

a = Konstanta

$b_{1,2,n}$ = Koefisien regresi variable bebas

$X_{1,2,n}$ = Variabel bebas (independen)

Sifat-sifat garis linier sebagai berikut:

1. Jumlah simpangan positif dari titik-titik tersebar di atas garis regresi sama dengan jumlah simpangan negatif dari titik-titik yang tersebar di bawah garis regresi
2. Kuadrat simpangan mencapai nilai minimum

Dalam regresi linier berganda terdapat nilai koefisien determinasi (R^2) yang bertujuan untuk mengetahui berapa besar peran atau kontribusi dari beberapa variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi tersebut dalam menjelaskan nilai variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi dari 0 sampai dengan 1. Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu independent variabel terhadap dependent variabel.⁷

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metoda penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan melakukan survei kepada masyarakat disekitar fasilitas

USO sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pengelola USO dan aparat desa.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di empat desa yang terdiri dari tiga desa berdering yaitu desa Warungkadu, Pasawahan Anyar, Margasari dan satu desa pinter yaitu Wanawali. Ketiga desa berdering tersebut berada di Kecamatan Pasawahan. Sedangkan desa Wanawali berada di kecamatan Cibatu

C. Populasi dan Sampel

Populasi untuk penelitian adalah masyarakat disekitar pembangunan fasilitas USO telekomunikasi. Jumlah sampel 25 responden untuk tiap wilayah survei. Teknik sampling untuk menentukan sampel yaitu dengan menggunakan simple random sampling (simple acak sederhana) karena masyarakat disekitar pembangunan homogen dan tidak menggunakan strata. Unit analisis individu berumur antara 15 tahun sampai 60 tahun.

D. Teknik pengambilan data

Teknik pengambilan data dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif ini memerlukan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa kuesioner yang diberikan

kepada responden. Data yang diperlukan adalah data berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas USO oleh masyarakat disekitar fasilitas USO di wilayah tersebut. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur, internet serta data dari instansi lain yang terkait dengan USO.

Pendekatan Kualitatif dilakukan dengan wawancara kepada pengelola fasilitas USO dan aparat desa. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendukung data kuantitatif.

E. Teknik analisis data

Analisis akan dilakukan terhadap data dari pengguna (data kuantitatif) dan bukan pengguna (data kualitatif) untuk dapat menjawab pertanyaan dalam permasalahan penelitian ini, tentang pemanfaatan fasilitas USO oleh masyarakat.

1. Analisis untuk pengguna

a. Variabel-variabel penelitian

Variabel-variabel yang digunakan untuk model penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) *Performance Expectancy*, merupakan tingkat keyakinan masyarakat bahwa dengan menggunakan telepon desa/ fasilitas USO akan membantu masyarakat menghasilkan performansi kerja yang maksimal. Indikator yang digunakan

untuk mengukur variabel *Performance Expectancy* adalah sebagai berikut: a) fasilitas USO membantu berkomunikasi; b) fasilitas USO membantu meningkatkan penghasilan; c) fasilitas USO memberikan dampak keuntungan terhadap pekerjaan sehari-hari.

2) *Effort Expectancy*, sebagai derajat kemudahan yang dikaitkan dalam penggunaan sistem. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel *Effort Expectancy* adalah sebagai berikut: a) fasilitas USO mudah dipahami penggunaannya; b) penggunaan perangkat USO mudah dipelajari.

3) *Social Influence*, didefinisikan sebagai sejauh mana seorang individu memandang pentingnya faktor lingkungan kerjanya (dalam hal ini lingkup sosial) dalam penggunaan sistem baru. Indikator yang digunakan untuk mengukur *Social Influence* adalah sebagai berikut: a) saya menggunakan fasilitas USO atas motivasi/ dorongan orang lain; b) lingkungan di daerah saya mempengaruhi saya dalam menggunakan fasilitas USO; c) orang yang menggunakan fasilitas USO di daerah saya dianggap lebih modern daripada yang tidak menggunakan.

- 4) *Facilitating Condition*, merupakan tingkat dimana seseorang percaya bahwa sebuah organisasi dan infrastruktur teknis yang ada untuk mendukung penggunaan sistem. Indikator yang mempengaruhi *facilitating condition* adalah sebagai berikut: a) *accessibility* (adanya akses telekomunikasi di daerah tersebut); b) *availability* (ketersediaan perangkat); c) *affordability* (keterjangkauan); d) *acceptability* (penerimaan).
- 5) *Behavioral Intention*, didefinisikan sebagai niat membiasakan diri untuk menggunakan fasilitas. Indikator yang mempengaruhi *Behavioral Intention* adalah sebagai berikut: a) fasilitas USO akan membantu rutinitas pekerjaan sehari-hari; b) fasilitas USO menjadi kebutuhan dalam rutinitas kegiatan sehari-hari.
- 6) *Use Behavioral*, didefinisikan sebagai kebiasaan masyarakat dalam menggunakan suatu fasilitas atau sistem. Indikator yang mempengaruhi *use behavioral* adalah sebagai berikut: a) fasilitas USO digunakan untuk kegiatan saya sehari-hari; b) fasilitas USO berguna dalam mencari informasi (contoh: menerima email, berita *online*, *download file*, informasi pertanian, dsb...); c) fasilitas USO berguna dalam menyampaikan

informasi (contoh : mengirim email, *upload file*, dsb...)

b. Hipotesis

Hipotesa menyatakan hubungan apa yang ingin diketahui atau yang ingin dipelajari. Maka hipotesis-hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1a: Hubungan antara Harapan *performancy kerja (performance expectation)* terhadap niat membiasakan diri menggunakan (*behavioral intention*) dipengaruhi oleh *moderating gender*

H2a: Hubungan antara Harapan *performancy kerja (performance expectation)* terhadap niat membiasakan diri menggunakan (*behavioral intention*) dipengaruhi oleh *moderating age*

H1b: Hubungan antara Harapan *usaha (effort expectancy)* terhadap niat membiasakan diri menggunakan (*behavioral intention*) dipengaruhi oleh *moderating gender*

H2b: Hubungan antara Harapan *usaha (effort expectancy)* terhadap niat membiasakan diri menggunakan (*behavioral intention*) dipengaruhi oleh *moderating usia (age)*

H3b: Hubungan antara Harapan *usaha (Effort Expectancy)* terhadap niat membiasakan diri menggunakan (*behavioral intention*) dipengaruhi oleh *moderating pengalaman*

Ha: Harapan performancy kerja (*performance expectation*) berpengaruh positif terhadap niat membiasakan diri untuk menggunakan (*behavioral intention*)

Hb: Harapan usaha (*effort expectancy*) berpengaruh positif terhadap niat membiasakan diri untuk menggunakan (*behavioral intention*)

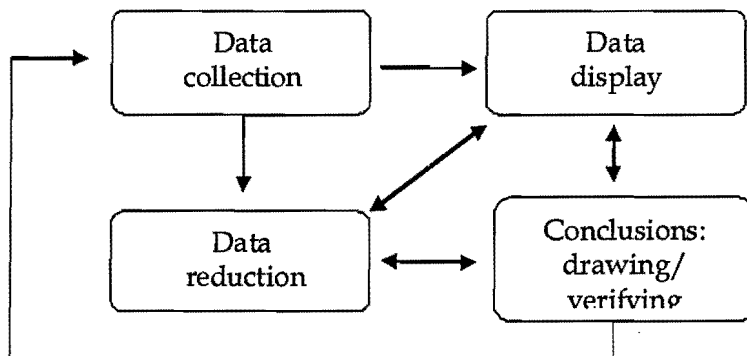
Hc: Pengaruh lingkungan sosial/masyarakat (*social influence*) berpengaruh positif terhadap kebiasaan menggunakan (*use behaviour*)

Hd: Niat membiasakan diri untuk menggunakan (*behavioral intention*) berpengaruh positif terhadap kebiasaan menggunakan (*use behaviour*)

He: Kondisi yang memfasilitasi (*facilitating condition*) berpengaruh positif terhadap kebiasaan menggunakan (*use behaviour*)

2. Analisis untuk masyarakat bukan pengguna.

Masyarakat di lingkungan fasilitas USO, dimungkinkan akan ditemukan masyarakat bukan pengguna sehingga tidak dapat dilakukan dengan menggunakan model UTAUT. Analisis akan dilakukan dengan statistik deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data lapangan apa adanya tanpa bermaksud untuk generalisasi. Analisis data akan menggunakan analisis data Model Interaktif dari Miles dan Huberman (1944:12), yang dapat digambarkan sebagai terlihat pada Gambar 3.



Sumber : Sugiyono (2007), "Memahami Penelitian Kualitatif", hal 94

Gambar 3. Komponen dalam analisis data (*interactive model*).²

- a. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga dapat memberi gambaran yang lebih jelas, antara lain dapat membuat kategorisasi, mengambil data yang pokok-pokok dan membuang data yang tidak diperlukan.
- b. Data display (penyajian data). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau *flowchart*, dapat juga berupa matrik, grafik, network/jejaring kerja, dan grafik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan di Purwakarta yang terdiri dari 4 desa yaitu desa Warungkadu, Pasawahan Anyar, Margasari dan Wanawali. Jumlah responden masing-masing desa sebanyak 25 orang. Data diperoleh dari pembagian kuesioner kepada masyarakat disekitar pembangunan fasilitas USO. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada pengelola fasilitas USO dan aparat desa.

Kuesioner yang disebarakan pada desa berdering (Warungkadu, Pasawahan Anyar dan Margasari) berupa kuesioner pengguna fasilitas telepon

umum desa dan bukan pengguna. Kuesioner yang disebarakan pada desa pinter (Wanawali) berupa kuesioner pengguna telepon umum desa, pengguna internet dan bukan pengguna.

B. Karakteristik responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data responden berusia 15-26 tahun dan 27-38 tahun paling mendominasi dengan persentase sebesar 33 % kemudian disusul responden yang berusia 39-50 tahun dengan persentase 25% dan responden berusia 51-60 tahun paling kecil persentasenya yaitu sebesar 9%. Responden jenis kelamin laki-laki mendominasi dengan persentase 62%. Sedangkan pendidikan terakhir SMP paling mendominasi dengan persentase 31%. Pekerjaan responden sebagian besar sebagai petani dengan persentase 22%. Sedangkan penghasilan perbulan sebagian besar kurang dari Rp.500.000,00 dengan persentase 60%.

C. Tanggapan Pengguna Fasilitas USO

1. Pengguna Telepon Umum Desa (Desa Berdering)

Berdasarkan hasil data yang diperoleh pengguna telepon umum desa paling banyak menggunakan telepon dalam berkomunikasi yaitu dengan persentase sebesar 56% kemudian diikuti penggunaan telepon dan SMS dengan persentase

sebesar 39% dan penggunaan fasilitas SMS dengan persentase sebesar 5%. Sebagian besar responden menggunakan fasilitas telepon umum desa untuk keperluan perdagangan dengan persentase sebesar 36%. Sebanyak 82% responden menggunakan telepon umum desa kurang dari 8 kali dalam sebulan. Responden juga paling banyak hanya mengeluarkan biaya kurang dari Rp.25.000,00 perbulan dalam menggunakan fasilitas telepon umum desa. Sebagian besar jarang menggunakan fasilitas telepon umum desa karena sudah ada fasilitas telekomunikasi lain yaitu telepon seluler. Sebesar 82% responden sudah pernah menggunakan fasilitas telekomunikasi lain yaitu telepon seluler.

Selain tanggapan tersebut diatas, responden juga harus mengisi kuesioner tanggapan pemanfaatan fasilitas USO yang menggunakan model UTAUT. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan software SPSS 15. Dalam menentukan hipotesa ditolak atau tidak, bisa kita peroleh dari hasil uji analisis regresi linier berganda dan regresi moderasi. Kelayakan model regresi diukur dengan menggunakan nilai signifikansi. Model regresi layak dan dapat dipergunakan jika angka signifikansi lebih kecil dari 0.05 (dengan presisi 5%) atau 0.01 (dengan presisi 1%). Dalam penelitian ini presisi yang digunakan sebesar 5%. Hasil

pengolahan data pengguna telepon umum desa pada desa berdering dapat dilihat pada tabel 1.

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dianalisis bahwa nilai signifikan (*significant level*) koefisien regresi pada H1a, H2a, H1b, H2b, H1c, H2c, H4c, H1d, H2d, Ha, Hb, Hc dan He lebih besar atau sama dengan 0.05 (α =presisi=5%) sehingga hipotesa ditolak. Sedangkan untuk hipotesa H3b, H3c, dan Hd diterima karena nilai signifikan (*significant level*) koefisien regresi kurang dari 0.05 (α =presisi=5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

H1a: Hubungan antara Harapan performancy kerja (*Performance Expectation*) terhadap Niat membiasakan diri menggunakan (*behavioral Intention*) tidak dipengaruhi oleh moderating *gender*

H2a: Hubungan antara Harapan performancy kerja (*Performance Expectation*) terhadap Niat membiasakan diri menggunakan (*behavioral Intention*) tidak dipengaruhi oleh moderating *age*

H1b: Hubungan antara Harapan usaha (*Effort Expectancy*) terhadap Niat membiasakan diri menggunakan (*Behavioral Intention*) tidak dipengaruhi oleh moderating *gender*

H2b: Hubungan antara Harapan usaha (*Effort Expectancy*) terhadap Niat membiasakan diri menggunakan

Tabel 1. Hasil Pengolahan Data Pengguna Telepon Umum Desa Pada Desa Berdering

hipotesa	variabel terikat (dependent)	variabel bebas (independent)	R-Squared	Adjusted R-Squared	ANOVA		KOEFSIEN REGRESI		KESIMPULAN
					F-Statistik Anova	Level Significant Anova	t-hitung	Level Significant	
H1a	BI	Gender, PE, Mod1a	0.093	0.015	1.19	0.328	-0.979	0.334	H1a ditolak
H2a	PE	AGE, PE, mod2a	0.07	-0.09	0.883	0.459	-0.836	0.409	H2a ditolak
H1b	BI	Gender, EE, mod1b	0.053	-0.028	0.655	0.585	-0.625	0.536	H1b ditolak
H2b	BI	PE, AGE, mod2b	0.142	0.069	1.936	0.142	-2.034	0.05	H1a ditolak
H3b	BI	PE, Experience, mod3b	0.349	0.294	6.265	0.002	-3.287	0.002	H3c diterima
H1c	BI	SI, Gender, mod1c	0.025	0.058	0.303	0.823	-0.165	0.87	H1c ditolak
H2c	BI	SI, Age, mod2c	0.02	-0.007	0.752	0.391	0.867	0.991	H2c ditolak
H3c	BI	SI, Experience, mod3c	0.361	0.306	6.589	0.001	3.144	0.003	H3c diterima
H4c	BI	SI, VU, mod4c	0.149	0.076	2.04	0.126	1.376	0.178	H4c ditolak
H1d	UB	FC, Age, mod1d	0.6	0.566	17.505	0	0.647	0.522	H1d ditolak
H2d	UB	FC, Experience, mod2d	0.615	0.582	18.651	0	0.438	0.664	H2d ditolak
Ha	BI	PE	0.051	0.025	1.99	0.167	-1.411	0.167	Ha ditolak
Hb	BI	EE	0.041	0.015	1.579	0.217	-1.257	0.217	Hb ditolak
Hc	BI	SI	0.017	-0.009	0.647	0.426	0.804	0.426	Hc ditolak
Hd	UB	BI	0.034	0.008	1.314	0.259	-1.146	0.259	He ditolak
He	UB	FC	0.547	0.534	44.622	0	6.68	0	Hd diterima

(Behavioral Intention) tidak dipengaruhi oleh moderating usia (age)

H3b: Hubungan antara Harapan usaha (Effort Expectancy) terhadap Niat membiasakan diri menggunakan (behavioral intention) dipengaruhi oleh moderating pengalaman menggunakan fasilitas atau sistem (experience)

H1c: Hubungan antara Pengaruh lingkungan sosial/masyarakat (social influence) terhadap niat membiasakan

diri menggunakan (Behavioral Intention) tidak dipengaruhi oleh moderating gender

H2c: Hubungan antara pengaruh lingkungan sosial/masyarakat (social influence) terhadap niat membiasakan diri menggunakan (behavioral intention) tidak dipengaruhi oleh moderating age

H3c: Hubungan antara pengaruh lingkungan sosial/masyarakat (social influence) terhadap niat membiasakan

diri menggunakan (*behavioral intention*) dipengaruhi oleh moderating *experience*

H4c: Hubungan antara pengaruh lingkungan sosial/ masyarakat (*Social Influence*) terhadap niat membiasakan diri menggunakan (*behavioral intention*) tidak dipengaruhi oleh moderating *voluntariness of use*

H1d: Hubungan antara Kondisi yang memfasilitasi (*Fasilitating Condition*) terhadap kebiasaan menggunakan (*Use Behaviour*) tidak dipengaruhi oleh moderating *age*

H2d: Hubungan antara Kondisi yang memfasilitasi (*fasilitating condition*) terhadap kebiasaan menggunakan (*use behaviour*) tidak dipengaruhi oleh moderating *experience*

Ha : Harapan performancy kerja (*performance expectation*) tidak berpengaruh positif terhadap niat membiasakan diri untuk menggunakan (*Behavioral Intention*)

Hb: harapan usaha (*effort expectancy*) tidak berpengaruh positif terhadap Niat membiasakan diri untuk menggunakan (*Behavioral Intention*)

Hc: Pengaruh lingkungan sosial/ masyarakat (*social influence*) tidak berpengaruh positif terhadap kebiasaan menggunakan (*use behaviour*)

Hd: niat membiasakan diri untuk menggunakan (*behavioral intention*) tidak berpengaruh positif terhadap kebiasaan menggunakan (*use*

behaviour)

He: kondisi yang memfasilitasi (*facilitating condition*) berpengaruh positif terhadap kebiasaan menggunakan (*use behaviour*)

2. Pengguna Telepon Umum Desa (Desa Pinter)

Berdasarkan hasil pengolahan data pengguna telepon umum desa pada desa pinter dapat sebagian besar fasilitas telepon umum desa yang digunakan adalah telepon dan SMS dengan persentase 73% kemudian disusul penggunaan telepon dengan persentase 27%. Sedangkan penggunaan fasilitas telepon umum desa dalam sebulan kurang dari 5 kali dengan persentase terbesar yaitu sebesar 64%. Masyarakat desa jarang menggunakan fasilitas telepon umum desa karena sudah ada fasilitas telekomunikasi lain. Sebesar 73% sudah menggunakan fasilitas telekomunikasi lain yaitu telepon seluler atau *Hand Phone*. Sementara masyarakat menggunakan telepon umum desa untuk keperluan pendidikan sebesar 64%. Bagi masyarakat yang menggunakan telepon umum desa, pemakaian per bulan sebagian besar hanya kurang dari Rp.25.000,00

Adapun hasil pengolahan data tanggapan pengguna fasilitas USO yang menggunakan model UTAUT dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengolahan Data Pengguna Telepon Umum Desa Pada Desa Pinter

Hipotesa	Variabel terikat (dependent)	Variabel bebas (independent)	R-Squared	Adjusted R-Squared	Anova		Koefisien regresi		Kesimpulan
					F-Statistik Anova	Level Signifcant Anova	t-hitung	Level Signifcant	
H1a	BI	Gender, PE, Mod1a	0.819	0.773	18.053	0.001	-0.815	0.439	H1a ditolak
H2a	PE	AGE, PE, mod2a	0.804	0.721	9.595	0.007	0.15	0.885	H2a ditolak
H1b	BI	Gender, EE, mod1b	0.083	-0.31	0.212	0.885	-0.112	0.914	H1b ditolak
H2b	BI	PE, AGE, mod2b	0.216	-0.12	0.644	0.611	0.882	0.407	H1a ditolak
H3b	BI	PE, Experience, mod3b	0.077	-0.153	0.336	0.724	-0.266	0.797	H3c ditolak
H1c	BI	SI, Gender, mod1c	0.162	-0.197	0.451	0.725	-0.533	0.611	H1c ditolak
H2c	BI	SI, Age, mod2c	0.209	-0.13	0.617	0.626	0.652	0.535	H2c ditolak
H3c	BI	SI, Experience, mod3c	0.244	-0.8	0.752	0.555	0.798	0.451	H3c ditolak
H4c	BI	SI, VU, mod4c	0.194	-0.152	0.561	0.658	-0.698	0.508	H4c ditolak
H1d	UB	FC, Age, mod1d	0.4	0.143	0.1557	0.283	-0.1581	0.158	H1d ditolak
H2d	UB	FC, Experience, mod2d	0.429	0.184	0.175	0.244	1.808	0.114	H2d ditolak
Ha	BI	PE	0.804	0.782	36.818	0	6.068	0	Ha diterima
Hb	BI	EE	0.069	-0.034	0.669	0.434	0.818	0.434	Hb ditolak
Hc	BI	SI	0.11	0.011	1.116	0.318	1.056	0.318	Hc ditolak
Hd	UB	BI	0.013	-0.097	0.118	0.739	0.343	0.739	Hd ditolak
He	UB	FC	0.151	0.057	1.601	0.238	1.265	0.238	He ditolak

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dianalisis bahwa nilai signifikan (significant level) koefisien regresi pada Ha sebesar 0 sehingga $\text{sig.} < 0.05$ ($\alpha = \text{presisi} = 5\%$). Dengan demikian hipotesa diterima. Sedangkan hipotesa yang lainnya ditolak karena nilai significant lebih besar dari 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa harapan performansi kerja (*Performance Expectancy*) berpengaruh positif terhadap Niat membiasakan diri untuk menggunakan sistem (*Behavioral Intention*).

3. Pengguna Internet (Desa Pinter)

Responden pengguna internet pada desa pinter hanya satu orang saja.

Karena jumlah responden hanya satu orang maka datanya tidak dapat diolah dengan menggunakan SPSS. Dari hasil pengisian kuesioner responden sangat terbantu dengan adanya internet untuk membantu tugasnya dalam memperoleh informasi. Namun responden kurang menguasai penggunaan internet.

D. Responden Bukan Pengguna Fasilitas USO

1. Profil Responden Bukan Pengguna Fasilitas USO

Responden bukan pengguna fasilitas USO berusia 15-26 tahun dan 27-38 tahun berjumlah terbanyak dengan persentase 35%. Mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 55%. Sebagian besar berpendidikan terakhir SMU dengan persentase sebesar 37% disusul SMP, SD dan D3/S1/S2. Sementara pekerjaan mayoritas sebagai petani/nelayan dengan persentase sebesar 37%.

2. Tanggapan Bukan Pengguna Fasilitas USO

Berdasarkan data yang diperoleh sebagian besar responden tidak menggunakan fasilitas USO karena sudah ada fasilitas telekomunikasi lain. Sebanyak 98% responden sudah menggunakan alat telekomunikasi lain yaitu telepon seluler.

E. Tanggapan Pengelola Fasilitas USO dan Aparat Desa

Selain memberikan kuesioner kepada masyarakat disekitar pembangunan fasilitas USO, dilakukan wawancara kepada pengelola fasilitas USO dan aparat desa. Berdasarkan hasil wawancara dari pengelola USO masyarakat setempat jarang menggunakan fasilitas USO karena sudah ada alat telekomunikasi lain yaitu telepon seluler. Selain itu hanya sebagian kecil saja masyarakat yang mengetahui keberadaan fasilitas USO. Lokasi penempatan telepon umum desa juga sebagian kurang strategis yaitu ditempatkan di kantor desa sehingga hanya sebagian kecil yang menggunakannya.

Fasilitas internet di desa pintar juga belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat karena hanya sebagian kecil masyarakat yang bisa mengoperasikan internet. Selain itu juga karena jumlah PC yang terbatas dan penempatannya yang kurang strategis yaitu di kantor desa maka hanya sebagian kecil masyarakat yang memanfaatkannya.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data penelitian pemanfaatan fasilitas *Universal Services Obligation* di Purwakarta dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengguna telepon umum desa (desa berdering) paling banyak menggunakan telepon dalam berkomunikasi yaitu dengan persentase sebesar 56%.
2. Sebagian besar responden desa berdering menggunakan fasilitas telepon umum desa untuk keperluan perdagangan.
3. Sebagian besar masyarakat desa berdering jarang menggunakan fasilitas telepon umum desa karena sudah ada fasilitas telekomunikasi lain yaitu telepon seluler atau *Hand Phone* dengan persentase responden sebesar 82%.
4. Pemanfaatan fasilitas telepon umum desa (desa berdering) yang dimodelkan dengan teori UTAUT dapat disimpulkan:
 - a. Hubungan antara Harapan usaha (*Effort Expectancy*) terhadap Niat membiasakan diri menggunakan (*behavioral Intention*) dipengaruhi oleh moderating pengalaman menggunakan fasilitas atau sistem (*experience*)
 - b. Hubungan antara Pengaruh lingkungan sosial/masyarakat (*Social Influence*) terhadap Niat membiasakan diri menggunakan (*behavioral Intention*) dipengaruhi oleh moderating *experience*
 - c. Harapan performancy kerja (*Performance Expectation*) tidak berpengaruh positif terhadap Niat membiasakan diri untuk menggunakan (*Behavioral Intention*)
 - d. Harapan usaha (*Effort Expectancy*) tidak berpengaruh positif terhadap Niat membiasakan diri untuk menggunakan (*Behavioral Intention*)
5. Pengguna telepon umum desa pada desa pintar sebagian besar menggunakan fasilitas telepon dan SMS dengan persentase 73%.
6. Penggunaan fasilitas telepon umum desa pada desa berdering dalam sebulan kurang dari 5 kali dengan persentase terbesar yaitu sebesar 64%. Masyarakat desa jarang menggunakan fasilitas telepon umum desa karena sudah ada fasilitas telekomunikasi lain yaitu telepon seluler dengan persentase penggunaan telepon seluler sebesar 73%. Sementara dalam penggunaannya masyarakat menggunakan telepon umum desa untuk keperluan pendidikan sebesar 64%. Bagi masyarakat yang menggunakan telepon umum desa, pemakaian per bulan sebagian besar hanya kurang dari Rp.25.000,00
7. Responden pengguna internet pada desa pintar hanya satu orang saja. Responden merasa terbantu dalam menjalankan tugasnya berkat adanya internet. Namun

responden kurang menguasai dalam penggunaannya.

8. Masyarakat disekitar pembangunan fasilitas USO jarang menggunakan fasilitas disebabkan hal sebagai berikut:
 - a. Sudah ada fasilitas telekomunikasi lain yaitu telepon seluler.
 - b. Kurang adanya sosialisasi keberadaan fasilitas USO
 - c. Penempatan fasilitas USO kurang strategis
 - d. Jumlah komputer (PC) pada desa pintar sangat terbatas (hanya tersedia 1 PC pada tiap desa pintar)
 - e. Kurang menguasai penggunaan internet dan trouble shooting jika terjadi masalah pada komputer dan koneksi internet
3. Masyarakat lebih membutuhkan fasilitas internet jika dibanding telepon umum desa. Oleh karena itu untuk kedepannya fasilitas USO yang disediakan sebaiknya berupa layanan internet
4. Perlu adanya sosialisasi keberadaan fasilitas USO
5. Perlu memberikan pelatihan internet dan jaringan komputer agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas USO berupa layanan internet secara optimal
6. Sebaiknya fasilitas USO diletakkan di tempat yang strategis sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkannya
7. Bantuan layanan internet sebaiknya difasilitasi komputer lebih dari satu sehingga banyak masyarakat yang dapat memanfaatkannya

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian pembangunan infrastruktur USO kurang dimanfaatkan oleh masyarakat perdesaan. Oleh karena itu agar fasilitas USO bermanfaat disarankan hal sebagai berikut:

1. Pembangunan fasilitas USO sebaiknya di daerah yang sama sekali belum ada alat telekomunikasi
2. Perlu di survey ulang desa yang benar-benar membutuhkan fasilitas USO

DAFTAR PUSTAKA

- Doni, 2009, "*Kajian Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Dalam Penggunaan Opensource Software Untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Pemanfaatan Teknologi Informasi*", Jakarta, Thesis
- Santoso, 2010, "*Kesiapan Infrastruktur Indonesia Bagian Timur untuk Menghadap Masalah Kesenjangan Digital dan Peningkatan E-Literacy*", Manado, BTIP

Purnomo, Bambang, 2010, Program USO Telekomunikasi di Indonesia, Palembang, Blog

Puslitbang Postel, 2010, Studi Pemanfaatan Fasilitas USO Sebagai Penyedia Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika, Jakarta

Venkatesh, M. G. Morris, G. B. Davis, and F. D. Davis, 2003, "*User acceptance of information technology: To-*

ward a unified view," MIS Quarterly, vol. 27, pp. 425-478

Wijaya, Tony, 2010 "*Analisis Multivariat*", Yogyakarta, Universitas Atma Jaya

BIODATA

Sri Ariyanti, Lahir di Purworejo, 7 April 1982. Pendidikan S2 Teknik Elektro-Telekomunikasi Tahun 2008, staf Puslitbang Postel.

KONVERGENSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TLK) KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF

Yourdan

ABSTRACT

Law related to broadcasting business wisdom guide and telecommunication business, multi supposed media genuinely as opened law system and interacted easy with social environment of course fast changes technology change consequence. This watchfulness is in law science domain and social science by using approach interaction between both from time to time. Digital technology development in television broadcast esterial will flow in problem social, because technology utilization berawal from one implementation points and continued with decision gradually and not at moment's notice so that not too membenani society and end result configuring and increase society welfare standard

Key words : *Convergence of ICT, Legal*

ABSTRAK

Hukum yang berkaitan dengan pedoman kebijaksanaan penyiaran usaha dan bisnis telekomunikasi, media multi seharusnya benar-benar sebagai telah dibuka sistem hukum dan mudah berinteraksi dengan lingkungan sosial tentu saja konsekuensi perubahan teknologi cepat berubah. Penelitian ini berada dalam domain hukum sains dan ilmu sosial dengan menggunakan pendekatan interaksi antara kedua dari waktu ke waktu. Pengembangan teknologi digital dalam siaran televisi esterial akan mengalir dalam masalah sosial, karena pemanfaatan teknologi berawal dari satu titik implementasi dan dilanjutkan dengan keputusan secara bertahap dan tidak dalam waktu saat itu agar tidak terlalu membenani masyarakat dan hasil akhir mengkonfigurasi dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Kata-kata kunci : *Konvergensi TIK, Hukum*

PENDAHULUAN

Konvergensi memang banyak dikaji dan dikembangkan, biasanya hanya dalam satu penyelenggara atau kumpulan penyelenggara telekomu-

nikasi yang bernaung dalam satu grup, kalau pada negara tertentu yang mempunyai *incumbent dominan* membangun dan memiliki jaringan backbone dengan mempersiapkan sistem konvergensi berbasis NGN, di

samping itu mempersiapkan suatu *interface* yang memungkinkan penyelenggara lain untuk dapat bergabung.

Penggerak konvergensi, merupakan suatu lingkaran kalau kita masuk mulai dari konsumen dengan kebutuhan yang semakin bervariasi mengakibatkan perubahan struktur pasar telekomunikasi, dalam waktu yang bersamaan menangkap pangsa peluang dalam kemajuan teknologi. Perubahan layanan dan kebutuhan pelanggan digerakkan oleh peningkatan permintaan layanan data dan multimedia, peningkatan permintaan konten yang bervariasi, dan permintaan akan tarif yang murah. Perubahan struktur pasar telekomunikasi digerakkan oleh semaraknya solusi yang inovatif interoperable dan bisa dieskalasi pada lingkungan IP, digitalisasi, perkembangan kemampuan computer (CPU, kapasitas memori untuk penyimpanan), perkembangan teknologi optic, perkembangan IPv6.

Dari penggerak konvergensi tersebut diatas berdampak pada perubahan paradigma melalui pendekatan tertentu dan usaha-usaha yang mengarah kepada terjadinya konvergensi teknologi secara terperinci dari keadaan lama mulai dari pasar yang bersifat monopoli, regulasi yang sangat ketat, hanya infrastruktur telekomunikasi, menghasilkan jasa dasar dan non dasar, informasi dengan

format terpisah antara suara, data dan gambar, gabungan antara analog dan digital, jaringan akses didominasi oleh jaringan kabel, pentarifan berdasarkan waktu dan jarak, berdasarkan industrial ekonomi. Sedangkan Paradigma yang baru melalui pendekatan pasar yang kompetitif regulasi yang longgar, infrastruktur menjadi Informasi, hasilnya berupa jaringan, jasa dan konten, Format dari Informasi dalam bentuk multimedia (konvergensi, teknologi seluruhnya telah digital, jaringan didominasi oleh nirkabel (bergerak), pentarifan berdasarkan volume (bvte).

Penggerak salah satu konvergensi yaitu digitalisasi TV siaran, dalam mencapai interoperability dan *interworking*, hal yang utama yang menjadi fokus dalam mengembangkan pola konvergensi adalah dari berbagai jaringan akses dan berbagai penyelenggara dan sistem kontrol yang diperlukan untuk bisa bergabung ke dalam sistem konvergen merupakan suatu kebutuhan kerangka kebijakan.

Pola dinamika masyarakat Indonesia seakan masih bergerak tak beraturan ditengah keinginan untuk mereformasi semua bidang kehidupannya ketimbang suatu pemikiran yang handal untuk merumuskan suatu kebijakan ataupun pengaturan yang tepat untuk itu. Meskipun masyarakat telah banyak menggunakan produk-produk teknologi informasi dan jasa

telekomunikasi dalam kehidupannya, namun bangsa Indonesia secara garis besar rnasih meraba-raba dalam mencari suatu kebijakan publik dalam membangun suatu infrastruktur yang handal (National Information Infrastructure) dalam menghadapi infrastruktur informasi global (Global Infcermation Infrastructure).

Permasalahan

Bagaimana keterkaitannya antar peraturan perundangan yang ada supaya Kebijakan konvergensi penyiaran dan telekomunikasi terjadi secara layak, pasti dan ditaati oleh masyarakat di Indonesia.

TEORI HUKUM, REGULASI DAN KEBIJAKAN

1. Teori hukum positif dan perkembangannya

Teori merupakan perenungan, cara atau hasil pandang dan kalau dikaitkan dengan hukum positif telah cukup lama dikaji oleh pakar teoritis hukum seperti Marx, Durkeim dan Weber, dalam konsep hukum positif, hukum pada waktunya telah diartikan sebagai norrna baku yang terumus secara ekplisit dalam bentuk perundang-undangan nasional.¹ Selanjutnya kajian hukum dari perspektif sosial berkembang saat pemikir sosial seperti Marx telah

terbebas dari monism lama bertahan bahwa hukum adalah tertib kehidupan, tertib moral, tidak ada pemisahan analisis antara apa yang normatif dengan positif dan atau yang empiris.

Perubahan adalah melalui masa transisi yang tidak terelakkan, sejalan dengan perubahan itu hukum pun sebagai komponen sistem kehidupan akan ikut juga berubah secara fungsional. Masyarakat akan berkembang secara progresif dari awal yang menggunakan teknologi seadanya hingga modern dan terus berkembang kepada hal-hal yang sangat kompleks dan menjadi kompak (terintegrasi) terjadinya konvegensi teknologi mengakibatkan terjadinya konvergensi peraturan perundang-undangan.

Menurut Max Weber hukum² memiliki rasinalitasnya yang substantif tatkala substansi hukum memang terdiri dari aturan umum yang siap dideduksikan guna menghukumi berbagai kasus yang kongkrit. Sebaliknya, hukum dikatakan tidak memiliki rasionalitas yang substantif tatkala dalam tatanannya setiap perkara diselesaikan atas dasar kebijaksanaan-kebijaksanaan politik atau etika yang unik, bahkan mungkin emosional, tanpa bisa memjuk sekalipun dan sedikitpun ke aturan-aturan umum yang secara objektif ada. Sernentara itu hukum akan

¹ Soetandyo Winjosoebroto, *Hukum, Paradigm dan Dinamika Masyarakat*, hal. 18

² Ibid

memiliki rasionalitas untuk menyelesaikan berbagai hal yang telah terpolakan demi untuk tercapai kepastian hukum. Holmes,³ memandang hukum sebagai sejumlah keputusan dan maklumat yang pada hakikatnya merupakan cerminan kepentingan mereka yang mampu mendominasi di dalam masyarakat, yang seterusnya untuk menjamin realisasinya akan ditegakkan dengan bantuan sarana pemaksa.

Dalam menuju sistem konvergensi yang terintegrasi, hukum sebagai sistem yang terbuka, sehingga mudah bertransaksi dengan lingkungan sosial yang berubah, dalam hal ikwal menginputkan fakta, rmemprosesnya di dalam sistem throughputs yang secara sosial relevan, kemudian mengoutputkan kembali di tengah masyarakat sebagai sosiolegal judgments yang benar-benar fungsional.

Hukum akan menampakkan diri dan tunduk Pada keajegan-keajegan (regularities nomos) atau keseragaman-keseragaman (*uniformities*). Dengan demikian hukum Penyiaran dan Telekomunikasi dapat diamati, secara sosiologis dan diteliti secara saintifik, non doktinal. Perubahan konsep hukum dari konsep positivism ke konsep empiris-sosiologis. Disini lebih mengedepan peran logika induksi untuk menemukan azas umum dan teori-teori mulai dari

rninatur atau middle range maupun yang grand.

Skema hukum⁴ yang ideal dan realitas masyarakat dengan perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi, sehingga sebuah produk hukum dapat diterima atau dipertentangkan, hal ini tergantung makna yang terdandung di dalamnya dan tentunya dapat mengakomodasi kepentingan umurn dan kepentingan politik.

2. Tuntutan Kehati-hatian

Pemerintah mengesahkan regulasi dengan sejumlah masalah, hal tersebut dilakukan karena pemerintah berusaha menyelesaikan sejumlah rmasalah. Biasanya ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah, dan regulasi yang dipilih dapat menjadi cara yang terbaik maupun tidak untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Terkadang diketahui bahwa regulasi tersebut tidak benar-benar berfungsi sebagaimana yang dimaksudkan dan bahwa masalahnya tidak terselesaikan dan bahkan menjadi lebih parah. Kemudian, Pemerintah sering berusaha untuk memperbaiki regulasi, baik dengan cara mengubahnya atau memberlakukan regulasi lebih lanjut untuk mengatasi masalah-masalah yang baru timbul akibat regulasi awal tersebut. Selain itu, regulasi-regulasi sering menimbulkan akibat-akibat

³ Ibid, Hal 41

⁴ Lihat Legal, Opinion, Aktualisasi dan teoritis dan Empiris, hal. 12.

yang tidak direncanakan.

Regulasi dan perundang-undangan tidak jelas, multiplikatif, atau tidak konsisten, pejabat pemerintah harus menafsirkannya. Kebutuhan akan penafsiran tersebut mernberikan mereka suatu keleluasaan wewenang. Kebijakan tersebut mengizinkan mereka untuk mengabdikan, atau menolak untuk mengabdikan apa yang mungkin diminta oleh seorang warga. Dalam keadaan tersebut, wewenang untuk menolak menciptakan suatu pejuang mendapatkan uang untuk mengabdikan suatu permintaan. Kendali yang dipegang pejabat pemerintah terhadap sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang warga memberikan wewenang kepada pejabat tersebut untuk menuntut pembayaran kepadanya, selain ongkos yang diwajibkan secara wajar.

3. Kerangka Regulasi, Kebijakan Konvergensi penyiaran dan Telekomunikasi

Dalam membahas kerangka regulasi tidak terlepas dari konsep ilmu administrasi Negara dimana dengan mempelajari semua proses organisasi dan individu (sebagai pejabatiofficial sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislative, eksekutif dan peradilan, dalam definisi ini secara implisit mencakup kegiatan formulasi dan

implernentasi kejaksaan (Kebijakan).

Kebijakan konvergensi penyiaran dan telekomunikasi rnerupakan kebijakan publik seperti yang dinyatakan oleh Dye, kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mengambil tindakan tersebut dan apa akibatnya dari tindakan tersebut. Kalau dilihat kerangka kebijakan antara kedua sub sektor ini sangat berbeda, dimana sub sektor penyiaran lebih mengarah pada barang dan jasa public (public goods) barang dan jasa yang tersedia untuk semua orang. Barang dan jasa publik murni adalah barang dan jasa yang dikonsumsi berdasarkan pilihan bebas. Karakteristik utama dari barang dan jasa publik adalah barang dan jasa tersebut dapat dibagikan dan tersedia untuk semua orang dan bersifat non eksklusif. Jasa penyiaran TV dan radio lebih cenderung tersedia untuk semua orang. Sehingga spektrum frekuensi radio yang digunakan sering diklaim sebagai ranah publik. Berbeda dengan jasa Telekomunikasi yang lebih mengarah pada barang dan jasa privat, menurut definisinya adalah bersifat eksklusif, yang dapat mengkonsumsinya hanya oleh orang yang mampu membayar berdasarkan sistem harga yang berlaku di pasar. Penggunaan spektrum frekuensi radio lebih berharga dan mempunyai nilai jual yang lebih menarik bila

dibandingkan dengan kanal frekuensi radio yang digunakan untuk lembaga penyiaran.

Kerangka teoritis dalam kebijakan konvergensi penyiaran dan telekomunikasi merupakan sector publik yang bisa menggunakan jaringan privat, demikian juga sebaliknya jaringan privat dapat digunakan menghasilkan jasa dan barang publik. Dalam mengkaji karakteristik profit dari sektor public dan nonprofit, Anthony dan Herzlinger,⁵ mengatakan bahwa garis demarkasi diantara keduanya adalah di dalam organisasi no profit, keputusan yang dibuat oleh manajemen dimaksudkan untuk menciptakan layanan sebaik mungkin sesuai dengan sumberdaya yang tersedia, keberhasilan akan diukur terutama berdasarkan serapa banyak layanan yang diberikan oleh organisasi ini dan seberapa baik layanan yang diberikan. Jadi sektor nonprofit lebih banyak didasarkan pada kriteria kesejahteraan sosial ketimbang keuntungan finansial.

4. Defenisi Konvergensi

Konvergensi merupakan integrasi yang progresif dari beberapa platform jaringan yang berbeda untuk menyalurkan layanan yang serupa dan atau layanan yang berbeda yang disalurkan pada platform jaringan yang sama. Konvergensi adalah bersatunya layanan telekomunikasi

merupakan kegiatan penyediaan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi melalui media apa saja, termasuk TV, siaran, radio dan multi media.

Konvergensi tingkat layanan yang menyatukan berbagai aplikasi atau layanan telekomunikasi dan broadcast ke dalam satu media, sehingga dengan satu jenis media pelanggan dari penyelenggara jasa dapat menikmati berbagai jenis layanan seperti triple play (teleponi, video dan text, termasuk layanan streaming broadcast dan video on demand maupun Quad play yang andalannya adalah teknologi akses tanpa kabel).

Menurut Anders Olsson klasifikasi layanan masa depan terdiri dari Messaging (MMS dan SMS), *transactional, background interactive, streaming, conversational (voices, vidiophone)* berhubungan dengan terminal. Dalam aplikasinya melalui *services network control* dan *intelegenc*, memerlukan *bandwidth* untuk *access connectivity, core connectivity*.

Konvergensi tingkat jaringan adalah suatu sistem tingkat atas yang menjadi management dan pengendali semua jenis platform jaringan dimulai dari PSTN, mobile seluler mulai dan 2G hingga jaringan masa depan 3 G, dan versi berikutnya Wimax, maka diperlukan suatu konvergensi

⁵ Lihat Public Policy, Pengantar teori dan Praktek analisis kebijakan, hal.10

jaringan (Converged Network) sehingga terdapat suatu sistem jaringan tingkat atas yang menjadi manajemen dan pengendali dari semua jenis platform sehingga akan menjadi jaringan yang tanpa batas, fleksible dan terintegrasi.

PEMBAHASAN

1. Keterkaitan antar peraturan perundangan yang ada supaya Kebijakan konvergensi penyiaran dan telekomunikasi

Pengumpulan data diambil dari beberapa pemikiran dari data sekunder. seperti hasil seminar, naskah akademik, berbagai tulisan baik yang ada di internet. Dari hasil pengumpulan data tersebut didapat beberapa poin sebagai berikut:

- a. Kondisi Regulasi Telekomunikasi dalam Era Konvergensi

Secara umum regulasi telekomunikasi masih berdasarkan teleponi pada circuit switch. Masih terdapat tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. Penegakan hukum masih lemah serta penggunaan sumber daya sumber daya yang belum efisien dan manajemennya belum tertata rapih.

Struktur industri dalam Undang-undang 36 tentang telekomunikasi masih berbentuk vertikal, dimana terdapat pemisahan antara telekomunikasi, penyiaran dan internet.

Struktur ini bersifat sektoral yang terdiri dari penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi, dan penyelenggara telekomunikasi Khusus. Terlihat disini setiap layanan mempunyai jaringan yang terpisah-pisah dalam, hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakefisiensi, sumber daya, karena setiap mempunyai jaringan tanpa memperhatikan infrastruktur lainnya. Paradigm baru dengan konvergensi memungkinkan layanan yang berbeda disalurkan melalui jaringan yang sama atau layanan yang sama disalurkan pada jaringan yang berbeda. Dengan pendekatan sektoral ini akan melahirkan regulasi masing-masing, penyiaran dan telekomunikasi. Dalam implementasi regulasi sektoral ini ada yang saling bertentangan, baik pada tingkat Undang-undang maupun pada tingkat peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan semangat konvergensi yang masih sesuai Undang-undang 36 tahun 1999, tentang telekomunikasi adalah, semangat kompetisi, dan kewajiban setiap penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi untuk membangun dan memberikan kontribusi atas pelayanan telekomunikasi di daerah yang belum terjangkau. Dengan kompetisi peran pemerintah dalam mengintervensi pasar semakin berkurang, disinilah terlihat peran pemerintah sebagai fasilitator dalam menentukan

kebijakan, untuk mengawasi dan mengatur pelaku pasar. Dari struktur telekomunikasi yang existing sekarang dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam struktur yang berlaku saat ini tidak mampu untuk mengakomodasi konvergensi, karena pemanfaatan sumber daya yang tidak efisien dan terkesan diskriminatif.

b. Kondisi Regulasi Penyiaran dalam Era Konvergensi

Secara tradisional, regulasi penyiaran biasanya ada pada kerangka kerja regulasi layanan radio dan TV. Namun, dengan adanya konvergensi diperlukan suatu regulasi baru ataupun penyesuaian atas regulasi-regulasi yang telah ada. Sebagai contoh, apakah penyediaan fitur interaktif pada layanan TV diatur pada regulasi penyiaran atau telekomunikasi, dan bagaimana pula dengan penyiaran TV melalui infrastruktur telekomunikasi pita lebar.

Saat ini Dirjen Postel yang berada dibawah Departemen Komunikasi dan Informatika hanya memberikan lisensi penyiaran kepada lembaga penyiaran analog". Meskipun UU penyiaran tidak mengatur mengenai teknologi akan tetapi perkembangan teknologi baru membutuhkan perubahan payung hukum. Kebutuhan-kebutuhan tersebut termasuk penggunaan spektrum frekuensi dan bandwidth, lisensi perizinan untuk stasiun penyelenggara penyiaran

digital, prosedur kebijakan migrasi analog ke digital, masa transisi penggantian pesawat penerima analog, penggunaan *single frequency network* dan lain-lain. Untuk membahas masalah tersebut dibutuhkan pengkajian kembali produk hukum yang ada, untuk membuat produk hukum yang baru.

Regulasi dibidang penyiaran saat ini membentuk suatu struktur industri yang terhubung secara vertikal dalam satu kesatuan antara lembaga penyiaran, konten penyiaran, fasilitas jaringan, dan akses spektrum frekuensi. Konsekuensinya, setiap operator hroadcasting harus memiliki infrastruktur transmisi sendiri dengan menggunakan kanal frekuensi radio sendiri untuk setiap lokasi dalam mengirimkan program kepada pemirsanya. Jenis hubungan seperti ini sudah tidak sesuai lagi dalam era konvergensi.

Dalam kaitan untuk kepentingan nilai atau kompetisi dalam pemanfaatan spektrum frekuensi, regulasi dalam penyiaran tidak mengenal kepentingan diatas. Frekuensi untuk penyiaran harus dialokasikan terpisah dengan pemanfaatan yang diperuntukkan hanya khusus untuk siaran baik TV maupun radio. Pemanfaatan sumber daya frekuensi di kanal-kanal UHF oleh institusi-institusi penyiaran dipandang tidaklah setara dengan nilai sumber daya kanal frekuensi yang mereka pakai, mengingat kanal-

kanal UHF yang dipakai pada sistem penyiaran TV sangatlah bernilai tinggi apabila dimanfaatkan bagi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan multimedia bergerak.

Keberadaan sistem TV digital memberikan banyak keuntungan dari segi kinerja dan kualitas penyiaran dibandingkan dengan sistem TV analog. Digitalisasi sinyal memungkinkan kompresi data dan transmisi yang jauh lebih efisien, sehingga lebih banyak kanal frekuensi yang tersedia dibandingkan dengan kondisi pada sistem analog. Selain itu, sistem TV digital juga lebih tahan terhadap pengaruh interferensi yang memungkinkan pemanfaatan pita frekuensi menjadi lebih optimal. Sistem TV digital juga memungkinkan sinyal TV diterima dengan baik pada penerima yang bergerak. Konsekuensinya, pada sistem TV digital dapat dilakukan pengiriman informasi yang jauh lebih besar sehingga memungkinkan terwujud berbagai layanan inovatif yang sebelumnya hanya tersedia pada media layanan lainnya.

Awalnya media penyiaran hanya ditujukan untuk penyiaran gambar (video) dan suara (audio), namun digitalisasi memungkinkan berbagai layanan interaktif sebagaimana yang tersedia pada media teknologi informasi dan komunikasi. Penyer-taan berbagai data digital pada media penyiaran biasa disebut dengan data casting. Kondisi itu mendorong arah

perkembangan berbagai layanan menuju layanan multimedia atau konvergensi layanan. Konvergensi tiga layanan tradisional (telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran) ditunjukkan pada gambar 6.1. Fenomena konvergensi ini, dengan berbagai kesempatan dan tantangannya, dapat memberikan ekstrastimulasi bagi kelayakan bisnis dari implementasi TV digital.

Konvergensi layanan dapat mendorong perkembangan berbagai layanan yang semula tidak dirancang untuk jaringan penyiaran, misalnya fasilitas intelaktif dengan menggunakan return channel. Personalisasi layanan seperti ini memerlukan pengembangan aplikasi yang spesifik pada kerangka kerja penyiaran TV digital, terlepas dari standar TV digital yang diadopsi. Kelebihan jaringan penyiaran adalah dalam penetrasi penggunaannya, karena sifat isi layanannya yang umum diminati. Bahkan suatu hasil penelitian di Inggris menunjukkan bahwa pertumbuhan penggunaan TV digital melebihi penggunaan komputer (sadbank, 2001).

Kerangka teoritis dalam kebijakan konvergensi penyiaran dan telekomunikasi merupakan sektor publik yang bisa menggunakan jaringan privat, demikian juga sebaliknya jaringan privat dapat digunakan menghasilkan jasa dan barang publik. Dalam mengkaji karakteristik profit

dari sektor public dan nonprofit, Anthony dan Herzlinger,⁶ mengatakan bahwa garis demarkasi diantara keduanya adalah di dalam organisasi nonprofit, keputusan yang dibuat oleh manajemen dimaksudkan untuk menciptakan layanan sebaik mungkin sesuai dengan sumberdaya yang tersedia, keberhasilan akan diukur terutama berdasarkan serapa banyak layanan yang diberikan oleh organisasi ini dan seberapa baik layanan yang diberikan. Jadi sector nonprofit lebih banyak didasarkan pada kriteria kesejahteraan sosial ketimbang keuntungan finansial.

Penjelasan tentang middleware lebih difokuskan pada salah satu middleware terbuka yang banyak digunakan, yaitu MHP (Multimedia Home Platform). Yang menggambarkan secara sekilas tentang model konvergensi teknologi informasi dan komunikasi beserta tantangan dan problemnya terutama dalam penyelarasan regulasi.

2. Dampak konvergensi Teknologi Informasi terhadap kerangka peraturan yang existing

Untuk mencari data dampak konvergensi teknologi penyiaran dan telekomunikasi pada peraturan yang existing, maka diperlukan pemetaan kerangka hukum dari penyiaran dan telekomunikasi itu sendiri. Beberapa UU dan peraturan pemerintah

turunannya yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:

- a. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi baik berupa jaringan, jasa dan telsius; standarisasi (sertifikasi); penggunaan spektrum frekuensi radio, yang dilaksanakan oleh Ditjen Postel. 1) PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi- Telekomunikasi yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Adapun alasan untuk penyempurnaan atau merevisi Peraturan Pemerintah tersebut adalah mengingat semakin cepatnya perkembangan pertumbuhan penyelenggaraan telekomunikasi, keinginan percepatan pemerataan pembangunannya dan antisipasinya terhadap era kompetisi di sektor telekomunikasi yang sesungguhnya saat ini sudah mulai berlangsung. Pembahasan perubahan Peraturan pemerintah ini disamping oleh internal Ditjen Postel dan BRTI yang pembahasannya cukup intensif, dan rancangan ini sudah disampaikan ke publik dalam bentuk konsultasi publik untuk memperoleh tanggapan dari berbagai pihak yang berkepentingan; 2) PP No. 53

⁶ Lihat PrLblic Policy, Pengantar teori dan praktek analisis kebijakan, hal. 10

Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

- b. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengatur tentang penyiaran radio dan televisi baik publik, swasta, berlangganan dan komunitas, dan dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Penyiaran Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi. Namun UU ini tidak secara khusus membahas penyiaran digital. 1) PP No. 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing; 2) PP No. 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing; 3) PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta; 4) PP No. 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas; 5) PP No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- c. UU No.11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat baik secara perorangan maupun property/bisnis maupun pemerintahan. Masih mempunyai dampak negatif yang mengemuka di masyarakat. Undang Undang ITE

mengatur sejumlah besar isu yang berkaitan dengan hukum cyber (cyberlaw) diantaranya, kondisi pendukung kegiatan komersial dengan jalur elektronik dan perjanjian elektronik, nama domain dan hak kepemilikan intelektual, hal yang bersifat kerahasiaan pribadi, pengaturan isi dan kejahatan cyber. Undang Undang ITE disebutnya sebagai perangkat hukum telah mencakup hal yang menjadi kondisi pendukung bagi e-commerce yang efektif dan memberi kekuatan hukum serta memberi keuntungan bagi kegiatan perdagangan melalui internet atau dunia maya. Pada Pasal 5 dimana telah ditetapkan bahwa informasi dan dokumen yang bersifat elektronik tidak diabaikan keabsahan hukumnya hanya karena informasi dan dokumen dalam bentuk elektronik, informasi yang bersifat elektronik dapat memenuhi persyaratan sebagai dokumen tertulis atau dokumen asli. Tentu Undang-Undang ini secara signifikan juga member perlindungan kepada konsumen, seperti yang tercantum dalam Pasal 9, memberikan perlindungan kepada konsumen yang melakukan pembelian barang dan jasa di jalur internet.

Sedangkan Pasal 11 sampai dengan 14, membelikan kemung-

kinan digunakannya tandatangan elektronik yang merupakan aspek kunci dan harus dilaksanakan dalam e-coffunerce yang efektif. Pasal 18 disebut, menguatkan kepastian hukum dalam perjanjian elektronik yang dinyatakan bahwa para pihak bebas untuk bersepakat dalam forum dan undang-undang yang berlaku bagi transaksi internasional. Adapun Pasal 20 menguatkan kepastian hukum dalam perjanjian kerja kontrak secara elektronik, sementara Pasal 23 dan Pasal 24 mengatur sejumlah aspek dalam pendaftaran dan penggunaan nama domain, Pasal 25 berisi sejumlah perlindungan hak kekayaan intelektual dalam kaitannya dengan komputer dan sistem elektronik (termasuk internet). Sedangkan Pasal 26 Undang Undang ITE mengatur hal-hal yang bersifat pribadi yang mensyaratkan pihak yang berkepentingan harus memberikan persetujuannya sebelum informasi yang bersifat pribadi tersebut digunakan.

- d. UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) memberikan keleluasaan masyarakat untuk memperoleh informasi Publik sesuai dengan yang dibutuhkan untuk kepentingan masing-masing tentang Keterbukaan Informasi

Publik dalam implementasi Undang-undang ini masih timbul pro dan kontra dari beberapa komponen masyarakat.

Dari sisi perundang-undangan kalau dilihat dari yang berkaitan dengan permasalahan teknologi Informasi dan telekomunikasi, terdapat beberapa alternatif bagaimana Undang-undang yang ada berkaitan dengan undang-undang yang lain dan diinterpretasikan dalam era konvergensi;

- a. Harmonisasi setiap undang-undang masih berlaku dan tetap otonom berlaku akan tetapi harus diharmonisasikan agar peraturan-peraturan lanjutannya tetap konsisten dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi ketidakpastian hukum.
- b. Alternatif kedua dibuat undang-undang yang baru dengan menggabung ketiga undang-undang seperti undang-undang telekomunikasi, penyiaran dan undang-undang ITE.
- c. Alternatif ketiga dengan mengamandemen ketiga undang-undang pada pasal, pasal yang berpotensi untuk terjadinya pertentangan. Untuk konsep NGN (Next generation network) lebih berkonsentrasi pada aspek teknologi dan layanan dari konvergensi”.

Roscou Pound,⁷ tokoh sosiologi hukum, mengatakan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk memaksimalkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan yang minta dilindungi. Pada hakikatnya hak itu pun adalah tak lain dari pada kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Ada tiga macam hak kepentingan yang perlu diketahui, yaitu kepentingan individu, kepentingan umum kepentingan badan-badan pemerintah. dan kepentingan sosial untuk menegakkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di dalam masyarakat, seperti perlindungan sumber daya alam, keamanan dan sebagainya. Pada abad ke 19 hukum terlalu banyak mengakui hak-hak individu, kadangkala di anggap sebagai yang sangat azasi dan kodrati, sehingga menurut pound hukum agar ditelaah ulang untuk mendahulukan mendapatkan kebutuhan dan tuntutan sosial. Hukum tentunya dapat difungsikan sebagai alat rekayasa sosial, yang harus diangkat untuk sebagai persoalan bagaimana usaha bersama manusia untuk dapat lebih diefektifkan dengan jalan merealisasi tujuan hukum.

Pada kesempatan lain Pound mengemukakan penyelesaian perkara yang adil dapat diselenggarakan menurut hukum. akan tetapi dapat pula tidak. Apabila diselesaikan

menurut hukum maka penyelesaian sifatnya sangat lugas, kecenderungannya menuntut perlakuan yang sama. dan cara pencapaiannya menerapkan kaedah umum dan baku. Sementara penyelesaian perkara dilakukan tidak rnenurut hukum akan tetapi menurut intuisi pengadil yang tidak merasa terikat pada kaidah-kaidah umum rncam apapun, maka penyelesaian akan bercorak administratif. Kedua corak yang yudisial maupun administratif selalu sama diketemukan dalam sistem hukum rnanapun. Mana dari keduanya yang dipraktekkan sekali corak yudisial dan sekali bercorak administratif. Keseimbangan yang diterima khalayak itulah yang tentunya harus dinilai sebagai cara dan corak yang terbaik. Hukum akan menampakkan diri dan tunduk pada keajengan-keajengan (regularities nomos) atau keseragaman-keseragaman (uniformities). Dengan demikian hukum Penyiaran dan Telekomunikasi dapat diamati, secara sosiologis dan diteliti secara saintifik, non doktinal. Perubahan konsep hukum dari konsep positivism ke konsep ernpiris sosiologis. Disini lebih mengedepankan peran logika induksi untuk menemukan azas umum dan teori-teori mulai dari minatur atau middie range maupun yang grand.

7 Ibid Hal 47

MODEL

Dalam membagi struktur ICT pada Negara tetangga ada yang membagi dua model layanan saja yaitu Singapura; penyedia jasa dan penyedia infrastruktur, Afrika Utara menjadi 3 model yaitu Electronic Communication, broadcasting services dan electric services. Sedangkan Malaysia membagi empat layanan seperti; CASP (Content Application Services Provider), ASP (Application Services Provider), NSP (Network Services Provider), NFP (Network Facility Provider). Ada lagi yang membagi menjadi lima seperti Trinidad dan Tobago yaitu Type 1, Network only concession, Type 2 Network Services Concession, Type 3, Virtual Services Network Concession, Type 4 Telecommunication services concession, type 5 Broadcasting Services concession.

Di samping pembagian layanan ICT menuntut adanya pembaharuan dalam hal regulasi yang dapat melindungi infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur penyiaran dan dapat dikelompokkan menjadi empat golongan yaitu: Pertama regulasi yang terkait dengan bisnis seperti pemberian lisensi, interkoneksi, tarif dan pengembangan industri dalam negeri. Kedua regulasi sumber daya termasuk di dalamnya pengaturan spektrum frekuensi radio dan pengaturan penomoran. Ketiga regulasi untuk memproteksi konsumen (Quality of services, Nomor portable,

standarisasi. Kemudian yang keempat yaitu regulasi pemerataan aksesitas (Universal Service Obligation (USO).

Tantangan untuk masa depan hal mana regulasi tujuannya untuk membentuk suatu keteraturan, adanya tatanan yang tertib secara nasional dari keempat komponen tersebut diatas. Dengan kemajemukan jaringan dan jasa yang dimulai dari pusat pemerintahan sebagai uji coba perubahan akan menjalar kesemua wilayah lokal untuk pemerataan aksesibilitas. Regulasi sifatnya adalah mendorong pasar dan kompetisi.

Struktur industri konvergensi yang memenuhi prinsip membagi industri tidak berdasarkan sifat teknologi akan tetapi kepada fungsinya. Prinsip kedua adalah memisahkan layer satu dengan layer lainnya sehingga setiap layer mempunyai kebebasan dalam berinovasi tanpa terhalang dengan layer berikutnya.

1. Analisis Model Kebijakan Hukum Teknologi informatika dan komunikasi

Perubahan struktur industri telekomunikasi dan penyiaran, terjadi perubahan sosial dan lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang non positivism, maka terjadi selisih apa dimodelkan dalam ide normatif kedalam suatu kebijakan hukum dan realitas sesungguhnya di dalam kehidupan nyata, maka akibat

perubahan dan kemajuan teknologi terjadinya selisih yang melebar antara apa yang dituntut secara normatif demi tegaknya hukum formal, sering terjadi apa yang senyatanya dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam integrasi kemajuan teknologi. Pembaharuan hukum yang berkaitan dengan Informasi dan komunikasi, akan menjadikan substansi ini dapat dimutakhirkan dengan mengikuti perkembangan kehidupan yang nyata. Seperti kecenderungan dan pengembangan industri kreatif yang saat ini marak, serta pilar-pilar industri kreatif yang meliputi industri, teknologi, resources, kreativitas manusia dan sumber daya alam yang semuanya itu memerlukan perlindungan kelembangan hukum.

Analisis dampak regulasi pastinya mempackan sejenis analisis kebijakan, hukum namun yang berusaha mempertimbangkan pilihan kebijakan dari sudut pandang semua pemangku kepentingan yang terkena dampak. Pemerintah yang berpelan untuk mengumpulkan, mempertimbangkan, menyesuaikan, dan menyeimbangkan kepentingan. dan, idealnya, untuk membuat pilihan kebijakan hukum sesuai dengan kepentingan terbaik masyarakat secara keseluruhan. Apabiiia para pemangku kepentingan selain pemerintah melakukan analisis kebijakan, mereka biasanya melakukan hal tersebut hanya dari sudut pandang mereka sendiri, dan dapat

diperkirakan bahwa analisis kebijakan dan rekomendasi mereka akan disesuaikan dengan kepentingan mereka sendiri dan tidak perlu rnemperhitungkan kepentingan dari para pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, kita harus membedakan antara analisis dampak regulasi pemerintah sebagai suatu jenis analisis kebijakan dengan analisis kebijakan pemangku kepentingan yang dianggap lebih untuk kepentingan sendiri.

Dalam suatu persaingan, kebijakan pemerintah dan proses pengambilan keputusan yang terkendali dengan baik, para pemangku kepentingan yang bersangkutan akan mempromosikan posisi kebijakan tertentu mereka dengan informasi informasi pendukung, sedangkan pemerintah akan mengkaji semua klaim kebijakan secara independen dan berdasarkan pada analisisnya sendiri. Analisis-analisis dari pemangku kepentingan akan membantu memberikan informasi kepada pemerintah karena para pemangku kepentingan mengetahui bahwa pemerintah tidak memilikinya namun tidak akan mengendalikan disposisi kebijakan pemerintah. Dengan pemikiran ini. analisis kebijakan pemangku kepentingan.

Dalam analisa kebijakan dibagi dua yaitu, pendekatan tertentu yang menghasilkan regulasi dan usaha agar konvergensi jaringan telekomunikasi

terjadi. Pola kebijakan dari berbagai jaringan akses dan berbagai penyelenggara yang dapat bergabung ke sistem konvergensi.

2. Sistem Konvergensi dan Beberapa Pilihan

Secara umum, dengan munculnya teknologi baru yang tercermin dengan adanya digitalisasi sehingga menimbulkan konvergensi menuntut adanya pembaharuan dalam hal regulasi, Regulasi disini dapat melindungi infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur penyiaran dan dapat dikelompokkan menjadi empat golongan yaitu regulasi yang terkait dengan bisnis seperti pemberian lisensi, interkoneksi, tarif dan pengembangan industri dalam negeri. Kedua regulasi sumber daya termasuk didalamnya pengaturan spektrum frekuensi radio dan pengaturan penomoran. Ketiga regulasi untuk memproteksi konsumen (Quality of services, Nomor portable, standarisasi. Kemudian yang keempat yaitu regulasi pemerataan aksesitas (Universal Service Obligation (USO).

Tantangan untuk masa depan hal mana regulasi tujuannya untuk membentuk suatu keteraturan, adanya tatanan yang tertib secara nasional dari keempat komponen tersebut diatas.

Implikasi konvergensi TIK terhadap hukum dan regulasi memiliki dua

dimensi, substansi dan materi dari hukum dan regulasi, sedangkan dimensi kedua adalah keterkaitan antara masing-masing regulasi. Pemikiran untuk mengantisipasi konvergensi TIK terhadap hukum dan regulasi yang berkembang dalam pemikiran tiga arus utama yaitu :

- Pertama antisipasi konvergensi pada rezim aturan yang terpisah,
- Kedua konvergensi pengaturan pasar dan pengaturan kompetisi dan pengaturan pasar atas penguasaan pasar di dalam industri konvergensi.
- Arus pemikiran yang ketiga adalah untuk menghimpun kebutuhan secara menyeluruh dengan membentuk suatu kerangka regulasi konvergensi, dengan menggabungkan menjadi satu peraturan perundang-undangan. Dengan pendekatan holistik.

Semua itu kembali ke strategi yang diterapkan pada tiap negara. Dapat saja perkembangan teknologi yang pesat menciptakan berbagai aplikasi yang direspon dengan cepat oleh pasar sebelum regulasi yang diperlukan berjalan, namun dapat juga regulator yang proaktif untuk membuat berbagai regulasi lebih dahulu sebagai antisipasi perkembangan teknologi yang diikuti oleh investasi. Pendekatan awal melalui regulasi lebih banyak dilakukan di negara-negara berkembang dengan

pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang selain menata regulasinya, juga untuk menarik minat investasi dan menstimulasi berbagai aktivitas ekonomi.

Dari beberapa model konvergensi TIK yang ada, semuanya terlihat menuju ke suatu model yang hampir serupa didasarkan atas konsep di atas. Perbedaannya adalah dalam bagaimana implementasi model yang mirip itu pada klasifikasi industri yang diinginkan. Perbedaan ini secara umum disesuaikan dengan kondisi pihak-pihak yang merancang dan mengimplementasikan model konvergensi itu sendiri.

Dalam mengklasifikasikan suatu industri menuju konvergensi, umumnya mengacu pada model ini, sektor industri yang dipilih adalah penyiaran, telekomunikasi, teknologi informasi dan berita. Terlihat bahwa konvergensi dapat terjadi antar industri (konvergensi horisontal) ataupun antar level yang berbeda pada satu industri (konvergensi vertikal atau konglomerasi). Namun, tidak tertutup pula kemungkinan disintegrasi (divergence), dimana terjadi pemisahan aktivitas oleh pelaku tertentu pada satu industri dalam rangka efisiensi kerja dan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal. Salah satu model untuk kondisi Indonesia adalah yang diusulkan oleh Masyarakat Telekomunikasi Indonesia, yang pada

dasarnya selaras dengan konvergensi rantai nilai. Mastel memilah industri teknologi informasi dan komunikasi ke segmen-segmen sebagaimana ditunjukkan Pembagian segmen-segmen tersebut adalah:

- * Segmen industri yang masuk ke blok content adalah industri pencipta atau penyedia isi (content generator) dan pengintegrasian isi (content packager).
- * Segmen industri yang masuk ke blok service adalah industri penyedia jasa seperti penyedia jasa konten atau penyedia jasa aplikasi.
- * Segmen industri yang masuk ke blok infrastruktur adalah penyedia jasa jaringan dan penyedia fasilitas jaringan (network facilities provider-NFP).
- * Segmen industri yang masuk ke blok terminal adalah industri perangkat yang akan digunakan atau terkait langsung dengan konsumen.

Dari masing-masing segmen industri ini seperti penyiaran, telekomunikasi, teknologi informasi dan lainnya tentunya harus dikelompokkan menjadi segmen yang sesuai dengan segmen yang ada. Seperti semua industri penyedia isi di industri telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan lainnya harus dikelompokkan ke segmen ini. Sehingga tidak ada lagi suatu industri

menguasai semua segmen yang ada. Namun dengan pembagian ke dalam segmen-segmen ini semua industri yang ada secara hukum harus dapat saling bersinerji dengan memberikan yang terbaik bagi konsumennya. Permasalahan yang ada sekarang adalah satu industri pada umumnya menguasai semua aktivitas dari hulu ke hilir. Kondisi seperti ini menyebabkan beberapa hal, antara lain

- * Menyulitkan pemain baru untuk ikut bersaing dalam bisnis yang sama terutama dalam biaya investasi, infrastruktur, menggaet konsumen dan lain-lain.
- * Menghambat penetrasi penggunaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang sangat dibutuhkan pada saat ini.
- * Menghambat tumbuhnya inovasi-inovasi baru dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

Dari penjelasan model konvergensi tersebut, terlihat bahwa sistem digitalisasi memiliki peranan yang cukup besar. Berbagai teknologi dan model usaha pada sistem digital yang telah dijelaskan sebelumnya, memungkinkan pembagian segmen industri seperti pada model konvergensi diatas, dan dapat memberikan nilai tambah ekonomi untuk tiap transisi antar segmen sebelum mencapai konsumen.

Konsumen dalam konteks pelayanan publik mengandung makna bahwa hakikat dan pendekatan dalam pemberian pelayanan publik yang semua berkiblat pada kepentingan birokrasi (bureacratic-oriented) atau berorientasi pada produsen (producer-oriented) berubah menjadi berorientasi pada konsumen (consumer-driven approach). Pollitt (1988:86). menegaskan bahwa tujuan utamanya bukan sekedar untuk menyenangkan hati para penerima pelayanan publik, melainkan untuk memberdayakan mereka. Sebab. orientasi ke arah pelayanan publik yang lebih baik (*better public service delivery*) juga mencerminkan penegasan akan arti penting posisi dan perspektif para pengguna dalam system pelayanan publik tersebut. Publik tidak hanya diperlakukan sebagai obyek.

3. Kebijakan hukum dalam menentukan pilihan

Untuk melihat faktor-faktor yang berdasarkan tuntutan kehati-hatian konsep konvergensi, yang merujuk pada network economy dapat dijadikan rujukan. pada konsep ini, keluaran yang dilihat adalah nilai tambah ekonomi, dengan menempatkan perkembangan teknologi, kebijakan dan kondisi pasar sebagai masukan. Ketiga masukan di atas dapat dianggap sebagai peluang ekonomi yang harus diimplementasikan

tasikan menjadi suatu aplikasi, layanan dan regulasi yang efektif, sebagaimana ditunjukkan. Adanya sinergi antara aplikasi, layanan.

Kalau kita lihat teori norma hukum yang berpasangan antara masing-masing layanan, tentunya ada layanan primer dan sekunder, ditinjau dari fokus yang menjadi layanan penyelenggara itu sendiri. dalam perumusan norma hukum primer dan norma hukum sekunder yang berhimpitan, di dalam suatu peraturan kadang-kadang perumusannya norma hukum primer dan norma hukum sekunder saling berjauhan. Menurut peraturannya Perundang-undangan dan hukum ketatanegaraan dan hukum administrasi negara⁸ Norma hukum itu dirumuskan dalam norma tunggal saja, tentunya misalnya akan mengatur pokok-pokok pelayanan teknologi, informasi dan komunikasi, seperti halnya Undang-undang yang telah ada seperti pokok-pokok kehakiman, pokok-pokok pemerintahan daerah dan sebagainya.

Selain itu norma hukum yang secara hierarkhi berada diatas peraturan perundang-undangan, yaitu norma hukum yang merupakan norma dasar atau aturan dasar/pokok selalu dirumuskan dengan suatu norma tunggal, karena sifatnya rnengatur secara garis besarnya saja dan belum dilekati oleh sanksi pidana atau sanksi

pemaksa. Sehingga terlihat sekarang Undang-undang yang baru saja diterbitkan banyak mempunyai protes dari masyarakat karena karena telah dilekati dengan upaya paksa dan sanksi pidana.

4. Pilihan yang diusulkan dalam struktur layanan TIK berdasarkan fungsi :

a. Fungsi Penyedia Konten

Penyedia konten, yang membuat konten oleh Badan Hukum atau perorangan; seperti yang ada sekarang adalah: *production house, user Generated Conten, (UCC), Provider generated content (PGC), digital marketing.*

b. Fungsi Penyedia Layanan Aplikasi

Penyedia layanan aplikasi, dibentuk dengan badan hukum yang menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu seperti layanan suara, data, dan layanan berbasis konten seperti; layanan (*voice, messaging, vidio*), *hosting, ISP, content aggregator, e-transaklion, e-gov, virtual network operator (VNO), clearing house, billing.*

Fungsi Penyelenggara layanan jaringan, menyediakan keterhubungan (konektivitas) dasar dan lebar pita untuk mendukung aplikasi yang bervariasi.

⁸ Lihat Ilmu Perundang-undangan ,Hral. 17

c. Fungsi Penyelenggara fasilitas Jaringan

Penyelenggara fasilitas jaringan yang memiliki fasilitas seperti stasiun bumi satellite, kabel serat optic broadband, jaringan dan sentral telekomunikasi, perangkat transmisi, radio communication, Base stasion komunikasi bergerak dan perangkat.

Dasar justifikasi dalam menentukan pilihan keterkaitan tersebut di atas yang disesuaikan dengan kondisi *existing* industri penyiaran dan telekomunikasi di Indonesia didasarkan atas:

1) Efisiensi sumber daya

Efisiensi diperdapat dengan penggunaan sumber daya terbatas secara bersama-sama. Setiap layanan tidak membangun infrastruktur sendiri-sendiri. Layanan baru dari layer atas dapat memanfaatkan layer di bawahnya tanpa membangun infrastruktur baru. Maksud penggunaan sumber daya terbatas secara bersama-sama. Selain itu dengan adanya layer sumber daya dapat dioptimalkan karena layer yang bersesuaian yang akan dapat mengakses sumber daya terbatas itu. Pengaturan sumber daya penomoran dikonstrasikan pada layer penyelenggaraan layanan.

2) Non diskriminatif

Kompetisi yang lebih baik semua badan hukum yang mempunyai kemampuan dasar dapat masuk

ke layer yang dikehendaki. Dengan memperkecil *barrier-entry* diharapkan terjadi inovasi-inovasi dalam *layer-layer* tersebut dan *playing field* yang seimbang. Seleksi alam akan terjadi bagi pemain lama yang malas melakukan inovasi akan tergilas oleh pemain baru yang suka berinovasi.

3) Self Regulation

Adanya layer-layer yang horisontal akan membatasi regulasi layanan yang akan diberikan. Struktur industri yang vertikal membuat regulasi harus dibuat per layanan per value chain (dari konten ke infrastruktur). Konten layanan A diregulasi, jaringan A diregulasi dan infrastruktur layanan A diregulasi. Dengan adanya struktur horisontal konten layanan A dan konten layanan B yang serupa dapat diregulasi dengan regulasi yang sama. Layanan Jaringan A dan layanan jaringan B dapat diregulasi dengan regulasi yang serupa dan seterusnya hingga value chain yang terakhir. Batasan-batasan yang lebih mudah akan membuat industry lebih memahami permasalahannya dan akan cenderung untuk melakukan *self regulation* tanpa banyak campur tangan pemerintah.

4) Memperkecil digital divide

Struktur industri berlapis ini, dapat memperkecil kesenjangan digital

walaupun secara tidak langsung, akan terjadi spesialisasi pada setiap layernya. Setiap pemain pada layer penyelenggara fasilitas jaringan, misal jaringan fiber akan berusaha untuk menambahkan dan meningkatkan sebab pesaing akan melakukan hal yang serupa, hasilnya adalah infrastruktur dapat tersedia lebih banyak dan aksesibilitas menjadi bertambah dan mengurangi kesenjangan digital.

6. Menumbuhkan industri kreatif

Dengan terpisahnya layer penyedia konten dengan penyedia layanan aplikasi diharapkan industri konten akan lebih maju, dikembangkan dengan lebih mudah dan disalurkan dengan biaya yang lebih murah. Ide dan eksekusi sebuah konten menjadi lebih berharga dibanding dengan metode produksi.

KESIMPULAN

1. Dalam menyusun Pokok-pokok pelayanan Informasi Teknologi dan Komunikasi sebagai norma hukum tunggal dalam hukum ketatanegaraan, yang belum dilekati oleh sanksi pidana atau sanksi pemaksa.
2. Model keterkaitannya antar peraturan perundangan atau antara unsur-unsur yang berkonvergensi menggunakan model secara fungsi penyelenggara konten, fungsi penyelenggara-aplikasi jaringan, fungsi penyelenggara jaringan dan fungsi penyelenggara fasilitas jaringan.
3. Dalam menyusun model perubahan penggolongan layanan TIK secara hierarchie menjadi menurut fungsi, tuntutan kehati-hatian merupakan hal yang perlu diperhatikan;
 - a. Terkadang diketahui bahwa regulasi tersebut tidak benar-benar berfungsi sebagaimana yang dimaksudkan dan bahwa masalahnya tidak terselesaikan dan bahkan menjadi lebih parah.
 - b. Regulasi dan perundang-undangan tidak jelas, multiplikatif atau tidak konsisten.
4. Dampak konvergensi Teknologi Informasi terhadap kerangka layanan yang ada dalam peraturan yang existing, Layanan yang sama bisa dibawa oleh platform yang berbeda seperti;
 - a. Divergensi infrastruktur berarti pemborosan *resource nasional*;
 - b. Perkembangan layanan baru (*triple play interactive media, digital broadcasting media*, tidak terakomodasi oleh regulasi existing berarti layanan baru tidak mendapat kepastian hukum,

sehingga mencegah masuknya investor baru;

- c. Konvergensi mempengaruhi produksi, model bisnis dan level kompetisi, berarti mengubah aturan main industry;
 - d. Konvergensi akan memberikan efek pada isu-isu utama regulasi (interkoneksi, licencing, sistem pentarifan, spektrum manajemen, numbering dan security, dan Uso).
5. UU 36, tentang telekomunikasi masih sesuai dengan era konvergensi yaitu semangat kompetisi, dan memberikan kontribusi bagi layanan telekomunikasi bagi daerah yang belum terjangkau.

SARAN

Berikut saya akan mengemukakan rekomendasi kebijakan, berupa langkah-langkah strategis guna mementingkan pelayanan publik yang berfokus pada kesejahteraan rakyat, dengan kebijakan redistribusi, dirnana bertujuan untuk merubah alokasi kemakmuran, pendapatan dan hak diantara berbagai kelompok dan kelas dalam masyarakat.

Pertama, pada aras makro, sejalan dengan semangat pengedepanan kompetisi dan bantuan terhadap daerah tertinggal semangat UU 36, tentang telekomunikasi, Perlu diregulasi, dimana penyederhanakan peraturan yang masih perlu dan atau

menghapus peraturan yang tidak perlu, terutama yang berakibat pada bidang ekonomi, menegaskan bahwa tujuan utamanya bukan sekedar untuk menyenangkan hati para pemegang saham dan penerima pelayanan public.

Kedua, juga rncerminkan pene-gasan akan arti penting posisi dan perspektif para pengguna dalam sistem pelayanan publik tersebut. publik tidak hanya diperlakukan sebagai obyek (sebagai klien jasa pelayanan semata), tetap, juga sebagai warganegara yang aktif (*active citizen*).

DAFTAR PUSTAKA

Hendrawan, Layanan Telekomunikasi dalam Era Konvergensi Telekomunikasi , IT dan Media, hen @stei.itb.ac.id

Konvergensi Jaringan dan Layanan ICT Nasional, Forum Konvergensi Telekomunikasi Nasional

Maria, Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-Undangan, dasar-dasar pembentukannya, Yogyakarta, Kanisius

Naskah Akademik, 1999, Rancangan Undang-Undang Konvergensi

Pusat Teknoiogi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Tehnologi (BPPT), 2007, Kajian Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Jakarta

Wayne Parsons, 2006, Public Policy Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan, Edisi pertama, cet. Ke 2

Wignyosoebroto, Soetandyo, 2007, Hukurn, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan Huma, cet. Pertama

BIODATA

Yourdan, Lahiran di Solok, 15 April 1950, Pendidikan S2 Kebijakan Publik, Jabatan Peneliti Madya pada Puslitbang Postel.

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH

Azwar Aziz

ABSTRACT

Information Technology (IT) as an initial step of digitizing program administration, information technology is expected to optimize the main tasks and functions of government agencies, so that the execution of government tasks can be performed effectively and efficiently and to improve governance. Information technology (IT) in the discourse of new public administration was placed as the main variable to support the implementation of public administration efisiens, effective, equitable, and accountable. E-government is not merely due to the IT development of strategic environmental perspective, but more important is the feeling of a need for the application of communication technology in order to achieve the quality of excellent service to the community. Government is currently facing pressure from various parties to improve the quality of public services and increase active participation in the provision of information to people and claimed to be more effective. This causes the e-government or electronic-based government increasingly important role for all decision makers. in addition, also to enhance transparency, accountability, participation, efficiency, coherence. So as to increase the level of public trust in government as a public service, which in turn would eliminate the culture of collusion Neopotisme Corruption in Indonesia.

Keywords : *Information Technology, Quality of service, e-government*

ABSTRAK

Teknologi Informasi (TI) sebagai langkah awal program digitalisasi administrasi pemerintahan, dengan teknologi informasi diharapkan dapat mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintahan, sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan. Teknologi informasi (TI) dalam wacana administrasi publik baru ditempatkan sebagai variabel utama untuk mendukung terlaksananya administrasi publik yang efisiens, efektif, berkeadilan, dan akuntabel. E-goverment bukan semata mata karena perkembangan TI dari perspektif lingkungan strategik, tetapi yang lebih penting lagi adalah dirasakan adanya kebutuhan akan penerapan teknologi komunikasi tersebut guna mencapai kualitas

pelayanan prima kepada masyarakat. Pemerintahan pada saat ini menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif. Hal tersebut menyebabkan e-government atau pemerintah berbasis elektronik semakin berperan penting bagi semua pengambil keputusan. di samping itu juga untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, koherensi. Sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pelayanan publik, sehingga pada akhirnya akan menghilangkan budaya korupsi kolusi neopotisme di Indonesia.

Kata-kata Kunci : Teknologi Informasi, Kualitas pelayanan, e-government

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, disamping sandang, pangan dan papan sebagai kebutuhan utamanya, maka sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan untuk berkomunikasi diantara sesamanya sebagai kebutuhan utamanya untuk dapat saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Maka mulailah manusia mencari dan menciptakan sistem dan alat untuk saling berhubungan tersebut. Perkembangan perubahan manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi. Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dibagian pengiriman ke penerima sebagai pengirim informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya dan lebih lama penyimpanannya.

Teknologi informasi (TI) dapat difahami sebagai suatu pengelolaan dan pengolahan informasi dengan

memanfaatkan teknologi elektronika, terutama teknologi komunikasi dan teknologi komputer. Pendapat Indrajit dalam buku Teknologi informasi dalam pemerintahan (2008 : 4) teknologi informasi dapat difahami sebagai suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data dan informasi, serta dalam penyalurannya dalam batas ruang dan waktu. Pendapat ini sejalan dengan dengan definisi TI yang terdapat dalam Longman Dictionary dalam buku Lembaga Administrasi Negara (2008 : 4) yang mengartikan teknologi informasi "*as the science and practice of collecting, storing, using, and sending out of information by means of computer system and telecommunication*".

Dari pengertian ini jelas terlihat bahwa TI selalu terkait pengelolaan data menjadi informasi dengan bantuan computer dan alat komunikasi berangkat dari pengertian ini. Alter dalam Buku Lembaga Administrasi Negara (2008 :5) mendefinisikan

pengertian TI sebagai prangkat lunak maupun keras yang digunakan dalam sistem informasi. Pendapat ini dapat dimaknai sebagai pengertian sempit dari TI. pendapat di dukung oleh Turban (2006) yang mengartikan teknologi informasi sebagai bagian teknis dari sistem informasi yang terdiri dari *hard ware and soft ware, data base*. Dengan demikian TI merupakan salah satu sub-sistem dari sistem informasi.

Dalam makna yang luas TI juga bisa dipahami bukan hanya bagian dari sistem informasi. TI tidak hanya sebagai teknologi atau memproses dan menyimpan informasi yang berbasis pada komputer, namun juga menggunakan teknologi komunikasi lainnya dalam rangka menyampaikan pesan atau informasi. Dengan demikian, pengelolaan TI adalah pengelolaan penyampain informasi, baik yang menggunakan komputer maupun alat komunikasi lainnya, seperti *electronik mail, voice mail, group ware system* dan lainnya. Alat-alat tersebut menjadikan para anggota dari organisasi memiliki kemampuan untuk dapat berkomunikasi dan saling bertukar informasi dengan anggota lainnya dalam rangka suatu tujuan tertentu. Selain itu, teknologi informasi juga merupakan suatu alat yang secara efektif dapat digunakan untuk mengkomunikasikan produk dan jasa yang ditawarkan oleh suatu organisasi kepada masyarakat

pengguna (*customer*) ataupun kepada supliernya. Dengan demikian TI memiliki kekuatan untuk menembus sekat-sekat dalam suatu organisasi, baik internal maupun eksternal.

Pemerintahan diseluruh dunia pada saat ini menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif. Hal tersebut menyebabkan e-goverment atau pemerintah berbasis elektronik semakin berperan penting bagi semua pengambil keputusan. Pemerintah tradisonal yang identik dengan paper-based administration mulai ditinggalkan. *Transformasi tradisional goverment* menjadi *electronic goverment* (e-goverment) menjadi salah satu isue kebijakan publik yang hangat dibicarakan saat ini.

Teknologi informasi diharapkan dapat mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi pemerintah, sehingga tugas pokok dan fungsi pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Teknologi informasi (TI) dalam wacana administrasi publik baru ditempatkan sebagai variabel utama untuk mendukung terlaksananya administrasi publik yang efisiens, efektif, berkeadilan, dan akuntabel. Kehadiran TI dalam dasa warsa

terakhir telah membuktikan bahwa TI mampu memberikan sesuatu yang semula sangat sulit dipenuhi oleh administrasi publik tradisional yakni dalam hal kecepatannya, keakuratannya dan keobyektifannya. Dengan kata lain, TI telah diyakini menjadi *enabler* faktor, faktor pemudah untuk mewujudkan sesuatu administrasi yang bebas dari pengaruh hubungan personal.

Permasalahan

Pemerintah diseluruh dunia pada saat ini menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi serta dituntut untuk lebih efektif. Hal itu menyebabkan e-government atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagi semua pengambil keputusan. Pemerintahan tradisional mulai ditinggalkan. Di Indonesia e-government baru dimulai dengan inisiatif yang dicanangkan beberapa tahun lalu.

Hingga awal dekade abad 21 ini perkembangan e-gov di Indonesia masih dalam tahap pengenalan. Hal ini ditunjukkan dengan mulai diperkenalkannya penggunaan teknologi informasi dalam mendukung perbaikan internal dan juga pelayanan ke masyarakat. Beberapa instansi pemerintah (Kementerian dan LPND) telah menginvestasikan

banyak anggaran untuk program komputerisasi dan pengembangan sistem informasi manajemen berbasis TI sebagai langkah awal program digitalisasi administrasi pemerintahan.

Meskipun perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi tidak dapat dipungkiri daya gunanya, namun demikian perlunya e-gov bukan semata mata karena perkembangan teknologi informasi dari perspektif lingkungan stratejik, tetapi yang lebih penting lagi adalah dirasakan adanya kebutuhan akan penerapan teknologi komunikasi tersebut guna mencapai kualitas pelayanan prima kepada masyarakat, di samping itu juga untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, koherensi, dan dayaguna dari organisasi publik, sebagai pelayan masyarakat.

Namun demikian dari beberapa organisasi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang telah mencoba mendayagunakan teknologi ini, baik dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara internal, maupun dalam melayani masyarakat, Dalam Buku Lembaga Administrasi Negara (2008 : 9) Tingkat perkembangan yang dicapai dewasa ini adalah baru dalam taraf mengotomasikan prosedur manual yang selama ini berlaku, atau berdasarkan rutinitas kesehariannya. Belum merefleksikan perubahan

mendasar dan besar-besaran dalam praktik manajemen sebagaimana terlihat dalam dunia usaha, di mana teknologi dimaksud telah digunakan untuk mengubah pola operasi dari usaha berdasarkan fungsi unit, menjadi restrukturisasi organisasi tentang proses yang dapat mendukung core business-nya.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan untuk memberikan gambaran tentang peran teknologi informasi (e-government) dalam instansi pemerintahan untuk mencapai kualitas pelayanan prima kepada masyarakat, disamping itu juga untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, koherensi, dan dayaguna lain dari organisasi publik.

Sasaran untuk mendapatkan analisis strategi teknologi informasi pada organisasi pemerintah, sehingga memberikan kualitas layanan kepada publik yang optimal.

Metode Penelitian

Penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Bondan dan Taylon dalam Moleong (2001) menjelaskan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, diarahkan secara utuh (holistik).

Cara pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari telaah literatur, laporan studi yang terkait dengan penelitian ini dan didukung dengan pengamatan di instansi pemerintah dengan melihat perkembangan pemanfaatan teknologi informasi (TI) sebagai salah satu faktor penunjang dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah, sehingga perlu disusun langkah-langkah strategis dalam implementasi teknologi informasi (e-government), sehingga kualitas pelayanan prima dapat dicapai.

Kerangka Teori

Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara dan video. Contoh teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga dan peranti gengam modern (misal ponsel) (Williams dan Sawyer, 2007 : 4). Sedangkan teknologi informasi menurut *Information Technology Training Package ICA99* (dalam Aji Supriyanto, 2005 : 5) mendefinisikan : *The Information Technology Industry is*

defined as technology development and application of computers and communications based technologies for processing, presenting and managing data and information. This includes computer hardware and component manufacturing; computer software development and various computer related services; together with communications equipment, component manufacturing and services. (Industri teknologi informasi didefinisikan sebagai pengembangan teknologi dan aplikasi dari komputer dan teknologi berbasis komunikasi untuk memproses, penyajian, mengelola data, dan informasi. Termasuk di dalamnya pembuatan hardware komputer dan komponen komputer; pengembangan software komputer dan berbagai jasa yang berhubungan dengan komputer; bersama-sama dengan perlengkapan komunikasi, pembuatan komponen dan jasa). Kemudian teknologi yang digunakan dalam teknologi informasi adalah teknologi komputer, teknologi telekomunikasi dan teknologi yang mampu memberikan nilai tambah untuk suatu organisasi (Hasta Dewa Putranta, 2004 :24).

Peranan Teknologi Informasi

Peranan teknologi informasi pada masa sekarang tidak hanya dipergunakan bagi organisasi atau perusahaan, melainkan juga untuk kebutuhan perseorangan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat

memberikan keunggulan kompetitif dan dapat mendukung pencapaian keunggulan pribadi. Teknologi informasi dapat dikatakan telah diimplementasikan di segala bidang dan ke berbagai lapisan masyarakat. Dengan kemampuan teknologi informasi, seseorang dapat memperoleh informasi melalui internet dengan menggunakan handphone, saat ini seseorang terbiasa menggunakan surat elektronik atau e-mail. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, peran teknologi informasi semakin luas diberbagai bidang kegiatan, antara lain : Perbankan, pendidikan, Kesehatan, Kepolisian, Perdagangan Elektronik, dan Perancangan Produk (Abdul Kadir & Terra,2003 :22).

Gambaran Umum

Peran dan posisi dalam pengelolaan pemerintahan telah berubah dari konvensional menjadi modern dengan ditandainya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) di berbagai aspek kegiatan di instansi pemerintah. Kondisi ini dapat dilihat berbagai hal, antara lain :

1. Pergeseran paradigma pengelolaan administrasi negara

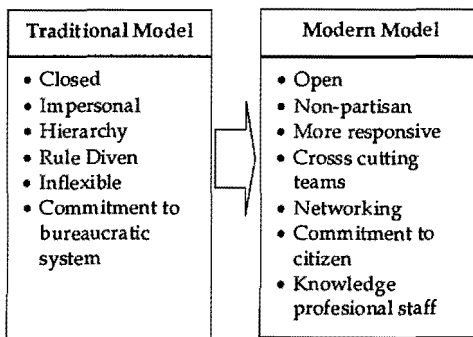
Sebelum mendiskusikan peran TI dalam pemerintahan, sekilas akan di jelaskan pergeseran paradigma pengelolaan administrasi negara yang telah terjadi sejak awal 1980-an,

menempatkan TI sebagai instrumen utama dalam rekayasa prosesnya.

Pada dekade ini, peran pemerintah tengah mengalami suatu proses perubahan transisional dan karakteristik pengelolaan publik yang berbasis pada kekuasaan tanpa adanya suatu kekuasaan akan pertanggungjawaban kinerja ke arah pengelolaan publik yang berlandaskan pada akuntabilitas dan mengedepankan aspek kepuasan pengguna jasa; dari peran sebagai penyelenggara (acting) ke peran pengarah (regulating) dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dari struktur dan kultur yang tertutup menuju ke sebuah tatanan organisasi yang terbuka, desentralistik dan demokratis; serta dari suatu pemerintahan yang bad governance ke arah suatu pemerintahan yang clean and good governance. Di dalam Buku Lembaga Administrasi Negara (2008 : 14) ada 4 (empat) faktor yang di indikasikan mempunyai pengaruh kuat bagi pergeseran paradigma pemerintahan : **Pertama** adalah transformasi global dalam bidang politik, ekonomi, tatanan teritorial kenegaraan dan budaya telah membentuk sebuah model tatanan baru dunia yang bisa dianalogikan sebagai "desa dunia" (global Villages). Kotler (1996), dalam hal tatanan ekonomi, mengingatkan adanya perubahan dahsyat sistem ekonomi makro dalam bentuk

globalisasi pasar dan kompetisi. Hal ini ditandai dengan arus investasi, industri, teknologi informasi, pengguna/pemakai produk individu yang telah melampaui batas geografis dan negara (borderless world) (Ohmae, 1995). **Kedua**, meningkatnya kesadaran politik masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam proses pemerintahan, khususnya yang secara azasi menyangkut kepentingannya. Keterlibatan yang masyarakat inginkan tidak hanya dalam level implementasi kebijakan saja, namun juga secara luas dalam perumusan formulasi dan juga evaluasinya. Dengan kata lain, wujud pemerintahan yang ditata harus mendukung adanya pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan paradigma baru pemerintahan yang meminimalkan perannya dalam urusan publik, the best government is the less governed. Dalam hal pengelolaan kenegaraan, jelas pemerintah tidak bisa lagi menjadi single actor yang mampu menyediakan seluruh kebutuhan akan produk dan jasa warga negaranya. Model penyelenggaraan pemerintahan yang monopolistik ditransformasikan ke arah yang lebih demokratis. Implikasi konkret dari hal ini adalah dikembangkannya berbagai model kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam bentuk privatisasi, penyertaan modal, dan berbagai bentuk kemitraan lainnya. **Ketiga**, menurunnya kemampuan

keuangan (*reduced funding*) pemerintah untuk memenuhi semua kebutuhan yang menyangkut pelayanan publik. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh berkurangnya sumber pendapatan negara, baik dari sumber daya alam maupun sumber lainnya, namun juga dipicu dengan semakin meningkatnya standar pemenuhan kebutuhan masyarakat. Harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima telah menjadi fenomena umum. Hal ini juga sejalan dengan semakin munculnya alternatif penyedia layanan yang mempunyai tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Dengan demikian publik harus secara aktif melakukan inovasi melalui mekanisme perbandingan (*benchmarking*). Keempat, berkembangnya wacana ilmu administrasi yang mengarah kepada model *new public management*. Berbagai konsep dan model administrasi baru dikembangkan.



Gambar 1. Perubahan Paradigma Model Manajemen Pemerintahan

Diantaranya adalah konsep *reinventing government, learning organization, banishing bureaucracy, dynamic system*. Secara tidak langsung berbagai konsep tersebut berpengaruh terhadap model manajemen pemerintahan. Secara ringkas perubahan paradigma tersebut terlihat dalam Gambar 1.

Dari peta pergeseran tersebut diatas, terlihat jelas bahwa bahwa orientasi masa depan organisasi publik harus sudah mengandalkan pada basis jejaring kerja (*networking*) baik terhadap organisasi publik lainnya, maupun kepada masyarakat. Birokrasi yang selama ini selalu dikotakan sebagai sebuah organisasi yang tertutup bagaikan dalam kotak hitam (*black box*) yang terpisah dengan kepentingan publik, baik dalam proses maupun hasilnya, harus diubah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, diperlukan suatu program dan aplikasi teknologi administrasi yang berbasis pada hightech information. Misalnya *electronic commerce (E-commerce)*, *world web site*, dan *Electronic goverment (EG)*.

2. Manfaat Teknologi Informasi (TI) dalam organisasi

a. Mengurangi aspek-aspek bahaya moral dalam transaksi publik. Teknologi informasi akan membawa cakrawala baru dalam

dunia birokrasi, yakni keterbukaan, ini merupakan suatu kerinduan publik yang telah lama menunggu hadirnya suatu administrasi pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

- b. Meningkatkan obyektifitas dalam pelayanan publik. Dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga subyektifitas dalam pelayanan akan dikurangi. Pengguna layanan hanya akan berhadapan dengan mesin yang tidak mengenal hubungan patrimonial dan pesonal.
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam organisasi. TI dapat berperan dalam meningkatkan kinerja organisasi baik dalam proses maupun dalam penyampaian atau pendistribusian jasa (*public good*). Dengan bantuan TI identifikasi dan diagnosis masalah-masalah publik akan dapat lebih akurat. Keakuratan dalam data dan informasi akan berpengaruh langsung terhadap akurasi pengambilan keputusan.
- d. Teknologi Informasi (TI) dapat digunakan untuk memotong proses-proses dalam birokrasi yang cenderung memunculkan biaya baru. Teknologi informasi juga mampu mngurangi biaya dan kecepatan dalam pelayanan, contohnya adalah dengan

menggunakan *sistem paperless*, otomatisasi pelayanan, dll.

- e. Sebagai faktor pertumbuhan ekonomi. TI telah menjadi pengungkit utama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena menjadi faktor permudah dalam peningkatan kinerja dan proses organisasi, maknanya akan terjadi peningkatan efisiensi dan kemudahan akses maka akan mendorong investasi.

3. Kebijakan e-Government

E-Government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Intruksi Presiden No.6/2001, tanggal 24 April 2001 tentang telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Lebih jauh lagi, e-government wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan pemerintah.

E-Government dengan menyediakan pelayanan melalui internet dapat dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu, penyediaan informasi, interaksi

satu arah, interaksi dua arah dan transaksi yang berarti pelayanan elektronik secara penuh. Interaksi satu arah bisa merupakan fasilitas mendownload formulir yang dibutuhkan. Pemrosesan/pengumpulan formulir secara online merupakan contoh interaksi dua arah. Sedangkan pelayanan elektronik penuh berupa pengambilan keputusan dan delivery (pembayaran). Berdasarkan fakta yang ada pelaksanaan e-government di Indonesia sebagian besar barulah pada tahap publikasi situs pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa e-government bukan hanya sekedar publikasi situs pemerintah. Pemberian layanan sampai dengan tahap *full-electronic delivery service* perlu diupayakan.

Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government, setiap instansi pemerintah agar dapat merumuskan rencana tindak E-Government dengan berkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan informasi.

5. Penerapan e-government di Indonesia

Penerapan e-government di Inonesia menghadapi beberapa tantangan, khususnya yang dihadapi oleh organisasi pemerintah. Salah satu diantaranya adalah masalah sumber daya manusia yang belum memadai.

Penerapan e-government di kantor-kantor publik perlu di dukung oleh pegawai yang mengerti mengenai teknologi, yang juga diperlukan pegawai yang mau belajar dan mampu menanggapi perubahan. Teknologi informasi berubah secara cepat sehingga kemauan belajarpun dituntut untuk memiliki setiap pegawai lembaga publik. Selain itu penerapan e-government memerlukan perubahan dalam organisasi dan dukungan ketrampilan baru. Uni Eropa sebagai salah satu komunitas yang telah berhasil menerpakan e-governmentnya mendefinisikan, bahwa e-government bukan hanya sekedar penggunaan teknologi informasi melainkan penggunaan teknologi informasi yang juga dikombinasikan dengan perubahan organisasi dan keterampilan baru dalam rangka memperbaiki pelayanan publik dan proses demokrasi dan mendukung kebijakan publik. Organisasi pemerintahan di Indonesia perlu ditata ulang untuk dapat menerapkan e-government secara efektif. Korupsi Kolusi Neopotisme yang membudaya mempengaruhi kesiapan dalam mempermudah akses publik melalui informasi. Jika KKN tidak dientaskan terlebih dahulu akan ada oknum yang akan mempergunakan kesempatan dengan mempersulit mendapatkan informasi. Budaya korupsi perlu dihilangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan sehingga kemudahan di capai dengan e-government dapat disediakan

dengan tidak menimbulkan ongkos ekonomi yang lebih tinggi yang harus dibayar masyarakat. Perlu diciptakan budaya yang memomorsatukan masyarakat dan budaya melayani

PEMBAHASAN

Strategi teknologi informasi pada organisasi pemerintah dapat dijelaskan beberapa hal penting, antara lain:

Jaringan

Perwujudan kondisi ideal tersedianya jaringan komputer antar instansi pemerintah ataupun ketersediaan jaringan yang dapat menghubungkan antara pemerintah tersebut dengan masyarakat umum. Penyediaan jaringan ini harus dapat menekan kesenjangan digital yang mungkin timbul antar pemerintah ataupun antar masyarakat.

Topologinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing instansi pemerintah. Pada dasarnya setiap instansi diharapkan memiliki jaringan internal/lokal instansi untuk mendukung penggunaan aplikasi di masing-masing instansi. Antar jaringan lokal harus dapat berkomunikasi satu sama lain membentuk satu kesatuan yang utuh.

Bagi Indonesia, hingga awal dekade abad 21 ini perkembangan e-gov masih dalam tahap pengenalan (*introduction*). Hal ini ditunjukkan dengan

mulai diperkenalkannya penggunaan teknologi informasi dalam mendukung perbaikan internal dan juga pelayanan ke masyarakat. Beberapa instansi pemerintah (Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian) telah menginvestasikan banyak anggaran untuk program komputerisasi dan pengembangan sistem informasi manajemen berbasis TI sebagai langkah awal program digitalisasi administrasi pemerintahan. Akses masuk dan keluar informasi dalam jaringan pemerintahan sedapat mungkin dikontrol melalui satu pintu yang dikelola oleh sentral unit pengelola teknologi informasi. Dengan demikian tingkat keamanan data dan jaringan dapat dikelola dengan baik. Dalam pembuatannya, jaringan dapat menggunakan media kabel maupun wireless sesuai dengan kebutuhan. Untuk tempat yang berjauhan dan pertukaran data yang kecil, penggunaan jaringan kabel menjadi sangat mahal.

Menyediakan data dan informasi secara digital di masing-masing instansi yang dapat didistribusikan antar instansi sesuai kewenangannya: Membuat peraturan tentang: a) Kebijakan satu pintu gateway untuk akses ke jaringan global; b) Data dan informasi yang akan dipertukarkan; c) Kewajiban setiap unit kerja untuk memberikan rekapitulasi kepusat data.

Menyediakan infrastruktur perangkat keras dan lunak yang terintegrasi dengan mengkoordinasikan pengembangan sistem pelayanan dan informasi dari seluruh unit kerja dengan cara : Mempertimbangkan aspek *user friendly*, struktur informasi dalam pengembangan portal: a) Pembenahan database sektoral; b) Membuat sistem informasi yang dinamis dan terpadu; c) Menerapkan standarisasi protokol dan pertukaran data; d) Membuat sistem keamanan berlapis yang handal; e) Mempertimbangkan aspek keamanan data yang dikirim melalui media; f) komunikasi on-line/secure elektronik transaction.

Infrastruktur Penunjang lainnya

Termasuk dalam infrastruktur penunjang lain untuk mendukung terwujudnya kondisi ideal dalam penerapan teknologi informasi di instansi pemerintahan, adalah tersedianya suplai listrik dan jaringan telekomunikasi yang memadai. Selain dari pada itu, untuk menekan timbulnya kesenjangan digital antar pemerintah dan masyarakat, perlu diupayakan penyediaan berbagai macam kanal akses informasi. Informasi harus dapat diakses baik melalui komputer-komputer yang tersedia di instansi-instansi pemerintahan, warnet, sekolah, kantor ataupun dari rumah secara on-line. Selain dengan menggunakan komputer, akses terhadap informasi juga dapat

memanfaatkan hand phone, *web TV*, telephone dan sarana-sarana lain. Pemerintah bekerjasama dengan dunia usaha khususnya berkewajiban untuk membangun kanal akses sebanyak mungkin, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dengan mudah dan murah. Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara : a. Menyediakan aplikasi sistem informasi di masing-masing instansi secara bertahap; b. Menyediakan jaringan LAN antar instansi pemerintah secara bertahap dan menggunakan teknologi internet untuk distribusi data; c. Pertukaran data antar instansi dengan menggunakan XML; d. Menyediakan perangkat keamanan data (*security*) yang memadai di masing-masing instansi yang berhubungan langsung dengan jaringan luar; e. Data.

Pendanaan

Investasi dibidang teknologi informasi membutuhkan dana yang relatif besar, sehingga dibutuhkan mekanisme pendanaan yang memadai. Idealnya pendanaan dapat dilakukan melalui dana pemerintah, ataupun adalah hal-hal tertentu dapat bekerjasama dengan dunia usaha untuk membangun jaringan teknologi informasi di instansi pemerintahan. Pengelolaan pendanaan harus dilakukan secara transparan dan harus dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat. Dalam pembangunan

dan pengelolaan teknologi informasi di instansi pemerintahan dapat dilakukan sepenuhnya secara internal melalui mekanisme swakelola, atau diserahkan pada pihak ketiga dengan mekanisme kontrak kerja. Sedapat mungkin penyerahan kontrak kerja memperhatikan dan memanfaatkan semaksimal mungkin sumberdaya lokal. Salah satu bentuk lain alternatif pendanaan adalah dengan melakukan kerjasama antar instansi pemerintahan dalam pembangunan aplikasi yang dibutuhkan, sehingga biaya pengembangan dapat ditanggung secara bersama. Dari sisi pendanaan juga harus diperhatikan perlunya dana operasional dan perawatan sistem informasi ini. Pada umumnya, selama 5 tahun pertama dibutuhkan dana operasional dan perawatan sebesar 20 % per tahun dari nilai investasi awal.

Pengembangan e-government memiliki lingkup kegiatan yang luas dan memerlukan investasi dan pembiayaan yang besar. Sementara itu ketersediaan anggaran pemerintah sangat terbatas dan masih harus dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu pengalokasian anggaran untuk pengembangan e-government harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar anggaran yang terbatas itu dapat dimanfaatkan secara efisien dan dapat menghasilkan daya ungkit yang kuat bagi pemben-

tukan tata-pamong yang baik. Dengan demikian diperlukan siklus perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, dan pengevaluasian anggaran pengembangan e-government yang baik, sehingga pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan strategis e-government dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan sasaran.

Kesenjangan yang lebar antara besarnya kebutuhan anggaran dengan keterbatasan anggaran yang dapat disediakan akan menimbulkan pengalokasian anggaran yang buruk apabila arah dan prioritas penggunaan anggaran tidak terdefinisi dengan baik, proses pengalokasian anggaran tidak sistematis, dan praktek penganggaran yang tidak transparan karena lemahnya persyaratan kelayakan pembiayaan. Untuk menghindari pemborosan anggaran yang merupakan uang pembayar pajak, perlu dikembangkan kerangka perencanaan dan pengalokasian anggaran.

Skenario Pendayagunaan Teknologi Informasi

Selama ini, interkasi antara penduduk, dunia usaha, atau pengguna jasa pemerintah yang lain dengan instansi pemerintah terjadi di instansi pemerintah itu. Melalui perkembangan teknologi dalam konsep e-gov, bukan tidak mungkin kalau pusat pelayanan didekatkan kepada

klien, bahkan mungkin tanpa ditunggu oleh seorangpun, atau melalui komputer pribadi di rumah maupun di kantor, atau kios-kios yang tersedia.

Sebagaimana dalam elektronik perniagaan (e-commerce). Dimana dimungkinkan transaksi dapat dilakukan secara efisien dan mendekatkan pelanggan kelayanan yang diberikan dunia usaha (Business to Customer/B 2 C), e-gov bertujuan untuk membuat interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan perusahaan dan antara instansi pemerintah. Secara lebih berdaya guna dan ramah, nyaman, transparan, cepat, dan tepat. Hal tersebut bukan saja berlaku bagi dukungan kegiatan pada berbagai bidang kehidupan di dalam negeri, tetapi juga dalam hubungan internasional.

Kebanyakan kegiatan e-gov berpusat pada penyebaran informasi. Sangat kecil prosentasenya untuk kegiatan pemrosesan, transaksi, pemberian nilai tambah lain terhadap informasi yang dimiliki dari pemakaian teknologi itu. Disisi lain pemerintah memberikan pelayanan kepada publik dengan data dan informasi penuh yang dibutuhkan, guna mengupayakan efisiensi administrasi publik, untuk membuat pemerintah lebih akuntabel, dan untuk memberikan jaminan bahwa setiap

orang mendapatkan perlakuan yang fair dan adil.

Aplikasi teknologi dan komunikasi dalam administrasi pemerintahan tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi pemerintah itu sendiri sebagai pangkal tolaknya di satu sisi, dan dari perangkat teknologi tersebut sebagai tulang punggung dari e-gov pada sisi lain. Ada dua tugas pokok pemerintah yang perlu di tunjang, yakni mengelola kebijakan dan mengelola pelayanan. Berbagai bentuk kebijakan, pengaturan, pembinaan, pengendalian, serta pengawasan dan pertanggung jawaban, dalam beragam jenis dan bidang kehidupan masyarakat bangsa dan dalam hubungan antar bangsa yang di kembangkan dalam upaya mencapai tujuan bernegara atau untuk mengatasi masalah- masalah yang dihadapi bangsa. Memerlukan data dan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Kegunaan dan peran teknologi komunikasi dan informasi adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut agar terselenggara secara tepat, efektif, nyaman, aman dan efisien. Demikian pula halnya dalam pemberian berbagai jenis dan ragam pelayanan yang dibutuhkan masyarakat bangsa, dan dalam hubungan antar bangsa.

Secara filosofis, kegunaan dan peran e-gov dapat digambarkan bahwa dengan pedayagunaan teknologi

informasi dalam e-gov, pekerjaan yang dapat diselesaikan menjadi lebih banyak, dan dalam waktu yang lebih sedikit serta kepuasan konsumen juga semakin luas.

Tujuan jangka panjang untuk suatu periode tertentu yang harus dicapai. Terdapat 4 kegiatan utama yang dikelompokkan berdasarkan entity yang berhubungan dengan pemerintah, ke-empat entity tersebut adalah masyarakat umum (Government to Citizens), masyarakat bisnis / Government to Business, unit kerja pemerintah lain / Government to Government dan pegawainya Government to Employee. Disamping itu ditambahkan satu aspek lain yang memiliki karakteristik berbeda tapi memegang peranan sangat penting, yaitu terintegrasinya seluruh sistem.

Ke-empat kegiatan utama tersebut kemudian diterjemahkan menjadi tujuan sebagai berikut: a. Government to Business/Citizens (G-to-B/C): Tersedianya informasi dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat serta fasilitas untuk menampung dan, mendayagunakan masukan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan kebijakan secara on-line, efektif, efisien dan akurat; b. Government to Government (G-to-G): Terbentuknya sistem pertukaran data dan informasi antar instansi pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif; c. Government to Employee

(G-to-E): Terwujudnya Sistem Informasi yang dapat menjembatani kepentingan instansi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pendayagunaan pegawai serta kepentingan pegawai dalam memperoleh kesejahteraan; d. Integrasi Sistem: Terintegrasinya Seluruh Sistem di lingkungan instansi Pemerintah.

Objectives/Sasaran

Tahap selanjutnya adalah tahap penentuan objectives, objectives merupakan : sasaran-sasaran yang cukup terperinci dan harus dicapai agar sasaran yang ditentukan dapat terpenuhi. Sebagai titik awal yang sangat penting agar dapat menentukan objectives dengan baik diperlukan pengetahuan tentang unit kerja, proses yang berlangsung didalamnya, hubungan antar organisasi dll. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan objectives adalah terpenuhinya kaidah SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Time Limit). Penentuan Objectives/sasaran sebagai berikut :

Sasaran G-to-Business/Citizens (Pemerintah + Masyarakat) : a. Menyediakan sistem penyebaran informasi pada setiap instansi pemerintah untuk masyarakat, masyarakat dapat mengakses dimana saja dan kapan saja dalam jangka waktu 24 jam; b. Menyediakan Sistem

Pelayanan Terpadu untuk masyarakat; c. Menyediakan Sistem Pengelolaan Aspirasi Masyarakat; d. Menyediakan Sistem Pengadaan Barang secara On-line.

Penggunaan teknologi internet untuk penyebaran informasi dan pelayanan masyarakat dengan: a. Membuat website dari masing-masing instansi pemerintah; b. Membuat fasilitas-fasilitas yang dapat meningkatkan pemakaian dan rasa memiliki masyarakat; c. Menyediakan informasi potensi daerah dan peluang investasi kepada Masyarakat. Meningkatkan kemampuan SDM pada setiap instansi pemerintah Menyediakan formulir isian, brosur-brosur, peraturan pemerintah/daerah, sehingga dapat mengelola sistem penyebaran informasi secara mandiri: d. Melalui transfer teknologi sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar; e. Melalui pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan atau training ke lembaga pendidikan yang kompeten.

Menyediakan infrastruktur pendukung dengan cara : Mengembangkan aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu : a. Mengembangkan aplikasi on-line Sistem Pelayanan Terpadu; b. Menyediakan server, komputer, jaringan, akses ke internet dan berbagai peralatan lainnya.

Menyediakan Sistem Pengelolaan Aspirasi Masyarakat : Membuat

peraturan tentang : a. Pembentukan tim yang beranggotakan para pakar dari berbagai bidang yang dapat mengolah masukan dari masyarakat; b. Penunjukkan unit pelaksana sebagai koordinator pengelola aspirasi masyarakat; c. Kewajiban penanggung-jawab untuk merespons masukan/pertanyaan dari masyarakat.

Meningkatkan Kemampuan SDM

Kemampuan SDM teknologi informasi selalu ditingkatkan, sehingga dapat menangani sistem pengelolaan aspirasi masyarakat : a. Melalui sosialisasi tentang sistem pengelolaan aspirasi masyarakat; b. Melalui transfer teknologi sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar; c. Melalui pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan atau training ke lembaga pendidikan yang kompeten; d. Pelatihan komputer untuk semua pegawai Pemerintah; e. Mengsosialisasi jabatan fungsional komputer bagi pegawai yang bertanggung jawab terhadap pengolahan data; f. Pemanfaatan SDM lokal untuk pengembangan sistem informasi.

Kerangka Arsitektur e-government

Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan e-government pada setiap instansi

berorientasi pada kerangka arsitektur di bawah ini (Lampiran II intruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003). Kerangka arsitektur itu terdiri dari empat lapis struktur, yakni: a. Akses, yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik; b. Portal pelayanan publik, yaitu situs-situs internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dokumen elektronik di sejumlah instansi terkait; c. Organisasi pengelolaan & pengolahan informasi, yaitu organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik; d. Infrastruktur dan aplikasi dasar, yaitu semua prasarana baik bentuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi, baik antar back office, antar portal pelayanan publik dengan back office, maupun antar portal pelayanan publik dengan jaringan internet, secara andal, aman, dan terpercaya. Struktur tersebut ditunjang oleh 4 (empat) pilar, yakni penataan sistem manajemen dan proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguatan kerangka kebijakan, dan pemaparan peraturan dan perundang-undangan.

Pengembangan Pelayanan Publik Melalui Jaringan Komunikasi dan Informasi

Agar pelaksanaan kebijakan pengembangan e-gov dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu, penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standarisasi, dan panduan yang diperlukan harus konsisten dan saling mendukung. Oleh karena itu perumusannya perlu mengacu pada kerangka yang utuh, serta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembentukan pelayanan publik dan penguatan jaringan pengelolaan dan pengolahan informasi yang andal dan terpercaya, seperti digambarkan di bawah ini, kerangka tersebut mengaitkan semua kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standarisasi, dan panduan sehingga terbentuk landasan untuk mendorong pembentukan pemerintahan yang baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Teknologi informasi (TI) dalam wacana administrasi publik baru ditempatkan sebagai variabel utama untuk mendukung terlaksananya administrasi publik yang efisien, efektif, berkeadilan, dan akuntabel.
2. Investasi dibidang teknologi informasi membutuhkan dana

yang relatif besar, sehingga dibutuhkan mekanisme pendanaan yang memadai.

3. Kehadiran TI dalam dasa warsa terakhir telah membuktikan bahwa TI mampu memberikan sesuatu yang semula sangat sulit dipenuhi oleh administrasi publik tradisional yakni dalam hal kecepatannya, keakuratannya dan keobyektifannya. Dengan kata lain, TI telah diyakini menjadi enabler faktor, faktor pemudah untuk mewujudkan sesuatu administrasi yang bebas dari pengaruh hubungan personal.
4. Dalam makna yang luas TI juga bisa dipahami bukan hanya bagian dari sistem informasi. TI tidak hanya sebagai teknologi atau memproses dan menyimpan informasi yang berbasis pada komputer, namun juga menggunakan teknologi komunikasi lainnya dalam rangka menyampaikan pesan atau informasi. Dengan demikian, pengelolaan TI adalah pengelolaan penyampain informasi, baik yang menggunakan komputer maupun alat komunikasi lainnya, seperti elektronik mail, voice mail, group ware system dan lainnya.
5. Pengembangan e-government memiliki lingkup kegiatan yang luas dan memerlukan investasi

dan pembiayaan yang besar. Sementara itu ketersediaan anggaran pemerintah sangat terbatas dan masih harus dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan.

Saran

1. Topologinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing instansi pemerintah. Pada dasarnya setiap instansi diharapkan memiliki jaringan internal/lokal instansi untuk mendukung penggunaan aplikasi di masing-masing instansi. Antar jaringan lokal harus dapat berkomunikasi.
2. Idealnya pendanaan dapat dilakukan melalui dana pemerintah, ataupun adalah hal-hal tertentu dapat bekerjasama dengan dunia usaha untuk membangun jaringan teknologi informasi di instansi pemerintahan. Pengelolaan pendanaan harus dilakukan secara transparan dan harus dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat.
3. Untuk tujuan jangka panjang, (suatu periode tertentu) yang harus dicapai terdapat 4 kegiatan utama yang dikelompokkan berdasarkan entity yang berhubungan dengan pemerintah, ke-empat entity tersebut adalah masyarakat umum (Government to Citizens),

masyarakat bisnis / Government to Business, unit kerja pemerintah lain / Government to Government dan pegawainya Government to Employee. Disamping itu ditambahkan satu aspek lain yang memiliki karakteristik berbeda tapi memegang peranan sangat penting, yaitu terintegrasinya seluruh sistem. satu sama lain membentuk satu kesatuan yang utuh.

4. Agar pelaksanaan kebijakan pengembangan e-government dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu, penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, dan panduan yang diperlukan harus konsisten dan saling mendukung.
5. Pengalokasian anggaran untuk pengembangan e-government harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar anggaran yang terbatas itu dapat dimanfaatkan secara efisien dan dapat menghasilkan daya ungkit yang kuat bagi pembentukan tata-pamong yang baik. Dengan demikian diperlukan siklus perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, dan pengevaluasian anggaran pengembangan e-government yang baik, sehingga pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan strategis e-government dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Kadir, Abdul dan Triwahyuni, Terra Ch., 2003, Pengenalan Teknologi Informasi, Yogyakarta, Andi Offset

Kementerian Komunikasi dan Informasi Deputi Bidang Telematika, 2003, Intruksi Presiden Republik Indonesia Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, Jakarta

Lembaga Administrasi Negara, 2008, Teknologi Informasi Dalam Pemerintahan, Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, Jakarta

Moleong, Lexy J., 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosda Karya

Pusat Pengembangan Informatika Nuklir - BATAN. Bidang Sistem dan jaringan, Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government, Tangerang

Puslitbang Pos dan Telekomunikasi, 2005, Studi Kesiapan Infrastruktur Telekomunikasi Pada Perdagangan elektronik (E-Commerce), Jakarta

Putranta, Hastha Dewa, 2004, Pengantar Sistem Dan Teknologi Informasi, Yogyakarta, AMUS

Supriyanto, Aji, 2005, Pengantar Teknologi Informasi, Jakarta, Salemba Infotek

Williams, Brian K. dan Stacey C. Sawyer, 2007, Using Information Technology, Pengenaan Praktis Dunia Komputer dan Komunikasi, Yogyakarta, Penerbit Andi

BIODATA

Azwar Aziz, Lahir di Tanjung Pinang, 31 Desember 1954. Pendidikan S2 Manajemen Pemasaran Tahun 2002, Jabatan Peneliti Muda Puslitbang Postel.